

LAPORAN AKHIR

Pengembangan Budaya Lokal yang Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat

BAPELITBANGDA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tahun Anggaran 2025

https://bandungbaratkab.go.id

@bappelitbangda.kkb

PARAHYANG MEGATAMA
KONSULTAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Kajian "Pengembangan Budaya Lokal yang Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Kajian ini merupakan bagian dari kegiatan kelitbangan lingkup pariwisata yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat, sebagai bentuk upaya mendukung perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Laporan akhir ini disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi, serta kerangka analisis yang akan digunakan dalam pelaksanaan kajian. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi potensi budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi, serta dirumuskan strategi pengembangan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada jajaran Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, perangkat daerah terkait, serta narasumber dan tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan kajian ini.

Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah, serta menjadi referensi bagi pengembangan budaya lokal sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di wilayah perdesaan.

bappelitbangda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 6
DAFTAR GAMBAR 7
BAB 1 PENDAHULUAN 8
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran 9
1.2.1 Maksud 9
1.2.2 Tujuan 9
1.2.3 Sasaran 10
1.3 Keluaran 10
1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan 10
1.5 Dasar Hukum 11
1.6 Metodologi Pekerjaan 11
1.6.1 Tahap Pelaksanaan 11
1.6.2 Perspektif dan Pendekatan Analisis 12
1.6.3 Komponen Analisis 12
1.6.4 Model Analisis 13
1.7 Sistematika Pelaporan 13
BAB 2 KONSEP BUDAYA DAN EKONOMI 16
2.1 Budaya dalam Perspektif Ilmu Sosial Kontemporer 17
2.2 Budaya dan Pembangunan: Pergeseran Paradigma Teoretis 17
2.3 Hubungan Budaya dan Ekonomi dalam Literatur Kontemporer 18
2.3.1 Budaya, Ekonomi Kreatif, dan Kesejahteraan Masyarakat 18
2.3.2 Modal Budaya, Modal Sosial, dan Pembangunan Ekonomi Lokal 19
2.4 Tipologi Budaya dalam Analisis Pembangunan Ekonomi Masyarakat 19
2.5 Konsep Ekonomi Kerakyatan 21

bappelitbangda

2.5.1 Pengertian Ekonomi Kerakyatan 21
2.5.2 Ekonomi Kerakyatan sebagai Ekonomi yang Berbasis Kekuatan Masyarakat 23
2.5.3 Prinsip – Prinsip Ekonomi Kerakyatan 23
2.5.4 Ekonomi Kerakyatan Berbasi Budaya 24
BAB 3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT 26
3.1 Kondisi Kewilayahan 27
3.2 Kondisi Kependudukan dan Sosial Masyarakat Kabupaten Bandung Barat 28
3.3 Struktur dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat 30
3.3.1 Karakter Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Peri-Urban 30
3.3.2 Peran UMKM dan Ekonomi Berbasis Rumah Tangga 31
3.3.3 Pariwisata sebagai Aktivitas Ekonomi Masyarakat 31
3.3.4 Ketimpangan Ekonomi dan Tantangan Inklusivitas 32
3.4 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Bandung Barat 32
3.4.1 Warisan Budaya Tak Benda dan Praktik Tradisional 33
3.4.2 Seni Pertunjukan dan Ekspresi Kreatif Komunitas 34
3.4.3 Budaya Kuliner dan Pengetahuan Lokal Pangan 36
3.4.4 Situs, Cagar Budaya, dan Lanskap Budaya 36
3.4.5 Ritus dan Upacara Adat 37
3.4.6 Tradisi Lisan 38
3.4.7 Pengetahuan dan Teknologi Tradisional 39
3.4.8 Situs Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) 41
3.4.9 Persebaran Budaya dan Tipologi Desa 41
BAB 4 BUDAYA DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT 45
4.1 Identifikasi Potensi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat 46
4.1.1 Kerangka Identifikasi Potensi Ekonomi 46
4.1.2 Struktur dan Basis Perekonomian Kabupaten Bandung Barat 47
4.1.3 Potensi Ekonomi Sektor Primer: Sumber Daya Lokal sebagai Basis Ekonomi Masyarakat 48
4.1.4 Potensi Ekonomi Sektor Sekunder: Pengolahan dan Penciptaan Nilai Tambah 50
4.1.5 Potensi Ekonomi Sektor Tersier: Pasar, Pariwisata dan Jasa 51
4.1.6 Profil Spasial Potensi Ekonomi 52

bappelitbangda

4.1.7 Sintesis Potensi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Ekonomi Kerakyatan 53
4.1.8 Hubungan Potensi Ekonomi dengan Budaya Lokal 55
4.2 Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang Telah Berjalan di Kabupaten Bandung Barat 57
4.2.1 Kerangka Evaluasi 57
4.2.2 Dimensi dan Indikator Evaluasi 58
4.2.3 Identifikasi Program/Kegiatan yang Relevan 59
4.2.4 Evaluasi Program Pengembangan UMKM dan Produk Lokal 60
4.2.5 Evaluasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat 61
4.2.6 Evaluasi Integrasi Budaya dalam Program Ekonomi Masyarakat 63
4.2.7 Sintesis Evaluasi Program 65
4.3 Potensi Pengembangan Budaya sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan 67
4.4 Analisis Potensi Pariwisata Budaya Kabupaten Bandung Barat 68
4.5 Konteks dan Rasionalisasi Analisis 69
4.6 Pola Umum Dampak Ekonomi Budaya 71
4.6.1 Pola Dampak Langsung pada Wilayah Wisata–Budaya Mapan 71
4.6.2 Pola Dampak Tidak Langsung pada Wilayah Budaya Produktif Menengah 71
4.6.3 Pola Dampak Sosial Dominan pada Wilayah Agraris–Budaya Tradisional 72
4.6.4 Pola Budaya sebagai Modal Sosial pada Wilayah Berbasis Komunitas 72
4.6.5 Pola Potensi Ekonomi yang Belum Teraktivasi 72
4.7 Implikasi Pola Budaya terhadap Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat 73
4.7.1 Diferensiasi Wilayah sebagai Dasar Strategi Ekonomi Berbasis Budaya 73
4.7.2 Kapasitas Desa sebagai Penentu Efektivitas Strategi 74
4.7.3 Transformasi Fungsi Budaya dalam Siklus Ekonomi Lokal 74
4.7.4 Risiko Komodifikasi dan Ketimpangan Manfaat 75
4.7.5 Integrasi Budaya dalam Sistem Ekonomi Lokal 75
4.7.6 Kebutuhan Pengembangan Berdasarkan Karakter Wilayah 76
4.8 Isu Strategis Pengembangan 77
BAB 5 ARAH PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS BUDAYA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT 78
5.1 Kerangka Dasar Pengembangan 79

bappelitbangda

5.2 Prinsip Pengembangan 80
5.3 Arah Kebijakan Pengembangan 81
5.4 Strategi Pengembangan 83
5.5 Program Prioritas 87
5.6 Tahapan Implementasi 88
5.6.1 Tahap Jangka Pendek 88
5.6.2 Tahap Jangka Menengah 89
5.6.3 Tahap Jangka Panjang 89
5.7 Peran Pemangku Kepentingan 90
5.8 Rekomendasi Pengembangan Berdasarkan Prioritas Budaya 91
BAB 6 PENUTUP 93
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN – RINGKASAN SEPULUH (10) RITUS WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB) KBB 97

bappelitbangda

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kompenen Kerangka Analisis 12
Tabel 2. 1 Prinsip -Prinsip Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pemahaman Pasal 33 UUD 1945 23
Tabel 3. 1 Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Bandung Barat 33
Tabel 3. 2 Seni Pertunjukan 35
Tabel 3. 3 Cagar Budaya dan Warisan Sejarah 37
Tabel 3. 4 Klasifikasi Ritus dan Upacara Adat Kabupaten Bandung Barat 37
Tabel 3. 5 Ritus dan Upacara Adat (WBTB dan Tradisi Lokal) 38
Tabel 3. 6 Tradisi Lisan yang Berkaitan dengan WBTB Kabupaten Bandung Barat 39
Tabel 3. 7 Pengetahuan Tradisional dalam WBTB Kabupaten Bandung Barat 40
Tabel 3. 8 Permainan Tradisional 41
Tabel 3. 9 Pengetahuan dan Praktik Tradisional 41
Tabel 3. 10 Pengelompokkan Budaya berdasarkan Status Desa dalam Kecamatan 43
Tabel 4. 1 Struktur Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 47
Tabel 4. 2 Potensi Ekonomi Sektor Primer Kabupaten Bandung Barat 49
Tabel 4. 3 Potensi Ekonomi Sektor Sekunder 50
Tabel 4. 4 Potensi Ekonomi Sektor Tersier 51
Tabel 4. 5 Profil Spasial Potensi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat 52
Tabel 4. 6 Sintesis Potensi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan 53
Tabel 4. 7Kerangka Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat 58
Tabel 4. 8 Kelompok Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang Relevan 59
Tabel 4. 9 Evaluasi Pengembangan UMKM dan Produk Lokal 61
Tabel 4. 10 Evaluasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat 62
Tabel 4. 11 Evaluasi Integrasi Budaya dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat 63
Tabel 4. 12 Sintesis Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat 65
Tabel 5. 1 Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Budaya 87
Tabel 5. 2 Tahapan Implementasi Pengembangan Ekonomi Budaya 90
Tabel 5. 3 Peran Pemangku Kepentingan 90
Tabel 5. 4 Rekomendasi Pengembangan Berdasarkan Aset Budaya 91

bappelitbangda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Konseptual Hubungan antar-variabel 13
Gambar 2. 1 Hubungan Antar Budaya dan Ekonomi Kerakyatan.....24
Gambar 5. 1 Kerangka Dasar Pengembangan Ekonomi berbasis Budaya.....80

bappelitbangda

BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bandung Barat memiliki kekayaan budaya yang sangat potensial sebagai basis pengembangan ekonomi lokal sekaligus penguatan identitas masyarakat. Terdapat lebih dari 15 objek cagar budaya, ±200 kelompok seni tradisional yang masih aktif, serta berbagai festival budaya yang digelar secara rutin seperti *Festival Seni Lembang* dan *Kirab Budaya*. Data BPS menunjukkan sekitar 85% masyarakat masih menggunakan Bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan kuatnya nilai-nilai budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Namun, potensi budaya tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai modal ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tantangan yang dihadapi meliputi terbatasnya akses pasar bagi produk budaya, rendahnya kapasitas kewirausahaan berbasis budaya, serta urbanisasi tenaga muda yang menyebabkan tergerusnya regenerasi pelaku budaya.

Sejalan dengan arah kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (2025–2030), kebudayaan dipandang bukan sekadar aset simbolik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang dapat dimobilisasi untuk strategi pengurangan kemiskinan berbasis kearifan lokal. Penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya, seperti kerajinan, kuliner tradisional, dan seni pertunjukan dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kajian ini disusun sebagai upaya untuk merumuskan strategi pengembangan budaya lokal yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat tanpa menghilangkan jati diri dan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Mengidentifikasi prospek pengembangan ekonomi masyarakat berbasis budaya lokal melalui optimalisasi potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, dan penerapan konsep ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi budaya lokal dan potensi ekonomi di Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengidentifikasi konsep ekonomi kerakyatan yang relevan dengan konteks budaya lokal.
3. Mengevaluasi program pengembangan ekonomi masyarakat yang telah berjalan.

bappelitbangda

4. Merumuskan strategi pengembangan budaya lokal untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

1.2.3 Sasaran

Adapun sasaran dari kajian ini adalah:

1. Tersusunnya peta potensi budaya lokal dan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
2. Teridentifikasinya peluang dan kendala dalam pengembangan ekonomi berbasis budaya.
3. Terumuskannya rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi budaya lokal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

1.3 Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini diantaranya adalah:

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Akhir
3. Executive Summary
4. Policy Brief
5. Poster

1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

Kajian ini mencakup kegiatan yang nantinya akan menghasilkan Pengembangan Budaya Lokal Yang Mendukung Peningkatan Perekonomian san Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) dengan tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan pengumpulan/inventarisasi data primer dan sekunder terkait potensi budaya lokal dan potensi ekonomi daerah;
b. Memetakan potensi dan permasalahan aksesibilitas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat Kabupaten Bandung Barat;
c. Mengidentifikasi kebijakan terkait pengembangan budaya lokal dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat;
d. Identifikasi pemangku kepentingan dan struktur organisasi baik internal maupun eksternal;

bappelitbangda

e. Merumuskan strategi dan program optimalisasi potensi budaya lokal daerah, penguatan ekonomi lokal, dan konsep ekonomi kerakyatan.

1.5 Dasar Hukum

Kegiatan ini berlandaskan pada berbagai ketentuan, antara lain:

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045;
7. Perda Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045;
8. Perda Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029;
9. Perbup Bandung Barat No. 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025.

1.6 Metodologi Pekerjaan

Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, berfokus pada analisis deskriptif terhadap data sekunder serta wawancara terbatas dengan pemangku kepentingan kunci (*key stakeholders*).

1.6.1 Tahap Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

- Mobilisasi tim pelaksana dan koordinasi awal dengan Bappelitbangda;
- Penyusunan rencana kerja dan metodologi kajian;
- Desk study terhadap data dan dokumen yang relevan;
- Penyusunan laporan pendahuluan.

b. Tahap Pelaksanaan

- Pengumpulan data dan inventarisasi potensi budaya serta potensi ekonomi desa;
- Analisis keterkaitan antara budaya lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- Kajian sebaran potensi budaya dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

bappelitbangda

c. Tahap Penyelesaian

1. Konsolidasi hasil kajian dengan pihak terkait;
2. Penyusunan laporan akhir dan rekomendasi kebijakan.

1.6.2 Perspektif dan Pendekatan Analisis

Analisis akan menggunakan tiga perspektif utama:

1. Perspektif Sosio-Kultural. Melihat budaya lokal sebagai sistem nilai dan praktik sosial yang membentuk perilaku, kohesi, dan partisipasi masyarakat. Fokus: pelestarian nilai budaya, regenerasi pelaku seni, dan transmisi kearifan lokal.
2. Perspektif Ekonomi Kreatif dan Kerakyatan. Mengkaji bagaimana potensi budaya dapat diolah menjadi produk atau jasa ekonomi yang bernilai pasar tanpa menghilangkan esensi budaya. Fokus: model bisnis budaya, penguatan UMKM berbasis budaya, dan akses pasar.
3. Perspektif Tata Kelola dan Kebijakan Pembangunan Daerah Menilai sejauh mana kebijakan daerah (RPJMD, RPJPD, dan regulasi pariwisata) mengakomodasi integrasi budaya dalam strategi ekonomi daerah. Fokus: kelembagaan, peran pemerintah desa, sinergi antar-dinas, dan dukungan pembiayaan.

1.6.3 Komponen Analisis

Kerangka analisis awal akan dibangun melalui tiga komponen utama berikut.

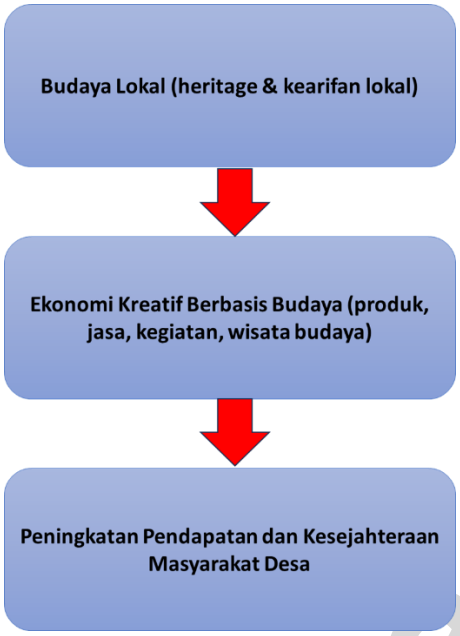
Tabel 1. 1 Kompenen Kerangka Analisis

No	Komponen	Aspek yang Dianalisis	Sumber Data & Metode
1	Potensi Budaya Lokal	Inventarisasi jenis budaya (seni, tradisi, situs, kuliner, kriya, ritual), persebaran geografis, dan kondisi eksisting.	Studi literatur, data BPS, Dinas Pariwisata, wawancara tokoh budaya.
2	Potensi Ekonomi Berbasis Budaya	Hubungan antara potensi budaya dan sektor ekonomi desa (UMKM, wisata, industri kreatif).	Analisis sekunder (data ekonomi kreatif, PDRB), observasi lapangan terbatas.
3	Kelembagaan dan Kebijakan	Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung ekonomi berbasis budaya; dukungan kelembagaan dan pembiayaan.	Analisis dokumen kebijakan (RPJMD, Perda Kebudayaan, program Bappelitbangda).

bappelitbangda

1.6.4 Model Analisis

Secara konseptual, hubungan antarvariabel dapat dijelaskan dalam model berikut.



Gambar 1. 1 Konseptual Hubungan antar-variabel

1.7 Sistematika Pelaporan

Laporan Akhir Kajian Pengembangan Budaya Lokal yang Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai keterkaitan antara budaya lokal, potensi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pembahasan disusun mulai dari pendahuluan, landasan konseptual, gambaran umum wilayah, analisis potensi dan permasalahan, hingga perumusan arah pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan kajian, maksud, tujuan dan sasaran, keluaran, ruang lingkup pekerjaan, dasar hukum, serta metodologi pekerjaan yang digunakan. Metodologi pekerjaan mencakup tahap pelaksanaan, perspektif dan pendekatan analisis, komponen analisis, serta model analisis. Bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan sebagai kerangka penyajian keseluruhan isi laporan.

BAB II Konsep Budaya Dan Ekonomi, Bab ini membahas landasan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antara budaya lokal dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembahasan meliputi budaya dalam perspektif ilmu sosial kontemporer, budaya dan

bappelitbangda

pembangunan dalam perkembangan paradigma teoretis, hubungan budaya dan ekonomi dalam literatur kontemporer, termasuk budaya, ekonomi kreatif, kesejahteraan masyarakat, modal budaya, modal sosial, dan pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, bab ini menguraikan tipologi budaya dalam analisis pembangunan ekonomi masyarakat serta konsep ekonomi kerakyatan, yang mencakup pengertian, ekonomi berbasis kekuatan masyarakat, prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, dan ekonomi kerakyatan berbasis budaya.

BAB III Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat, Bab ini menyajikan gambaran kondisi eksisting Kabupaten Bandung Barat sebagai wilayah kajian, meliputi kondisi kewilayahan, kondisi kependudukan dan sosial masyarakat, serta struktur dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembahasan ekonomi mencakup karakter ekonomi masyarakat perdesaan dan peri-urban, peran UMKM dan ekonomi berbasis rumah tangga, pariwisata sebagai aktivitas ekonomi masyarakat, serta ketimpangan ekonomi dan tantangan inklusivitas. Selanjutnya, bab ini menguraikan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat, meliputi warisan budaya tak benda dan praktik tradisional, seni pertunjukan dan ekspresi kreatif komunitas, budaya kuliner dan pengetahuan lokal pangan, situs dan cagar budaya, ritus dan upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan dan teknologi tradisional, objek diduga cagar budaya (ODCB), serta persebaran budaya dan tipologi desa.

BAB IV Budaya Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Bab ini merupakan bagian utama analisis yang membahas keterkaitan potensi budaya lokal dengan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan meliputi identifikasi potensi ekonomi berdasarkan kerangka identifikasi, struktur dan basis perekonomian, potensi ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier, profil spasial potensi ekonomi, sintesis potensi ekonomi dalam perspektif ekonomi kerakyatan, serta hubungan potensi ekonomi dengan budaya lokal. Bab ini juga mengevaluasi program pengembangan ekonomi masyarakat yang telah berjalan, mencakup kerangka evaluasi, dimensi dan indikator evaluasi, identifikasi program yang relevan, evaluasi pengembangan UMKM dan produk lokal, pariwisata berbasis masyarakat, serta integrasi budaya dalam program ekonomi masyarakat. Selanjutnya, dibahas potensi pengembangan budaya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, analisis potensi pariwisata budaya, konteks dan rasionalisasi analisis, pola umum dampak ekonomi budaya, serta implikasinya terhadap strategi peningkatan ekonomi masyarakat berdasarkan karakter wilayah, kapasitas desa, transformasi fungsi budaya, risiko komodifikasi, ketimpangan manfaat, integrasi budaya dalam sistem ekonomi lokal, dan kebutuhan pengembangan. Bab ini diakhiri dengan identifikasi isu strategis pengembangan sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan strategi pada bab berikutnya.

BAB V Arah Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Budaya di Kabupaten Bandung Barat, Bab ini merumuskan arah pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya berdasarkan hasil kajian konseptual, gambaran kondisi wilayah, serta hasil analisis potensi dan

bappelitbangda

permasalahan. Pembahasan mencakup kerangka dasar pengembangan, prinsip pengembangan, arah kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan program prioritas. Selanjutnya, diuraikan tahapan implementasi yang meliputi tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program. Bab ini juga menyajikan rekomendasi pengembangan berdasarkan prioritas budaya untuk mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, memperkuat partisipasi masyarakat, memperluas manfaat ekonomi bagi pelaku lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang dimiliki.

BAB VI Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir laporan yang memuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan keseluruhan hasil kajian. Kesimpulan merangkum temuan utama mengenai potensi budaya lokal, kondisi ekonomi masyarakat, keterkaitan budaya dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, serta arah pengembangan yang relevan bagi Kabupaten Bandung Barat. Rekomendasi disusun sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas program, serta melaksanakan pengembangan budaya lokal yang berorientasi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka, Bagian ini memuat sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan, publikasi statistik, buku, jurnal ilmiah, literatur, serta sumber data lain yang relevan dengan kajian pengembangan budaya lokal dan ekonomi kerakyatan.

Lampiran, Bagian ini menyajikan dokumen pendukung yang melengkapi pembahasan laporan, yaitu ringkasan sepuluh (10) ritus Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Bandung Barat. Lampiran tersebut memberikan informasi pendukung mengenai kekayaan budaya lokal yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

bappelitbangda

BAB 2 KONSEP BUDAYA DAN EKONOMI



Dalam bab ini akan dibahas mengenai pendekatan teoritis dan empiris terkait pengertian budaya dan juga ekonomi yang digunakan dalam kajian ini.

2.1 Budaya dalam Perspektif Ilmu Sosial Kontemporer

Dalam kajian ilmu sosial kontemporer, budaya tidak lagi dipahami semata sebagai kumpulan tradisi, adat istiadat, atau peninggalan masa lalu, melainkan sebagai sistem dinamis yang membentuk cara masyarakat memahami realitas, mengorganisasi kehidupan sosial, dan merespons perubahan. Budaya berfungsi sebagai kerangka nilai, norma, dan praktik yang memengaruhi perilaku individu maupun kolektif, termasuk dalam ranah ekonomi dan pembangunan.

Pemahaman ini menandai pergeseran penting dari pendekatan klasik menuju pendekatan interpretatif dan institusional. Budaya dipandang sebagai living system yang terus diproduksi dan direproduksi melalui interaksi sosial, serta memiliki kapasitas adaptif terhadap perubahan struktural, teknologi, dan lingkungan (Geertz, 1973; UNESCO, 2013). Dalam konteks ini, budaya tidak bersifat statis atau terikat sepenuhnya pada masa lalu, tetapi menjadi sumber daya strategis yang dapat dimobilisasi untuk tujuan pembangunan.

Literatur mutakhir menegaskan bahwa budaya merupakan bagian integral dari sistem pembangunan, bukan variabel residu. OECD (2018) dan UNESCO (2013) menempatkan budaya sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan karena kontribusinya terhadap kohesi sosial, inovasi, dan kesejahteraan ekonomi. Budaya juga dipahami sebagai faktor yang membentuk preferensi, aspirasi, dan strategi hidup masyarakat, sehingga berpengaruh langsung terhadap dinamika ekonomi lokal.

2.2 Budaya dan Pembangunan: Pergeseran Paradigma Teoretis

Dalam sejarah teori pembangunan, budaya sempat diposisikan sebagai hambatan terhadap modernisasi, terutama dalam paradigma modernisasi klasik yang menekankan rasionalitas ekonomi dan industrialisasi. Namun, kritik terhadap pendekatan ini melahirkan paradigma pembangunan alternatif yang menempatkan budaya sebagai aset dan modal pembangunan.

Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses perluasan kebebasan manusia, bukan sekadar peningkatan pendapatan. Dalam kerangka ini, budaya berperan dalam membentuk kemampuan (*capabilities*) masyarakat untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Budaya memengaruhi cara masyarakat memaknai kesejahteraan, kerja, dan keberhasilan ekonomi.

Pendekatan pembangunan berbasis wilayah (*place-based development*) semakin menguatkan peran budaya sebagai sumber daya lokal yang unik. Setiap wilayah memiliki konfigurasi budaya yang berbeda, yang membentuk identitas, praktik sosial, dan pola ekonomi masyarakatnya. Oleh

bappelitbangda

karena itu, strategi pembangunan yang sensitif terhadap konteks budaya dinilai lebih berkelanjutan dan inklusif dibandingkan pendekatan seragam (*one-size-fits-all*).

Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa wilayah yang mampu mengintegrasikan budaya ke dalam strategi pembangunan cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik, terutama melalui diversifikasi ekonomi berbasis pariwisata budaya, ekonomi kreatif, dan pengelolaan warisan budaya (OECD, 2018; Galluccio, 2024).

2.3 Hubungan Budaya dan Ekonomi dalam Literatur Kontemporer

Hubungan antara budaya dan ekonomi telah menjadi fokus utama dalam kajian ekonomi budaya dan pembangunan regional. Budaya dipahami tidak hanya sebagai faktor simbolik, tetapi sebagai elemen yang memengaruhi struktur ekonomi, pola produksi, dan distribusi manfaat ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi institusional, budaya merupakan bagian dari institusi informal yang memengaruhi perilaku ekonomi melalui norma, kepercayaan, dan nilai bersama. North (1990) menegaskan bahwa institusi informal memiliki peran penting dalam menentukan kinerja ekonomi suatu wilayah. Nilai budaya seperti kepercayaan dan kerja sama dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi lokal.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa warisan budaya, baik bendawi maupun tak benda, memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kostakis dan Lolos (2024), melalui studi empiris di tingkat regional, menunjukkan bahwa *endowment* warisan budaya memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas pariwisata, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan lokal. Temuan ini memperkuat argumen bahwa budaya dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi, bukan sekadar objek pelestarian.

Galluccio (2024) juga menegaskan bahwa aset warisan budaya, termasuk museum dan situs sejarah, memiliki kemampuan untuk menarik wisatawan, menghasilkan pendapatan, dan menciptakan kesempatan kerja. Studi ini menempatkan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang berbasis aset (*asset-based development*).

2.3.1 Budaya, Ekonomi Kreatif, dan Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi kreatif merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan budaya dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif berbasis budaya memanfaatkan kreativitas, pengetahuan lokal, dan ekspresi budaya sebagai sumber nilai tambah ekonomi. Pendekatan ini semakin relevan dalam konteks pembangunan daerah, terutama wilayah perdesaan dan semi-perdesaan.

Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi kreatif berbasis budaya lokal berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan identitas lokal, dan keberlanjutan sosial (Pramawati, 2025; Fitria, 2024). Ekonomi kreatif tidak hanya menghasilkan

bappelitbangda

keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap budaya mereka sendiri.

Richards (2018) menekankan bahwa ekonomi kreatif dan pariwisata budaya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja berbasis komunitas, terutama bagi perempuan dan generasi muda. Selain itu, sektor ini relatif adaptif terhadap perubahan pasar dan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kapasitas lokal.

Dalam kerangka teoretis, ekonomi kreatif berbasis budaya juga dipandang sebagai instrumen pembangunan inklusif. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, ekonomi budaya dapat mengurangi ketimpangan dan memperkuat distribusi manfaat ekonomi di tingkat lokal (OECD, 2018).

2.3.2 Modal Budaya, Modal Sosial, dan Pembangunan Ekonomi Lokal

Konsep modal budaya dan modal sosial memberikan kerangka analitis penting untuk memahami bagaimana budaya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Modal budaya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan praktik budaya yang dapat dimobilisasi untuk tujuan ekonomi, sementara modal sosial mencakup jaringan, kepercayaan, dan norma yang memfasilitasi kerja sama kolektif.

Literatur kontemporer menegaskan bahwa kombinasi modal budaya dan modal sosial merupakan fondasi utama bagi pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Budaya kolaboratif, misalnya, terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan bersama (Yuniarti, 2024).

Dalam konteks pembangunan wilayah, modal budaya dan sosial memungkinkan masyarakat untuk mengelola sumber daya bersama, mengembangkan usaha kolektif, dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan partisipasi, inklusivitas, dan keberlanjutan jangka panjang.

2.4 Tipologi Budaya dalam Analisis Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Untuk kepentingan analisis pembangunan daerah, budaya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama yang relevan secara ekonomi dan sosial, yaitu: ritus dan praktik sosial, warisan budaya tak benda, situs budaya, seni, dan kuliner. Tipologi ini tidak dimaksudkan untuk memisahkan budaya secara kaku, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami potensi dan fungsi budaya dalam pembangunan.

Ritus dan praktik sosial berfungsi memperkuat kohesi sosial dan legitimasi sosial dalam pengelolaan sumber daya. Warisan budaya tak benda merepresentasikan pengetahuan dan keterampilan lokal yang dapat menjadi basis inovasi ekonomi. Situs budaya memiliki potensi

bappelitbangda

ekonomi melalui pariwisata, sementara seni dan kuliner memiliki keterkaitan langsung dengan sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

Pendekatan tipologis ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap potensi budaya suatu wilayah, sekaligus menghindari reduksi budaya menjadi sekadar komoditas ekonomi.

Berikut merupakan penjelasan dari klasifikasi budaya.

1. Ritus dan Tradisi Sosial

Ritus dan tradisi sosial merupakan praktik kolektif yang sarat makna simbolik dan nilai sosial. Turner (1969) menekankan bahwa ritus berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang memperkuat solidaritas dan identitas kolektif. Dalam konteks ekonomi, ritus dan tradisi dapat menjadi basis bagi pengembangan aktivitas ekonomi berbasis event dan pariwisata budaya, sekaligus memperkuat kohesi sosial yang mendukung kerja sama ekonomi.

2. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

Warisan budaya tak benda mencakup ekspresi lisan, pengetahuan tradisional, praktik sosial, dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. UNESCO (2003) menegaskan bahwa warisan ini merupakan sumber daya penting bagi keberlanjutan budaya dan pembangunan manusia. Nilai ekonominya terletak pada potensi pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan budaya, dan inovasi berbasis pengetahuan lokal.

3. Situs dan Warisan Budaya Bendawi

Situs budaya dan warisan bendawi memiliki nilai historis dan simbolik yang tinggi. Timothy dan Boyd (2003) menunjukkan bahwa pengelolaan warisan budaya yang berkelanjutan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pariwisata, selama dikelola dengan prinsip pelestarian dan partisipasi masyarakat.

4. Seni dan Ekspresi Kreatif

Seni dan ekspresi kreatif merupakan bentuk budaya yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor ekonomi kreatif. Seni menghasilkan nilai ekonomi melalui penciptaan produk dan jasa, sekaligus memperkuat identitas dan citra wilayah (Throsby, 2001).

5. Kuliner sebagai Ekspresi Budaya

Kuliner tradisional merepresentasikan pengetahuan lokal tentang pangan dan lingkungan. Richards (2018) menekankan bahwa kuliner memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal karena mudah diakses, berbasis sumber daya lokal, dan memiliki daya tarik pasar yang luas.

bappelitbangda

2.5 Konsep Ekonomi Kerakyatan

2.5.1 Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam kegiatan ekonomi, baik dalam pemanfaatan sumber daya, proses produksi, pengelolaan usaha, pengembangan nilai tambah, maupun penerimaan manfaat ekonomi. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan gagasan demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia yang menekankan kebersamaan, keadilan, kemandirian, dan kemakmuran masyarakat.

Secara konstitusional, prinsip tersebut memiliki landasan dalam **Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan demikian, ekonomi kerakyatan tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kecil, tetapi lebih luas sebagai **orientasi dan tata kelola ekonomi yang memberikan ruang, akses, peran, dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi**.

Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan tersebut menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan aktivitas produksi atau nilai ekonomi secara agregat, tetapi juga berdasarkan sejauh mana aktivitas tersebut menciptakan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah lokal, pemerataan manfaat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran mengenai ekonomi kerakyatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gagasan **Mohammad Hatta** mengenai demokrasi ekonomi dan usaha bersama. Gagasan tersebut kemudian memiliki keterkaitan kuat dengan rumusan Pasal 33 UUD 1945.

Dalam kerangka pemikiran Hatta, perekonomian tidak semata-mata diarahkan pada kepentingan individual, tetapi dibangun berdasarkan **usaha bersama dan asas kekeluargaan**. Gagasan tersebut kemudian tercermin dalam konstruksi ekonomi Indonesia yang menempatkan kemakmuran masyarakat sebagai orientasi utama.

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM mencatat bahwa gagasan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan telah dikembangkan Mohammad Hatta sejak dekade 1930-an dan kemudian dirumuskan dalam konstitusi melalui Pasal 33 UUD 1945.

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Indonesia, konsep ekonomi kerakyatan juga sering dipahami sebagai bentuk demokrasi ekonomi yang menekankan kebersamaan dan

bappelitbangda

kesejahteraan masyarakat. Kajian dalam *Jurnal Konstitusi* menjelaskan keterkaitan ekonomi kerakyatan dengan demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya melalui prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Pemikiran tersebut relevan dengan kegiatan ini karena pengembangan budaya lokal **tidak diarahkan hanya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara agregat**, tetapi untuk memastikan masyarakat desa menjadi bagian dari proses ekonomi tersebut

Selain itu Pemikiran **Prof. Mubyarto** merupakan salah satu rujukan penting dalam perkembangan konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia. Mubyarto mengembangkan pemikiran ekonomi Pancasila yang menempatkan nilai keadilan sosial, pemerataan, kebersamaan, dan keberpihakan terhadap masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM juga menempatkan Mubyarto sebagai salah satu tokoh utama pengembangan pemikiran Ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dalam kajian mengenai pemikiran Mubyarto, ekonomi kerakyatan dipahami sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada **kemakmuran rakyat**, dengan penekanan pada kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan memperoleh manfaat yang berkeadilan.

Salah satu substansi penting dari pemikiran tersebut adalah bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi harus memperhatikan **siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut**.

Dalam konteks masyarakat desa, pendekatan ini berarti bahwa sumber daya lokal perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga masyarakat lokal mempunyai kesempatan untuk:

1. mengakses sumber daya;
2. melakukan kegiatan produksi;
3. meningkatkan kapasitas usaha;
4. memperoleh nilai tambah;
5. mengakses pasar;
6. membangun kelembagaan ekonomi;
7. memperoleh manfaat ekonomi secara adil.

Pemikiran Mubyarto sangat relevan dengan kajian ini karena budaya lokal pada dasarnya merupakan **sumber daya yang dimiliki dan hidup di tengah masyarakat**.

Oleh karena itu, apabila budaya dikembangkan untuk tujuan ekonomi, maka nilai tambah yang dihasilkan perlu sedapat mungkin **kembali kepada masyarakat pemilik dan pelaku budaya**, bukan hanya dinikmati oleh pihak eksternal

bappelitbangda

2.5.2 Ekonomi Kerakyatan sebagai Ekonomi yang Berbasis Kekuatan Masyarakat

Dalam perkembangan literatur ekonomi kerakyatan, perlu dibedakan antara ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan.

Ekonomi rakyat dapat merujuk pada berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, seperti pertanian rakyat, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, kerajinan, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga. Sementara ekonomi kerakyatan lebih tepat dipahami sebagai **pendekatan atau sistem yang memberikan ruang dan keberpihakan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat tersebut**. Pembedaan ini juga dibahas dalam literatur yang menguraikan pemikiran ekonomi kerakyatan Indonesia.

Dengan demikian:

Ekonomi rakyat = kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.

sedangkan:

Ekonomi kerakyatan = sistem/pendekatan pembangunan yang memastikan kegiatan ekonomi masyarakat memiliki akses, kapasitas, perlindungan, kesempatan berkembang, dan memperoleh manfaat secara adil.

Pembedaan ini penting bagi kajian Kabupaten Bandung Barat. Sebab, masyarakat KBB sebenarnya telah melakukan berbagai kegiatan ekonomi, baik pertanian, perdagangan, UMKM, kuliner, kerajinan, jasa maupun pariwisata. Persoalannya bukan semata-mata apakah masyarakat telah melakukan kegiatan ekonomi, tetapi sejauh mana potensi ekonomi masyarakat tersebut dapat dikembangkan, memiliki nilai tambah, memperoleh akses pasar, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

2.5.3 Prinsip – Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan pemikiran tersebut dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan dalam kajian ini diterjemahkan ke dalam beberapa prinsip utama.

Tabel 2. 1 Prinsip -Prinsip Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pemahaman Pasal 33 UUD 1945

No	Prinsip	Makna dalam Kajian
1	**Berbasis masyarakat**	Masyarakat menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi
2	**Pemanfaatan sumber daya local**	Pengembangan menggunakan potensi lokal yang tersedia
3	**Kebersamaan**	Mendorong kerja sama antar pelaku ekonomi
4	**Keadilan dan pemerataan**	Manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu
5	**Peningkatan nilai tambah**	Produk lokal tidak berhenti pada bahan mentah

bappelitbangda

No	Prinsip	Makna dalam Kajian
6	**Akses pasar**	Masyarakat memperoleh akses terhadap pasar yang lebih luas
7	**Kemandirian**	Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal
8	**Keberlanjutan**	Kegiatan ekonomi tidak merusak sumber daya dan budaya
9	**Inklusivitas**	Kelompok masyarakat yang lebih luas dapat memperoleh kesempatan
10	**Berorientasi kesejahteraan**	Tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menempatkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan ekonomi sebagai prinsip penyelenggaraan demokrasi ekonomi.

2.5.4 Ekonomi Kerakyatan Berbasis Budaya

Dalam konteks kajian ini, konsep ekonomi kerakyatan kemudian diperluas dengan memasukkan **budaya lokal sebagai salah satu sumber daya pembangunan**. Budaya tidak hanya dipandang sebagai objek pelestarian atau atraksi wisata, tetapi sebagai **modal sosial, pengetahuan, identitas, kreativitas dan sumber diferensiasi produk lokal**. Dengan demikian, hubungan antara budaya dan ekonomi kerakyatan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Hubungan Antar Budaya dan Ekonomi Kerakyatan

Sumber: Hasil Olahan Konsultan (2025), berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017, PP Nomor 87 Tahun 2021, dan UNESCO (2003; 2017).

Siklus tersebut menunjukkan bahwa hubungan budaya dan ekonomi **bukan hubungan satu arah**.

Budaya dapat menghasilkan nilai ekonomi, tetapi manfaat ekonomi yang diterima masyarakat juga dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjaga, meneruskan, dan mengembangkan budaya.

Hal tersebut sejalan dengan kerangka pengembangan yang telah dirumuskan dalam laporan ini, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan budaya sebagai modal pembangunan, bukan semata-mata sebagai objek wisata.

Berdasarkan uraian di atas, konsep ekonomi kerakyatan dalam kajian **"Pengembangan Budaya Lokal yang Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat"** digunakan sebagai **kerangka untuk melihat bagaimana potensi lokal dapat dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat utama**.

bappelitbangda

BAB 3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT



Dalam bab ini akan disajikan Gambaran umum Kabupaten Bandung Barat, termasuk kondisi kebudayaan dan perekonomian masyarakatnya.

3.1 Kondisi Kewilayahan

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan wilayah yang memiliki karakter geografis dan sosial yang beragam, yang membentuk dinamika budaya dan ekonomi masyarakatnya secara khas. Secara administratif, Kabupaten Bandung Barat terdiri atas 16 kecamatan dan 165 desa dengan luas wilayah sekitar 128.343 hektar. Posisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung menjadikan Kabupaten Bandung Barat berada pada zona transisi antara kawasan urban dan perdesaan. Kondisi ini berpengaruh signifikan terhadap pola interaksi sosial, perkembangan ekonomi lokal, serta dinamika budaya masyarakat.

Sebaran luasan wilayah antar kecamatan menunjukkan variasi karakter ruang yang cukup tajam. Kecamatan dengan luasan besar seperti Gununghalu, Cipatat, Rongga, dan Cikalongwetan didominasi oleh kawasan perdesaan dengan basis ekonomi agraris dan aktivitas budaya yang masih kuat berbasis komunitas. Sebaliknya, kecamatan seperti Lembang, Parongpong, Ngamprah, Padalarang, dan Batujajar memiliki karakter yang lebih urban–peri-urban, dengan intensitas aktivitas ekonomi yang lebih tinggi serta keterkaitan erat dengan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Diferensiasi spasial ini menjadi faktor penting dalam memahami variasi bentuk budaya dan potensi ekonomi berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat.

Dari sisi topografi, Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh wilayah perbukitan dan dataran tinggi dengan ketinggian 500–1.000 meter di atas permukaan laut sebagai zona yang paling luas. Kondisi ini tidak hanya membentuk lanskap alam yang khas, tetapi juga memengaruhi pola permukiman, mata pencaharian, serta ekspresi budaya masyarakat. Wilayah dataran tinggi dan perbukitan secara historis mendorong berkembangnya komunitas dengan ikatan sosial yang relatif kuat, tradisi lokal yang bertahan, serta praktik budaya yang terintegrasi dengan aktivitas agraris dan pengelolaan sumber daya alam.

Kondisi hidrologi dan klimatologi Kabupaten Bandung Barat juga berperan dalam membentuk basis ekonomi dan budaya masyarakat. Dominasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum menjadikan wilayah ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap sistem air permukaan, baik untuk pertanian, permukiman, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan perkebunan, sekaligus membentuk kalender aktivitas sosial dan budaya masyarakat yang sering kali berkaitan dengan siklus musim dan panen.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan dominasi sektor agraris, dengan perkebunan, kebun, sawah, serta tegalan dan ladang sebagai penggunaan lahan utama. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur ekonomi masyarakat masih sangat terkait dengan aktivitas berbasis lahan dan sumber daya alam. Dalam konteks budaya, dominasi penggunaan lahan agraris berimplikasi pada kuatnya praktik budaya yang berkaitan dengan pertanian, ritual

bappelitbangda

panen, pengetahuan lokal tentang pengelolaan lahan, serta tradisi kuliner yang berbasis bahan pangan lokal. Dengan demikian, struktur penggunaan lahan menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal.

Dari sisi demografi, Kabupaten Bandung Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa dengan struktur umur yang didominasi oleh penduduk usia produktif. Kondisi ini menunjukkan potensi sumber daya manusia yang besar untuk pengembangan ekonomi kreatif dan aktivitas budaya produktif. Distribusi penduduk yang tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan kawasan perkotaan, menciptakan dinamika ekonomi yang beragam. Di satu sisi, wilayah dengan urbanisasi tinggi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jasa dan pariwisata; di sisi lain, wilayah perdesaan mempertahankan praktik budaya tradisional yang berpotensi dikembangkan sebagai basis ekonomi lokal.

Struktur perekonomian Kabupaten Bandung Barat ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, serta sektor jasa termasuk pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berada pada kisaran menengah namun menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil pascapandemi. Aktivitas pariwisata masih didominasi oleh subsektor akomodasi dan kuliner, yang menandakan bahwa ekonomi pariwisata di Kabupaten Bandung Barat lebih berorientasi pada konsumsi wisata. Sementara itu, kontribusi aktivitas budaya, seni, dan jasa rekreasi masih relatif terbatas, sehingga membuka ruang pengembangan ekonomi berbasis budaya yang lebih terstruktur dan bernilai tambah tinggi.

3.2 Kondisi Kependudukan dan Sosial Masyarakat Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan wilayah dengan karakter kependudukan yang kompleks, ditandai oleh kombinasi antara kawasan perdesaan yang masih kuat dengan wilayah peri-urban yang berkembang pesat sebagai daerah penyangga Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kondisi kependudukan ini menjadi konteks penting dalam memahami dinamika sosial, budaya, serta aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan potensi budaya sebagai sumber penghidupan dan penguatan ekonomi lokal.

Berdasarkan data kependudukan terkini, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.911.661 jiwa, terdiri dari 974.016 jiwa laki-laki dan 937.645 jiwa perempuan. Komposisi ini menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 104, yang mengindikasikan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dari sisi sebaran wilayah, kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan, seperti Lembang, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong, cenderung memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah bagian selatan dan barat yang masih didominasi kawasan perdesaan dan pegunungan, seperti Gununghalu, Rongga, dan Saguling.

bappelitbangda

Struktur umur penduduk Kabupaten Bandung Barat menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun), yang mencapai sekitar 67 persen dari total penduduk. Kondisi ini menandakan adanya potensi bonus demografi yang signifikan, di mana sebagian besar penduduk berada pada usia kerja dan memiliki kapasitas untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Dominasi usia produktif ini menjadi modal sosial dan ekonomi yang penting, khususnya bagi pengembangan ekonomi berbasis komunitas, usaha mikro dan kecil, serta sektor-sektor yang mengandalkan keterlibatan tenaga kerja lokal seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan kegiatan budaya berbasis masyarakat.

Namun demikian, potensi bonus demografi tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 masih berada pada angka 10,49 persen, yang menempatkan wilayah ini sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin relatif tinggi di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,75 persen, yang mencerminkan keterbatasan kesempatan kerja formal serta ketergantungan masyarakat pada sektor informal dan ekonomi berbasis rumah tangga.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun sumber daya manusia tersedia dalam jumlah besar, belum seluruhnya mampu terintegrasi ke dalam sistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks sosial, masyarakat Kabupaten Bandung Barat masih menunjukkan karakter komunal yang relatif kuat, terutama di wilayah perdesaan. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta ikatan sosial berbasis kekerabatan dan adat istiadat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karakter sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga sosial (*social safety net*) dalam menghadapi kerentanan ekonomi, tetapi juga menjadi modal sosial yang potensial untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis budaya dan komunitas. Kekuatan kolektivitas sosial ini tercermin dalam berbagai aktivitas tradisional, ritual adat, dan praktik budaya yang melibatkan partisipasi warga secara luas.

Sebaran penduduk yang tidak merata antara wilayah peri-urban dan perdesaan juga membentuk variasi karakter sosial dan ekonomi masyarakat. Wilayah dengan tekanan urbanisasi tinggi cenderung mengalami pergeseran mata pencaharian dari sektor agraris ke sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sementara itu, wilayah perdesaan dan pegunungan masih mempertahankan pola hidup agraris dan subsisten, dengan ketergantungan pada sumber daya alam dan praktik budaya lokal. Perbedaan karakter ini penting untuk dipahami karena berimplikasi langsung pada jenis dan bentuk aktivitas budaya yang berkembang, serta cara budaya tersebut berinteraksi dengan ekonomi masyarakat.

Dari perspektif pembangunan desa, Kabupaten Bandung Barat terdiri atas 165 desa dengan tingkat kemajuan dan kemandirian yang beragam. Berdasarkan penetapan status kemajuan desa, masih terdapat kesenjangan antara desa-desa yang telah maju dan mandiri dengan desa-desa yang berada pada kategori berkembang dan tertinggal. Desa-desa dengan aksesibilitas tinggi

bappelitbangda

dan kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi umumnya memiliki kapasitas sosial dan ekonomi yang lebih baik, termasuk dalam pengelolaan potensi lokal dan budaya. Sebaliknya, desa-desa yang berada di wilayah perdesaan terpencil sering kali memiliki kekayaan budaya yang tinggi, namun belum didukung oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan akses pasar yang memadai.

Kondisi sosial kependudukan ini membentuk lanskap sosial yang beragam dan dinamis, yang menjadi dasar penting bagi kajian budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Keberadaan populasi usia produktif yang besar, kekuatan modal sosial berbasis komunitas, serta keragaman karakter desa memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis budaya. Namun pada saat yang sama, tantangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah menuntut pendekatan pembangunan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berbasis pada potensi lokal masyarakat.

3.3 Struktur dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat

Struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat menunjukkan karakter yang majemuk dan berlapis, terbentuk dari interaksi antara kondisi kewilayahan, dinamika kependudukan, serta sejarah sosial dan budaya masyarakat setempat. Sebagai wilayah yang berada pada posisi strategis di kawasan Bandung Raya, Kabupaten Bandung Barat mengalami pengaruh ganda: di satu sisi menjadi daerah penyangga aktivitas perkotaan, dan di sisi lain tetap mempertahankan karakter perdesaan dengan basis ekonomi agraris dan berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara agregat didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun demikian, struktur ekonomi makro tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi masyarakat pada tingkat lokal dan desa. Pada level rumah tangga dan komunitas, aktivitas ekonomi masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh sektor informal, usaha mikro dan kecil, serta kegiatan ekonomi berbasis keluarga yang sering kali terintegrasi dengan praktik sosial dan budaya local.

3.3.1 Karakter Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Peri-Urban

Secara spasial, aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dapat dibedakan ke dalam dua karakter utama, yaitu wilayah perdesaan dan wilayah peri-urban. Wilayah perdesaan, khususnya di bagian selatan dan barat kabupaten seperti Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, dan sebagian Cipongkor, masih didominasi oleh aktivitas ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pola ekonomi di wilayah ini cenderung bersifat subsisten hingga semi-komersial, dengan keterlibatan keluarga sebagai unit produksi utama.

Di wilayah perdesaan tersebut, kegiatan ekonomi sering kali berjalan beriringan dengan praktik budaya dan tradisi lokal. Aktivitas bertani, pengolahan hasil bumi, serta kegiatan musiman seperti

bappelitbangda

panen dan ritual adat membentuk satu kesatuan siklus sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun kontribusi ekonomi secara nominal relatif kecil, sektor ini memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Sebaliknya, wilayah peri-urban seperti Lembang, Parongpong, Ngamprah, Padalarang, dan Batujajar menunjukkan struktur ekonomi yang lebih beragam. Kedekatan dengan pusat perkotaan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, jasa, pariwisata, serta industri skala kecil dan menengah. Di wilayah ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor primer, tetapi juga pada kegiatan ekonomi non-agraris seperti usaha kuliner, penginapan, jasa wisata, perdagangan informal, serta ekonomi kreatif berbasis lokal. Perkembangan ekonomi di wilayah peri-urban ini menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas, namun juga memunculkan tantangan berupa persaingan usaha, ketimpangan pendapatan, dan tekanan terhadap keberlanjutan sosial-budaya masyarakat lokal.

3.3.2 Peran UMKM dan Ekonomi Berbasis Rumah Tangga

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung dalam skala kecil dan berbasis rumah tangga, dengan tingkat formalitas yang rendah namun fleksibilitas yang tinggi. UMKM di Kabupaten Bandung Barat tersebar di berbagai sektor, mulai dari pertanian olahan, kerajinan, kuliner, perdagangan lokal, hingga jasa pendukung pariwisata.

Karakteristik UMKM di wilayah ini menunjukkan keterkaitan yang erat dengan sumber daya lokal dan budaya setempat. Banyak usaha kuliner, kerajinan, dan jasa wisata yang berkembang dari pengetahuan tradisional, resep turun-temurun, keterampilan lokal, serta praktik budaya yang diwariskan secara antargenerasi. Dalam konteks ini, ekonomi masyarakat tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, identitas lokal, dan relasi sosial dalam komunitas.

Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain akses permodalan, kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta keterhubungan dengan pasar yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan banyak aktivitas ekonomi masyarakat belum mampu menghasilkan nilai tambah yang optimal, meskipun memiliki basis budaya dan potensi lokal yang kuat.

3.3.3 Pariwisata sebagai Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, khususnya di wilayah utara seperti Lembang, Parongpong, dan Cisarua. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat berada pada kisaran 5–6 persen dalam beberapa tahun terakhir, dengan tren pertumbuhan yang relatif stabil pasca pandemi COVID-19. Meskipun kontribusinya secara agregat tergolong

bappelitbangda

menengah, sektor ini memiliki efek pengganda ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat lokal, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi UMKM.

Dalam praktiknya, aktivitas pariwisata di Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh wisata alam dan wisata konsumtif, seperti kunjungan ke destinasi alam, penginapan, dan kuliner. Sementara itu, potensi pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini tercermin dari masih kecilnya kontribusi subsektor jasa budaya dan rekreasi dibandingkan subsektor akomodasi dan makan minum.

Meskipun demikian, keberadaan pariwisata telah membuka ruang interaksi antara budaya lokal dan aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak usaha kecil yang berkembang di sekitar destinasi wisata, seperti penjualan produk kuliner tradisional, kerajinan lokal, serta jasa pendukung berbasis komunitas. Aktivitas ini menunjukkan adanya hubungan awal antara budaya dan ekonomi, meskipun belum terkelola secara sistematis dan berkelanjutan.

3.3.4 Ketimpangan Ekonomi dan Tantangan Inklusivitas

Struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat juga ditandai oleh adanya ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Wilayah dengan aksesibilitas tinggi dan kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi cenderung menikmati peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan terpencil. Ketimpangan ini tercermin dalam distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan, serta akses terhadap layanan dasar dan peluang usaha.

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Bandung Barat, dengan konsentrasi penduduk miskin yang relatif tinggi di wilayah perdesaan dan desa-desa dengan kapasitas ekonomi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif dan belum secara merata menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, termasuk budaya, menjadi relevan sebagai alternatif pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Budaya, dalam pengertian praktik sosial, pengetahuan lokal, dan identitas komunitas, memiliki potensi untuk menjadi pintu masuk bagi penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini relatif tertinggal dari arus pertumbuhan ekonomi utama.

3.4 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Bandung Barat

Kondisi sosial budaya Kabupaten Bandung Barat mencerminkan keberagaman ekspresi budaya yang tumbuh dari interaksi panjang antara masyarakat dengan lingkungan alam, sejarah lokal, serta sistem nilai yang berkembang secara turun-temurun. Sebagai wilayah yang berada pada pertemuan antara kawasan perdesaan tradisional, kawasan pertanian pegunungan, dan wilayah

bappelitbangda

peri-urban yang berkembang pesat, Kabupaten Bandung Barat memiliki karakter budaya yang dinamis namun tetap mempertahankan akar tradisi yang kuat.

Budaya masyarakat tidak hanya hadir dalam bentuk simbol dan artefak, tetapi juga terwujud dalam berbagai praktik sosial yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi tersebut mencakup warisan budaya tak benda, seni pertunjukan, ritus dan upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, kuliner lokal, hingga berbagai situs dan lanskap budaya yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan.

Keberadaan unsur-unsur budaya tersebut menunjukkan bahwa budaya masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Selain berfungsi sebagai identitas dan perekat sosial, berbagai aset budaya tersebut juga memiliki potensi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata budaya, dan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas.

3.4.1 Warisan Budaya Tak Benda dan Praktik Tradisional

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) merupakan salah satu aset budaya yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. WBTB mencakup berbagai praktik sosial, adat istiadat, pengetahuan lokal, ekspresi budaya, serta ritus yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini.

Berdasarkan pendataan kebudayaan daerah dan inventarisasi budaya masyarakat, Kabupaten Bandung Barat memiliki sejumlah WBTB yang mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam, siklus kehidupan manusia, aktivitas ekonomi tradisional, serta sistem kepercayaan lokal. Tradisi tersebut antara lain Upacara Ngamandian Ucing, Mikul Lodong, Hajat Arwah, Palakiah Palean Raga, Ngamandian Goong Sibesér, Puput Puseur, Pamitan Menambang Batu Coet Cobek dan Ulekan, Raracik Goib, Nyengitan Seuweu Siwi, serta Serepan Patalekan.

Tabel 3. 1 Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Upacara	Tujuan Utama	Proses Inti	Fungsi Sosial & Budaya	Makna Filosofis
1	Ngamandian Ucing	Memohon hujan saat kemarau	Kucing dimandikan & diarak keliling kampung	Gotong royong, interaksi warga	Harmoni manusia–alam–spiritual
2	Mikul Lodong	Simbol pengelolaan air	Memikul lodong berisi air secara beriringan	Solidaritas, peran perempuan, edukasi budaya	Air sebagai sumber kehidupan & tanggung jawab bersama
3	Hajat Arwah	Menghormati leluhur	Doa, zikir, sesaji	Mempererat keluarga & komunitas	Keterhubungan dunia hidup & arwah

bappelitbangda

No	Nama Upacara	Tujuan Utama	Proses Inti	Fungsi Sosial & Budaya	Makna Filosofis
4	Palakiah Palean Raga	Penyucian & perlindungan diri	Penyiraman, ramuan, doa	Pengobatan tradisional, solidaritas	Keseimbangan jasmani–rohani
5	Ngamandian Goong Sibeser	Penyucian benda pusaka	Pembersihan gong dengan ritual	Pelestarian budaya & identitas	Sakralitas benda & energi spiritual
6	Puput Puseur	Syukuran lepas tali pusat bayi	Doa, sesaji, pemberian berkah	Pengenalan bayi ke masyarakat	Awal kehidupan & perlindungan spiritual
7	Pamitan Menambang Batu	Izin sebelum eksploitasi alam	Sesaji, doa sebelum menambang	Kontrol sosial & etika lingkungan	Harmoni manusia dengan alam
8	Raracik Goib	Mengelola kekuatan gaib	Peracikan ramuan + mantra	Penyembuhan & perlindungan	Dunia nyata & gaib saling terhubung
9	Nyengitan Seuweu Siwi	Penanda pertumbuhan anak	Ritual simbolik pada anak	Pengakuan sosial & kekeluargaan	Perlindungan & fase perkembangan
10	Serepan Patalekan	Musyawarah adat	Doa + diskusi bersama	Demokrasi tradisional & kohesi sosial	Integrasi rasional & spiritual

Sumber: Tismara, 2022

Keberadaan WBTB tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat masih memiliki sistem budaya yang hidup (living heritage) dan diwariskan lintas generasi. Kondisi ini menjadi modal budaya yang penting dalam pembangunan daerah.

3.4.2 Seni Pertunjukan dan Ekspresi Kreatif Komunitas

Seni pertunjukan merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang masih berkembang di Kabupaten Bandung Barat. Berbagai kelompok seni tradisional dan komunitas budaya masih aktif menyelenggarakan pertunjukan pada kegiatan adat, perayaan desa, maupun acara kemasyarakatan. Sebagian besar seni pertunjukan memiliki keterkaitan yang erat dengan ritus dan upacara adat. Upacara Mikul Lodong, Ngamandian Ucing, dan Ngamandian Goong Sibesér misalnya, tidak hanya memiliki fungsi ritual tetapi juga memuat unsur seni berupa musik tradisional, arak-arakan budaya, nyanyian rakyat, dan pertunjukan komunal.

Keberadaan kelompok seni tradisional, sanggar budaya, dan komunitas kreatif menunjukkan bahwa seni tidak hanya diposisikan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai ruang ekspresi sosial yang terus berkembang. Di wilayah peri-urban, seni pertunjukan mulai mengalami proses adaptasi, baik dari sisi bentuk, media, maupun audiens, seiring dengan meningkatnya interaksi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun demikian, sebagian besar aktivitas seni

bappelitbangda

masih berorientasi pada fungsi sosial dan budaya, belum sepenuhnya diarahkan sebagai aktivitas ekonomi yang terstruktur.

Data potensi kebudayaan daerah mencatat keberadaan berbagai kelompok seni yang tersebar di sejumlah kecamatan, dengan konsentrasi relatif tinggi di wilayah yang memiliki aksesibilitas dan aktivitas sosial yang dinamis. Keberadaan kelompok-kelompok ini menunjukkan kapasitas sosial masyarakat dalam mengorganisasi kegiatan budaya secara mandiri, yang merupakan modal penting bagi pengembangan budaya di masa mendatang.

Di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cipongkor, Cililin, dan Padalarang masih ditemukan kelompok seni rakyat yang berperan sebagai penjaga tradisi lokal. Keberadaan sanggar budaya dan komunitas seni tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Desa-desa dengan aktivitas seni tradisi yang relatif menonjol tersebar di berbagai kecamatan, antara lain:

- Kecamatan Lembang (Desa Cibodas, Suntenjaya, Pagerwangi, Wangunsari),
- Kecamatan Parongpong (Desa Cihideung, Karyawangi, Cigugurgirang),
- Kecamatan Cipongkor dan Cililin, yang memiliki kelompok seni rakyat berbasis komunitas desa,
- Kecamatan Padalarang, khususnya di desa-desa dengan tradisi agraris dan ritus panen.

Seni tradisi di Kabupaten Bandung Barat umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan ritus adat, perayaan desa, dan kegiatan sosial masyarakat.

Tabel 3. 2 Seni Pertunjukan

Jenis Budaya	Kecamatan	Keterangan dalam PPKD	Potensi Ekonomi
Karawitan, Degung	Hampir seluruh kecamatan	Genre seni dominan	Jasa pertunjukan, event budaya, pendidikan seni
Calung, Sisingaan	Cisarua, Lembang, Parongpong	Aktif dalam kegiatan publik	Atraksi wisata dan event
Kuda Lumping	Cililin, Cihampelas	Komunitas seni aktif	Ekonomi kreatif & hiburan rakyat
Seni Rupa (galeri, patung)	Parongpong (KBP)	Bale Seni Barli, NuArt Sculpture Park	Wisata seni, UMKM kreatif

Sumber: PPKD, 2023

Seni merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang paling siap dikapitalisasi secara ekonomi, karena sudah memiliki pelaku, pasar terbatas, dan bentuk jasa yang jelas.

bappelitbangda

3.4.3 Budaya Kuliner dan Pengetahuan Lokal Pangan

Budaya kuliner merupakan salah satu unsur budaya yang paling dekat dengan kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Kuliner tradisional berkembang dari pengetahuan lokal tentang bahan pangan, teknik pengolahan, serta preferensi rasa yang terbentuk secara historis. Di wilayah perdesaan, kuliner tradisional umumnya berkaitan dengan hasil pertanian lokal dan praktik konsumsi rumah tangga, sementara di wilayah peri-urban kuliner mulai berkembang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Berbagai jenis makanan khas lokal tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan media interaksi sosial. Pada sejumlah upacara adat seperti Puput Puseur, Hajat Arwah, Nyengitan Seuweu Siwi, dan Serepan Patalekan, penyediaan makanan tradisional menjadi bagian penting dari pelaksanaan ritual. Tradisi berbagi makanan tersebut mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat.

Praktik memasak dan konsumsi makanan sering kali terkait dengan peristiwa sosial dan budaya, seperti perayaan adat, kegiatan keagamaan, dan pertemuan komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kuliner memiliki posisi strategis dalam sistem budaya masyarakat, sekaligus menyimpan potensi ekonomi yang relatif mudah diakses oleh masyarakat lokal.

Pendataan kebudayaan menunjukkan bahwa sebagian besar potensi kuliner tradisional masih dikelola dalam skala rumah tangga dan usaha kecil, dengan tingkat inovasi dan pengemasan yang beragam. Hal ini menggambarkan keterkaitan erat antara budaya kuliner dan ekonomi masyarakat, meskipun pada tahap ini masih diposisikan sebagai bagian dari gambaran sosial budaya, belum sebagai analisis ekonomi.

Selain berperan dalam kehidupan budaya, kuliner tradisional memiliki potensi ekonomi yang cukup besar karena relatif mudah dikembangkan melalui usaha rumah tangga, UMKM, dan sektor pariwisata. Kuliner tradisional tersebar hampir di seluruh kecamatan, dengan konsentrasi tinggi di:

- Lembang, Parongpong, dan Cisarua, seiring dengan aktivitas pariwisata,
- wilayah agraris seperti Cipatat, Cipeundeuy, dan Sindangkerta.

3.4.4 Situs, Cagar Budaya, dan Lanskap Budaya

Selain budaya tak benda, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki sejumlah peninggalan budaya bendawi berupa situs dan cagar budaya. Situs-situs ini mencerminkan sejarah panjang pemukiman, aktivitas keagamaan, serta perkembangan sosial masyarakat di masa lalu. Keberadaan situs dan cagar budaya tidak hanya memiliki nilai sejarah dan edukatif, tetapi juga membentuk lanskap budaya yang berkontribusi terhadap identitas wilayah.

Berdasarkan Buku Profil Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, cagar budaya di Kabupaten Bandung Barat tersebar di beberapa kecamatan dengan karakteristik yang beragam, mulai dari

bappelitbangda

bangunan bersejarah, situs arkeologis, hingga kawasan dengan nilai budaya tertentu. Namun demikian, sebagian besar situs tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan integrasi dengan kehidupan sosial masyarakat saat ini.

Hubungan antara budaya dan ruang tersebut membentuk lanskap budaya yang unik dan berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya berbasis komunitas.

Keberadaan cagar budaya dan lanskap budaya ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki aset budaya yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki potensi untuk dikaitkan dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas, apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat.

Tabel 3. 3 Cagar Budaya dan Warisan Sejarah

Cagar Budaya	Kecamatan	Status dalam PPKD	Potensi Ekonomi
Observatorium Bosscha	Lembang	Cagar Budaya Nasional	Wisata edukasi & jasa pendukung
Guha Pawon	Cipatat	Proses penetapan Provinsi	Geowisata & wisata edukasi
Situs kolonial & benteng tua	Cililin, Padalarang	Banyak ODCB	Wisata sejarah skala lokal
Stasiun Padalarang & industri lama	Padalarang	Warisan industri	Wisata heritage & kreatif

Sumber: PPKD, 2023

3.4.5 Ritus dan Upacara Adat

Ritus dan upacara adat merupakan bentuk ekspresi budaya yang paling dominan di Kabupaten Bandung Barat, terutama di wilayah perdesaan. Ritus ini berkaitan erat dengan sistem kepercayaan lokal, siklus pertanian, serta penghormatan terhadap leluhur dan tokoh adat. Sebagian besar ritus masih dijalankan secara rutin oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai dan kepercayaan lokal.

Berdasarkan karakteristiknya, ritus adat yang berkembang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok utama, seperti ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 4 Klasifikasi Ritus dan Upacara Adat Kabupaten Bandung Barat

Kelompok	Tradisi
Siklus Alam	Ngamandian Ucing, Mikul Lodong
Siklus Kehidupan	Puput Puseur, Nyengitan Seuweu Siwi
Siklus Spiritual	Hajat Arwah, Palakiah Palean Raga, Raracik Goib
Siklus Produksi dan Sosial	Pamitan Menambang Batu, Serepan Patalekan, Ngamandian Goong Sibesér

Sumber: PPKD Kabupaten Bandung Barat dan Data Kebudayaan terkait; klasifikasi dan analisis oleh Tim Penyusun, 2025.

bappelitbangda

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa ritus adat tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan, sumber daya alam, kehidupan sosial, dan proses produksi tradisional

Ritus yang berkembang mencakup ritual pertanian, syukuran hasil bumi, upacara adat desa, hingga ritual keagamaan lokal. Sebagian besar ritus ini masih dijalankan secara rutin, meskipun dalam skala komunitas dan belum terlembagakan secara formal. Ritus-ritus ini masih lestari, namun belum dikemas sebagai kegiatan ekonomi. Potensinya kuat untuk ekonomi komunitas skala kecil, bukan pariwisata massal.

Beberapa ritus berada di hampir seluruh kecamatan seperti hajat arwah/nyekar, namun beberapa hanya ada di kecamatan utama. Tabel berikut menunjukkan beberapa ritus dan upacara adat serta pontensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan.

Tabel 3. 5 Ritus dan Upacara Adat (WBTB dan Tradisi Lokal)

Jenis Budaya	Kecamatan Utama	Keterangan dalam PPKD	Potensi Ekonomi yang Realistis
Rahengan (WBTB Nasional)	Gununghalu, Cipongkor	Masih hidup sebagai ritus komunitas	Wisata budaya berbasis kalender adat, UMKM kuliner & jasa lokal
Ngamandian Ucing (WBTB Nasional)	Cipeundeuy	Tradisi unik, dikenal luas	Event budaya tematik, ekonomi kreatif berbasis narasi lokal
Mikul Lodong (WBTB Nasional)	Cililin	Tradisi agraris	Eduwisata pertanian–budaya
Hajat Arwah / Nyekar	Hampir seluruh kecamatan	Ritus massal menjelang Ramadan	UMKM musiman (kuliner, jasa, produk ritual)
Palakiah Palean Raga (WBTB Nasional)	Wilayah perdesaan	Tradisi permainan & ritual	Atraksi budaya dan festival desa

Sumber: PPKD, 2023

3.4.6 Tradisi Lisan

Tradisi lisan merupakan salah satu bentuk warisan budaya tak benda yang berfungsi sebagai media pewarisan pengetahuan, nilai sosial, norma adat, serta sejarah lokal masyarakat. Tradisi lisan berkembang melalui proses komunikasi antar generasi dan diwariskan secara informal melalui keluarga, tokoh adat, sesepuh kampung, maupun kegiatan-kegiatan adat yang masih berlangsung hingga saat ini. Dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), tradisi lisan mencakup cerita rakyat, mitos asal-usul desa, petuah adat, dan ungkapan lokal serta keberlanjutannya sangat bergantung pada regenerasi sosial di tingkat desa.

bappelitbangda

Tradisi lisan banyak ditemukan di desa-desa yang masih memiliki struktur adat dan komunitas lokal yang kuat, antara lain:

- desa-desa di Kecamatan Gununghalu, Rongga, dan Sindangkerta,
- sebagian desa di Cipongkor dan Cikalongwetan,
- desa-desa tua dengan sejarah panjang di Lembang dan Parongpong.

Di Kabupaten Bandung Barat, tradisi lisan masih ditemukan terutama pada wilayah yang memiliki struktur sosial dan adat yang relatif kuat, seperti Kecamatan Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, Cipongkor, dan sebagian wilayah Cikalongwetan. Bentuk tradisi lisan yang berkembang meliputi cerita rakyat, legenda asal-usul kampung, petuah adat, mantra, doa tradisional, ungkapan lokal, hingga pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan ritual adat.

Keberadaan tradisi lisan dapat ditemukan pada berbagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang masih hidup di masyarakat. Hajat Arwah misalnya, memuat doa-doa dan narasi penghormatan kepada leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Raracik Goib mengandung mantra dan pengetahuan spiritual yang diwariskan melalui jalur informal. Sementara Serepan Patalekan menjadi ruang penyampaian petuah adat dan musyawarah tradisional yang memperkuat sistem nilai masyarakat.

Tabel 3. 6 Tradisi Lisan yang Berkaitan dengan WBTB Kabupaten Bandung Barat

WBTB	Bentuk Tradisi Lisan
Hajat Arwah	Doa leluhur dan narasi keluarga
Raracik Goib	Mantra dan pengetahuan spiritual
Palakiah Palean Raga	Doa perlindungan dan penyembuhan
Serepan Patalekan	Petuah adat dan musyawarah
Ngamandian Ucing	Doa dan ungkapan permohonan hujan
Mikul Lodong	Narasi pelestarian sumber air

Sumber: Tismara, 2022

Tradisi lisan memiliki peran penting sebagai media transfer pengetahuan budaya. Namun demikian, sebagian besar tradisi tersebut belum terdokumentasikan secara sistematis sehingga rentan mengalami penurunan akibat perubahan sosial dan berkurangnya regenerasi pelaku budaya.

3.4.7 Pengetahuan dan Teknologi Tradisional

Pengetahuan dan teknologi tradisional merupakan hasil pengalaman panjang masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Pengetahuan tersebut berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem kehidupan masyarakat lokal.

Di Kabupaten Bandung Barat, pengetahuan tradisional banyak ditemukan pada sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, pemanfaatan bahan alam, pengobatan tradisional, serta tata cara

bappelitbangda

pengelolaan lingkungan. Sebagian besar praktik tersebut masih bertahan terutama di wilayah perdesaan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya lokal.

Upacara Mikul Lodong mencerminkan pengetahuan lokal mengenai pentingnya konservasi sumber air dan pengelolaan air bagi kehidupan masyarakat. Pamitan Menambang Batu Coet, Cobek, dan Ulekan menunjukkan adanya sistem etika pemanfaatan sumber daya alam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Sementara itu, Palakiah Palean Raga dan Raracik Goib mengandung unsur pengetahuan pengobatan dan perlindungan tradisional yang berkembang dalam sistem budaya masyarakat.

Tabel 3. 7 Pengetahuan Tradisional dalam WBTB Kabupaten Bandung Barat

WBTB	Bentuk Tradisi Lisan
Tradisi	Bentuk Pengetahuan Lokal
Mikul Lodong	Pengelolaan air dan konservasi sumber mata air
Ngamandian Ucing	Adaptasi masyarakat terhadap musim kemarau
Pamitan Menambang Batu	Etika pemanfaatan sumber daya alam
Raracik Goib	Ramuan dan praktik penyembuhan tradisional
Palakiah Palean Raga	Pengetahuan kesehatan tradisional
Ngamandian Goong Sibesér	Pelestarian benda pusaka dan kesenian

Sumber: PPKD Kabupaten Bandung Barat dan Data Kebudayaan terkait; klasifikasi dan analisis oleh Tim Penyusun, 2025.

Keberadaan pengetahuan tradisional tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat memiliki modal budaya yang tidak hanya bernilai historis, tetapi juga relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya lokal, dan penguatan identitas budaya.

Pengetahuan dan teknologi tradisional mencerminkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Dalam PPKD, unsur ini mencakup sistem pertanian lokal, pengelolaan air, pengobatan tradisional, dan tata ruang kampung.

Pengetahuan tradisional paling kuat ditemukan di:

- Kecamatan Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, dan Cipatat, yang masih didominasi aktivitas agraris,
- desa-desa perdesaan di Cikalongwetan dan Cipongkor.

Praktik-praktik ini umumnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat.

bappelitbangda

Tabel 3. 8 Permainan Tradisional

Jenis Budaya	Kecamatan	Keterangan PPKD	Potensi Ekonomi
Permainan rakyat Sunda (110 jenis)	Cipeundeuy	Dikelola komunitas Sunda Perceka	Eduwisata, festival anak, wisata keluarga
Pencak Silat Tradisional	Hampir seluruh kecamatan	Pembinaan IPSI & PPSI	Event budaya–olahraga, wisata budaya

Sumber: PPKD Kabupaten Bandung Barat dan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD); analisis potensi ekonomi oleh Tim Penyusun, 2025.

Tabel 3. 9 Pengetahuan dan Praktik Tradisional

Jenis Budaya	Kecamatan	Keterangan PPKD	Potensi Ekonomi
Pengetahuan agraris tradisional	Gununghalu, Rongga	Masih dipraktikkan	Eduwisata pertanian, produk lokal
Teknologi tradisional (alat, teknik)	Perdesaan KBB	Banyak, tapi belum terdokumentasi optimal	Produk kerajinan, wisata tematik

Sumber: Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) dan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bandung Barat; diolah dan dianalisis oleh Tim Penyusun, 2025.

3.4.8 Situs Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)

Situs budaya dan ODCB merupakan unsur budaya berwujud yang memiliki nilai sejarah dan simbolik. Dalam PPKD, situs budaya di Kabupaten Bandung Barat antara lain berupa makam tokoh adat, situs karomah, bangunan bersejarah, dan kawasan dengan nilai budaya tertentu.

Situs budaya banyak ditemukan di:

- Kecamatan Gununghalu, Sindangkerta, dan Cipatat,
- wilayah utara seperti Lembang dan Parongpong, yang memiliki peninggalan sejarah dan kawasan wisata budaya.

Keberadaan situs ini sering menjadi pusat kegiatan ritual dan sosial masyarakat, meskipun belum seluruhnya ditetapkan sebagai cagar budaya resmi.

3.4.9 Persebaran Budaya dan Tipologi Desa

Persebaran budaya di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan tipologi desa dan karakter kewilayahan. Desa-desa dengan karakter agraris dan keterpencilan relatif tinggi cenderung memiliki praktik budaya tradisional yang masih kuat dan utuh, terutama dalam bentuk ritus, tradisi lisan, dan pengetahuan lokal. Sebaliknya, desa-desa yang berada di wilayah peri-urban menunjukkan budaya yang lebih adaptif dan dinamis, dengan kombinasi antara tradisi lokal dan pengaruh budaya luar.

bappelitbangda

Berdasarkan klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa, desa-desa dengan status berkembang dan tertinggal sering kali justru memiliki kekayaan budaya yang tinggi, namun belum diimbangi dengan kapasitas kelembagaan dan ekonomi yang memadai. Sebaliknya, desa-desa maju dan mandiri cenderung memiliki kapasitas ekonomi dan akses yang lebih baik, namun menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan praktik budaya tradisional di tengah arus modernisasi.

Tipologi ini menunjukkan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat tidak bersifat homogen, melainkan sangat kontekstual dan bergantung pada karakter desa dan wilayah. Pemahaman terhadap variasi ini menjadi penting sebagai dasar untuk membaca hubungan antara budaya dan ekonomi masyarakat pada bab analisis berikutnya.

bappelitbangda

Tabel 3. 10 Pengelompokkan Budaya berdasarkan Status Desa dalam Kecamatan

Kelompok Kecamatan	Kecamatan	Status Desa Dominan (ID 2025)	Kondisi Ekonomi Masyarakat (RPKD)	Potensi Budaya Dominan (PPKD)	Pemanfaatan Budaya Saat Ini	Dampak Ekonomi Eksisting
A. Wisata–Budaya Mapan	Lembang, Parongpong, Cisarua	Desa Mandiri–Maju	Ekonomi jasa dan pariwisata dominan; UMKM kuliner dan akomodasi berkembang; tingkat kesejahteraan relatif tinggi	Seni pertunjukan, ritus budaya, WBTB, situs budaya	Atraksi wisata budaya, event, sanggar aktif, integrasi dengan pariwisata	Sedang–Tinggi: penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM
B. Budaya Produktif Menengah	Padalarang, Batujajar, Ngamprah	Desa Maju	Wilayah transisi agraris–industri; pendapatan beragam; kantong kemiskinan perkotaan masih ada	Seni tradisi, ritus lokal, tradisi lisan	Festival lokal, komunitas seni, UMKM berbasis rumah tangga	Sedang: tambahan pendapatan lokal, belum terintegrasi
C. Agraris–Budaya Tradisional	Cililin, Cihampelas, Cipongkor	Desa Berkembang	Agraris dominan; ketergantungan sektor primer; kerentanan ekonomi relatif lebih tinggi	Ritus adat, seni tradisi, pengetahuan dan teknologi tradisional	Pemanfaatan komunal dan ritual; minim orientasi pasar	Rendah–Sedang: fungsi sosial kuat, dampak ekonomi terbatas
D. Budaya Konservatif Berbasis Komunitas	Gununghalu, Rongga, Sindangkerta	Desa Berkembang	Aksesibilitas terbatas; ekonomi berbasis subsistensi dan pertanian	Ritus adat, tradisi lisan, pengetahuan lokal	Pemanfaatan internal komunitas; belum dikomersialisasikan	Rendah: nilai ekonomi belum berkembang

bappelitbangda

Kelompok Kecamatan	Kecamatan	Status Desa Dominan (ID 2025)	Kondisi Ekonomi Masyarakat (RPKD)	Potensi Budaya Dominan (PPKD)	Pemanfaatan Budaya Saat Ini	Dampak Ekonomi Eksisting
E. Budaya Potensial Belum Tergarap	Cipatat, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Saguling	Desa Berkembang	Agraris dengan kerentanan musiman; diversifikasi ekonomi terbatas	Ritus budaya, situs/ODCB, seni lokal	Sporadis; belum menjadi produk ekonomi terstruktur	Rendah: potensi besar, belum teraktivasi

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

bappelitbangda

BAB 4 BUDAYA DAN PENINGKATAN EKONOMI



4.1 Identifikasi Potensi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

4.1.1 Kerangka Identifikasi Potensi Ekonomi

Identifikasi potensi ekonomi Kabupaten Bandung Barat dalam kajian ini tidak hanya dimaknai sebagai identifikasi sektor yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi juga sebagai upaya untuk melihat **sejauh mana sumber daya lokal dapat menjadi basis kegiatan ekonomi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, membuka akses pasar, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat**.

Pendekatan tersebut menggunakan definisi operasional ekonomi kerakyatan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, yaitu pendekatan pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal, pengembangan usaha dan nilai tambah, serta penerimaan manfaat ekonomi secara berkeadilan dengan memperhatikan kebersamaan, kemandirian, pemerataan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, identifikasi potensi ekonomi Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui lima dimensi utama, yaitu:

1. **basis sumber daya lokal**, yaitu ketersediaan sumber daya alam, manusia, budaya, dan kreativitas;
2. **basis kegiatan ekonomi**, yaitu sektor atau komoditas yang telah berkembang dan memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah;
3. **kemampuan menghasilkan nilai tambah**, yaitu peluang untuk mengolah sumber daya menjadi produk atau jasa dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi;
4. **akses pasar dan keterhubungan antarsektor**, yaitu kemampuan produk dan jasa untuk menjangkau pasar lokal, regional, wisatawan, maupun pasar yang lebih luas; dan
5. **sebaran manfaat ekonomi**, yaitu peluang keterlibatan masyarakat lokal, UMKM, kelompok usaha, komunitas, pemuda, perempuan, BUMDes, dan kelembagaan masyarakat lainnya.

Kerangka tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Sumber daya lokal → produk/jasa → nilai tambah → pasar → pendapatan masyarakat → kesejahteraan → keberlanjutan sumber daya lokal.

Dalam konteks kajian ini, **budaya lokal ditempatkan sebagai salah satu sumber daya lokal yang dapat memperkuat diferensiasi, identitas, kreativitas, dan nilai tambah ekonomi**, bukan sebagai satu-satunya sektor ekonomi yang harus dikomersialkan. Hal ini penting karena tidak seluruh unsur budaya memiliki karakter yang sama untuk dikembangkan menjadi kegiatan

bappelitbangda

ekonomi. Laporan kajian budaya yang ada juga menegaskan bahwa sebagian budaya yang memiliki nilai sakral lebih tepat diarahkan pada dokumentasi, pelestarian, regenerasi, dan edukasi terbatas, bukan komersialisasi langsung

4.1.2 Struktur dan Basis Perekonomian Kabupaten Bandung Barat

Gambaran awal potensi ekonomi Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat melalui struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan **Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2025**, nilai PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai **Rp61.236,34 miliar**. Struktur ekonomi menunjukkan dominasi sektor industri pengolahan, diikuti pertanian, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel 4. 1 Struktur Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Kelompok Ekonomi	Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB 2024 (%)	Posisi dalam Ekonomi Daerah
Primer	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**12,63**	Basis sumber daya alam dan ekonomi masyarakat
	Pertambangan dan Penggalian	**0,94**	Kegiatan berbasis sumber daya alam
Sekunder	Industri Pengolahan	**40,85**	Penggerak utama ekonomi daerah
	Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	Pendukung kegiatan ekonomi
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	Pendukung ekonomi dan lingkungan
	Konstruksi	**6,92**	Pendukung pembangunan dan investasi
Tersier	Perdagangan Besar dan Eceran	**12,38**	Distribusi dan pemasaran produk
	Transportasi dan Pergudangan	**6,20**	Konektivitas dan distribusi
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**5,23**	Pariwisata, kuliner dan jasa
	Informasi dan Komunikasi	2,06	Pendukung ekonomi digital
	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,00	Pendukung pembiayaan

bappelitbangda

Kelompok Ekonomi	Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB 2024 (%)	Posisi dalam Ekonomi Daerah
	Real Estat	1,98	Pendukung aktivitas wilayah
	Jasa Perusahaan	0,53	Jasa pendukung usaha
	Administrasi Pemerintahan	2,14	Pelayanan publik
	Jasa Pendidikan	4,45	Pengembangan SDM
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	Pelayanan sosial
	Jasa Lainnya	1,16	Aktivitas jasa lainnya
Total	**PDRB**	**100,00**	—

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2025

Jika dikelompokkan secara makro, struktur tersebut menunjukkan bahwa:

- sektor primer sekitar 13,57%;
- sektor sekunder sekitar 48,66%; dan
- sektor tersier sekitar 37,77%.

Dengan demikian, perekonomian Kabupaten Bandung Barat memiliki karakter **industri dan jasa yang kuat, tetapi tetap ditopang oleh basis pertanian dan sumber daya lokal**. Hal ini menjadi penting dalam perspektif ekonomi kerakyatan. Potensi ekonomi masyarakat tidak hanya berada pada kegiatan pertanian primer, tetapi juga terdapat pada **pengolahan, perdagangan, transportasi, kuliner, pariwisata, ekonomi kreatif, serta berbagai jasa yang menghubungkan produk lokal dengan pasar**.

4.1.3 Potensi Ekonomi Sektor Primer: Sumber Daya Lokal sebagai Basis Ekonomi Masyarakat

Sektor primer merupakan salah satu fondasi penting ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat karena secara langsung berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya lokal.

Hasil kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki potensi yang kuat, khususnya pada subsektor **hortikultura, tanaman hias, perkebunan, peternakan, dan perikanan**. Analisis tersebut menggunakan LQ, Shift Share dan Dynamic Location Quotient (DLQ) untuk mengidentifikasi basis, pertumbuhan, daya saing, serta keberlanjutan komoditas.

bappelitbangda

Beberapa komoditas yang menunjukkan posisi basis antara lain kembang kol, tomat, labu siam, paprika, terong, cabai, berbagai buah-buahan, tanaman hias, kopi Arabica, serta sejumlah komoditas peternakan.

Tabel 4. 2 Potensi Ekonomi Sektor Primer Kabupaten Bandung Barat

Sub-Sektor	Potensi Utama	Bukti Analisis	Peluang Nilai Tambah	Keterkaitan dengan Ekonomi Kerakyatan
Hortikultura	Kembang kol, tomat, labu siam, cabai, paprika, terong	LQ > 1 pada sejumlah komoditas; beberapa menunjukkan pertumbuhan dan daya saing	Sortasi, pengemasan, pengolahan pangan, branding	Melibatkan petani, kelompok tani, UMKM
Tanaman hias	Mawar dan berbagai tanaman hias	Mawar memiliki LQ 42,60 dan DLQ 1,01	Florikultura, dekorasi, agrowisata, pemasaran digital	Rumah tangga usaha dan pelaku hortikultura
Perkebunan	Kopi Arabica, cengkeh, karet	Kopi Arabica LQ 3,54 dan DLQ sekitar 1,00; cengkeh LQ 1,64	Roasting, pengemasan, branding, wisata kopi	Petani, kelompok tani, UMKM pengolahan
Peternakan	Sapi, ayam kampung, telur	Sejumlah komoditas memiliki LQ > 1	Produk pangan olahan	Rumah tangga dan usaha peternakan
Perikanan	Nila, ikan mas, patin	Sejumlah komoditas memiliki LQ > 1	Pengolahan hasil perikanan dan kuliner	Pembudidaya, pengolah dan pedagang

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2024

Dalam konteks kajian budaya lokal, sektor primer mempunyai arti lebih luas daripada sekadar produksi komoditas. **Pengetahuan lokal mengenai pertanian, pengolahan pangan, kuliner tradisional, teknik budidaya, serta hubungan masyarakat dengan lanskap merupakan bagian dari modal budaya yang dapat memperkuat identitas produk.**

Dengan demikian, hubungan budaya dengan sektor primer terutama diarahkan pada **peningkatan nilai tambah**, bukan sekadar peningkatan volume produksi. Contohnya, komoditas pertanian dapat dikembangkan melalui:

komoditas lokal → produk olahan → identitas/narasi lokal → kemasan → pasar wisata/digital → peningkatan nilai tambah.

4.1.4 Potensi Ekonomi Sektor Sekunder: Pengolahan dan Penciptaan Nilai Tambah

Sektor sekunder memiliki posisi sangat penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2024, **industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 40,85% terhadap PDRB**, sehingga menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian daerah. (Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2025)

Kajian PUD juga menunjukkan bahwa industri pengolahan Kabupaten Bandung Barat termasuk **sektor basis**, dengan LQ sebesar **1,06** dan DLQ **1,13**, serta hasil Shift Share yang menunjukkan pertumbuhan dan daya saing positif.

Potensi tersebut mencakup industri besar maupun kegiatan industri skala UMKM. Data PUD menunjukkan keberadaan UMKM pada berbagai kelompok industri, antara lain industri makanan, tekstil, pakaian jadi, furnitur, barang logam, kerajinan, serta produk berbasis kayu dan bambu

Tabel 4. 3 Potensi Ekonomi Sektor Sekunder

Kelompok	Potensi	Sebaran/Indikasi	Hubungan dengan Ekonomi Kerakyatan
Industri makanan dan minuman	Produk pangan olahan dan makanan khas lokal	Ngamprah, Padalarang, Cililin, Cihampelas, Batujajar, Lembang, Cisarua	Pengolahan sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah
Industri tekstil dan pakaian jadi	Tekstil, konveksi, pakaian jadi	Tersebar, dengan konsentrasi UMKM antara lain di Ngamprah	Penyerapan tenaga kerja dan usaha masyarakat
Furnitur dan kerajinan	Kayu, bambu, rotan dan produk turunannya	Berbagai kecamatan; Cililin tercatat sebagai salah satu konsentrasi	Potensi ekonomi kreatif dan kerajinan
Industri kulit/alas kaki	Tas, sepatu, sandal dan produk kulit	Berbagai kecamatan, dengan konsentrasi di Ngamprah	Produk kreatif dan usaha skala kecil
Produk berbasis budaya	Kerajinan, kuliner, produk kreatif	Bergantung pada karakter wilayah	Memperkuat identitas dan diferensiasi produk

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024; hasil sintesis dan pengolahan Tim Penyusun, 2025.

Kajian PUD secara khusus mengidentifikasi **industri tekstil dan pakaian jadi** serta **industri olahan makanan dan minuman** sebagai bagian dari sektor pengembangan produk unggulan daerah. Bahkan untuk industri tekstil dan pakaian jadi, Ngamprah diidentifikasi sebagai salah satu kawasan binaan karena konsentrasi pelaku UMKM yang relatif tinggi. Dalam perspektif kajian ini, sektor industri pengolahan merupakan **jembatan utama antara sumber daya lokal dengan peningkatan nilai tambah.**

bappelitbangda

4.1.5 Potensi Ekonomi Sektor Tersier: Pasar, Pariwisata dan Jasa

Sektor tersier merupakan penghubung antara produksi masyarakat dengan konsumen dan pasar. Dalam konteks ekonomi kerakyatan berbasis budaya, sektor ini sangat strategis karena menjadi tempat terjadinya **distribusi, pemasaran, pengalaman wisata, konsumsi produk lokal, serta interaksi antara masyarakat dengan pasar**.

Berdasarkan BPS, pada tahun 2024 kontribusi perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat mencapai **12,38%**, transportasi dan pergudangan **6,20%**, serta penyediaan akomodasi dan makan minum **5,23%**. Selain kontribusi ekonominya, beberapa sektor jasa juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi. Pada 2024, pertumbuhan transportasi dan pergudangan tercatat **9,80%**, penyediaan akomodasi dan makan minum **6,48%**, informasi dan komunikasi **8,71%**, serta real estat **8,16%. Kajian PUD menunjukkan bahwa jasa penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki LQ 1,81 dan DLQ 1,29, sehingga termasuk sektor basis dan memiliki indikasi keberlanjutan. Analisis Shift Share juga menunjukkan sektor tersebut tumbuh dan berdaya saing.**

Tabel 4. 4 Potensi Ekonomi Sektor Tersier

Sub-Sektor	Potensi	Fungsi dalam Rantai Nilai	Keterkaitan Budaya
Perdagangan	Pasar produk lokal	Menghubungkan produsen dan konsumen	Display dan pemasaran produk lokal
Transportasi	Mobilitas orang dan barang	Mendukung akses pasar dan wisata	Mendukung konektivitas destinasi budaya
Akomodasi	Hotel, homestay, penginapan	Menangkap belanja wisatawan	Produk budaya dapat menjadi bagian pengalaman wisata
Makan dan minum	Restoran, rumah makan, kuliner	Mengubah bahan lokal menjadi pengalaman konsumsi	Kuliner tradisional dan pangan lokal
Pariwisata	Wisata alam, budaya, edukasi, agrowisata	Mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi	Budaya menjadi atraksi/narasi/identitas
Informasi dan komunikasi	Platform digital dan promosi	Memperluas akses pasar	Digitalisasi cerita dan produk budaya

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024; Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2025; hasil sintesis dan pengolahan Tim Penyusun, 2025.

Produk Unggulan Daerah juga menunjukkan bahwa kegiatan akomodasi dan makan-minum terkonsentrasi antara lain di **Lembang, Parongpong, Padalarang dan Ngamprah**, dengan

Lembang memiliki jumlah hotel yang sangat besar dibandingkan kecamatan lainnya. Dengan demikian, sektor tersier dapat berfungsi sebagai **mesin penghubung** antara budaya, produk lokal dan pasar.

4.1.6 Profil Spasial Potensi Ekonomi

Identifikasi potensi ekonomi tidak cukup dilakukan secara sektoral. Hasil Kajian PUD menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan **spesialisasi ekonomi menurut karakter wilayah**. Hasil tersebut dapat disintesiskan menjadi beberapa kawasan ekonomi potensial sebagai berikut.

Tabel 4. 5 Profil Spasial Potensi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

Klaster Wilayah	Kecamatan	Potensi Ekonomi Dominan	Rantai Nilai yang Dikembangkan	Keterkaitan Budaya
Kawasan Utara	Cisarua – Lembang – Parongpong	Hortikultura, tanaman hias, agrowisata, akomodasi dan kuliner	Produksi → pengolahan → agrowisata → kuliner → pasar wisata	Lanskap, kuliner, pengetahuan pertanian
Kawasan Selatan	Gunung Halu – Sindangkerta – Cililin	Kopi dan kegiatan pertanian/perkebunan	Budidaya → pengolahan → branding → wisata kopi	Pengetahuan lokal, tradisi agraris
Kawasan Tengah	Ngamprah – Padalarang – Cililin – Cihampelas – Batujajar	Industri makanan/minuman dan perdagangan	Produksi → pengolahan → distribusi → pasar	Produk pangan khas dan identitas lokal
Kawasan Industri Kreatif	Ngamprah dan kecamatan sekitarnya	Tekstil, pakaian jadi, furnitur, kerajinan	Produksi → desain → branding → pasar	Motif, kerajinan, kreativitas
Koridor Pariwisata/Jasa	Lembang – Parongpong – Padalarang – Ngamprah	Akomodasi, makan-minum, wisata	Atraksi → transportasi → akomodasi → kuliner → belanja	Atraksi budaya, kuliner, event

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024; Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2025; hasil sintesis dan pengolahan Tim Penyusun, 2025.

Profil tersebut mengacu pada pemetaan kawasan binaan PUD yang mengidentifikasi wilayah utara untuk hortikultura dan tanaman hias, wilayah selatan untuk kopi, wilayah tengah untuk

bappelitbangda

industri tekstil serta makanan-minuman, dan wilayah utara-tengah untuk jasa akomodasi dan makan-minum. Dengan demikian, **pengembangan ekonomi berbasis budaya sebaiknya tidak menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh Kabupaten Bandung Barat**. Pendekatan perlu mengikuti karakter ekonomi dan sumber daya masing-masing wilayah.

4.1.7 Sintesis Potensi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan hasil identifikasi sektoral dan spasial di atas, potensi ekonomi Kabupaten Bandung Barat selanjutnya dianalisis menggunakan enam unsur utama ekonomi kerakyatan, yaitu **masyarakat, sumber daya lokal, nilai tambah, pasar, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan**.

Tabel 4. 6 Sintesis Potensi Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan

Potensi	Sumber Daya Lokal	Produk/Jasa	Nilai Tambah	Pasar	Pelaku Masyarakat	Potensi Keterkaitan Budaya
Hortikultura	Lahan, iklim, pengetahuan tani	Sayuran, buah	Pengolahan, kemasan, branding	Lokal, regional, wisata	Petani, kelompok tani, UMKM	Pengetahuan agraris dan kuliner
Tanaman hias	Lahan dan keahlian budidaya	Mawar dan tanaman hias	Florikultura, dekorasi, agrowisata	Regional, nasional, wisata	Petani dan usaha rumah tangga	Pengetahuan lokal dan lanskap
Kopi	Perkebunan dan pengetahuan lokal	Kopi Arabica	Roasting, packaging, coffee experience	Lokal, nasional, wisata	Petani, kelompok usaha, UMKM	Tradisi agraris dan narasi wilayah
Pangan olahan	Bahan baku lokal	Makanan/minuman	Pengolahan, kemasan, merek	Pasar lokal, wisata, digital	UMKM, rumah tangga	Kuliner dan identitas lokal
Tekstil/pakaian	Keterampilan produksi	Pakaian dan tekstil	Desain, motif, branding	Regional/nasional	UMKM dan tenaga kerja	Motif, kerajinan dan kreativitas
Kerajinan	Kayu, bambu, bahan lokal	Furnitur/kerajinan	Desain, finishing, branding	Lokal, wisata, digital	Pengrajin dan UMKM	Pengetahuan dan keterampilan tradisional

bappelitbangda

Potensi	Sumber Daya Lokal	Produk/Jasa	Nilai Tambah	Pasar	Pelaku Masyarakat	Potensi Keterkaitan Budaya
Pariwisata	Lanskap, budaya, alam	Paket wisata	Interpretasi, guiding, event	Wisatawan	Pokdarwis, UMKM, komunitas	Budaya sebagai atraksi/narasi
Kuliner	Bahan pangan lokal	Makanan tradisional	Packaging, storytelling, wisata kuliner	Wisata dan pasar lokal	Rumah tangga/UMKM	**Sangat kuat**
Seni pertunjukan	Seni dan komunitas	Pertunjukan/event	Festival, workshop, paket wisata	Wisata/event	Seniman, pemuda, komunitas	**Sangat kuat**
Tradisi dan pengetahuan lokal	Pengetahuan, cerita, tradisi	Edukasi/storytelling	Interpretasi budaya	Wisata edukasi	Tokoh budaya, pemandu	**Sangat kuat**

Sumber: Sintesis hasil BPS Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2025, Kajian PUD Kabupaten Bandung Barat 2024, dan hasil identifikasi budaya dalam laporan kajian; diolah

Berdasarkan sintesis tersebut, tidak seluruh sektor ekonomi mempunyai hubungan yang sama kuat dengan budaya lokal.

Dalam konteks kajian ini, hubungan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga.

A. Potensi dengan keterkaitan budaya langsung

Meliputi:

- kuliner tradisional;
- seni pertunjukan;
- tradisi lisan;
- kerajinan;
- festival budaya;
- wisata budaya;
- storytelling;
- workshop budaya.

bappelitbangda

Kelompok ini mempunyai hubungan paling langsung antara **aset budaya → produk/jasa → pasar → manfaat ekonomi**.

B. Potensi dengan keterkaitan budaya melalui nilai tambah

Meliputi:

- hortikultura;
- kopi;
- pangan olahan;
- tanaman hias;
- produk kreatif;
- tekstil dan pakaian.

Pada kelompok ini budaya tidak harus menjadi produk yang dijual secara langsung. Budaya dapat berfungsi sebagai **identitas, cerita, desain, pengetahuan lokal, teknik produksi, atau branding** yang meningkatkan diferensiasi produk.

C. Potensi ekonomi pendukung

Meliputi:

- perdagangan;
- transportasi;
- akomodasi;
- informasi dan komunikasi;
- jasa keuangan;
- jasa lainnya.

4.1.8 Hubungan Potensi Ekonomi dengan Budaya Lokal

Sektor ini berperan sebagai **infrastruktur ekonomi dan penghubung rantai nilai**, sehingga memungkinkan produk budaya dan produk lokal masyarakat masuk ke pasar yang lebih luas.

Hasil identifikasi tersebut memperlihatkan bahwa budaya lokal sebaiknya tidak diposisikan sebagai sektor ekonomi yang berdiri sendiri. Budaya lebih tepat diposisikan sebagai **modal sosial, identitas, pengetahuan, kreativitas dan sumber diferensiasi** yang dapat masuk ke dalam berbagai sektor ekonomi.

bappelitbangda

Hubungannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Budaya lokal
↓
Pengetahuan – Identitas – Kreativitas
↓
Produk/Jasa Lokal
↓
Nilai Tambah
↓
Pasar & Pariwisata
↓
Pendapatan Masyarakat
↓
Kesejahteraan
↓
Pelestarian Budaya

Kerangka tersebut sejalan dengan arah pengembangan dalam laporan kajian yang menempatkan budaya sebagai modal pembangunan dan mendorong integrasi budaya dengan pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM serta pengembangan produk lokal. Dengan pendekatan tersebut, **nilai ekonomi budaya tidak hanya dihitung dari penjualan langsung suatu kesenian atau tradisi**, tetapi juga dari kemampuan budaya dalam memperkuat nilai tambah produk, menciptakan pengalaman wisata, meningkatkan daya tarik wilayah, memperkuat identitas produk lokal, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil identifikasi, dapat disimpulkan bahwa **Kabupaten Bandung Barat memiliki struktur ekonomi yang beragam dengan tiga kelompok potensi utama, yaitu sektor primer berbasis sumber daya lokal, sektor sekunder berbasis pengolahan dan penciptaan nilai tambah, serta sektor tersier yang berfungsi sebagai penghubung produksi dengan pasar dan wisatawan**.

Sektor industri pengolahan merupakan komponen terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Bandung Barat dengan kontribusi **40,85% pada tahun 2024**, sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi **12,63%**. Pada sisi jasa, perdagangan memberikan kontribusi **12,38%**, transportasi dan pergudangan **6,20%**, serta akomodasi dan makan minum **5,23%**.

Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya potensi basis pada **hortikultura, tanaman hias, kopi, industri pengolahan, serta jasa akomodasi dan makan-minum**. Beberapa komoditas juga

bappelitbangda

memiliki kombinasi basis, pertumbuhan dan daya saing yang mendukung pengembangannya sebagai produk unggulan.

Dari perspektif ekonomi kerakyatan, potensi tersebut menjadi semakin relevan apabila pengembangannya diarahkan pada **peningkatan keterlibatan masyarakat lokal, peningkatan nilai tambah, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan manfaat ekonomi**.

Dalam konteks pengembangan budaya lokal, potensi ekonomi Kabupaten Bandung Barat dapat dibangun melalui **tiga jalur utama**:

1. **Budaya sebagai produk/jasa ekonomi**, seperti seni pertunjukan, kuliner tradisional, wisata budaya, storytelling dan kerajinan;
2. **Budaya sebagai sumber nilai tambah**, melalui identitas, narasi, desain, pengetahuan dan kreativitas yang melekat pada produk pertanian, pangan, kerajinan dan ekonomi kreatif; dan
3. **Budaya sebagai penguat ekosistem ekonomi lokal**, melalui pengembangan destinasi, event, pasar produk lokal, UMKM, Pokdarwis, BUMDes dan komunitas budaya.

Dengan demikian, **potensi ekonomi Kabupaten Bandung Barat tidak hanya terletak pada besarnya sektor ekonomi, tetapi pada kemampuan menghubungkan sumber daya lokal dengan proses penciptaan nilai tambah dan memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat lokal**.

4.2 Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang Telah Berjalan di Kabupaten Bandung Barat

4.2.1 Kerangka Evaluasi

Pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat tidak berdiri pada satu sektor atau satu perangkat daerah, tetapi berlangsung melalui berbagai bentuk intervensi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, penguatan kelembagaan desa, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal.

Dalam konteks kajian ini, evaluasi program tidak hanya diarahkan untuk melihat apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan, tetapi juga untuk menilai **keterkaitan antara intervensi pembangunan dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat serta peluang integrasinya dengan potensi budaya lokal**.

bappelitbangda

Pendekatan evaluasi menggunakan kerangka **Context–Input–Process–Product (CIPP)** yang disesuaikan dengan ketersediaan data. Kerangka tersebut digunakan untuk melihat:

1. **Context**, yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan dan potensi masyarakat;
2. **Input**, yaitu dukungan kelembagaan, sumber daya, pelaku, dan sarana pendukung;
3. **Process**, yaitu pelaksanaan kegiatan dan keterhubungan antaraktor;
4. **Product**, yaitu keluaran dan indikasi manfaat yang dapat diidentifikasi dari data yang tersedia.

Evaluasi tidak diarahkan untuk menghasilkan skor keberhasilan program apabila data kuantitatif mengenai target, realisasi, anggaran, penerima manfaat, dan outcome belum tersedia secara memadai. Dengan demikian, hasil evaluasi lebih ditekankan pada **identifikasi capaian, keterbatasan, kesenjangan, dan kebutuhan penguatan program**.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kajian yang menempatkan budaya sebagai modal pembangunan yang perlu diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat, UMKM, pariwisata berbasis komunitas, dan perlindungan nilai budaya.

4.2.2 Dimensi dan Indikator Evaluasi

Kerangka evaluasi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Kerangka Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Dimensi	Fokus Evaluasi	Indikator
Context	Kesesuaian program dengan kebutuhan daerah	Kesesuaian dengan potensi ekonomi lokal; kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat; relevansi dengan budaya lokal
Input	Ketersediaan dukungan program	Kelembagaan pelaksana; SDM; sarana/prasarana; dukungan pembiayaan; kemitraan
Process	Pelaksanaan program	Bentuk kegiatan; keterlibatan masyarakat; koordinasi lintas sektor; pendampingan; keberlanjutan pelaksanaan
Output	Hasil langsung kegiatan	Produk/kegiatan yang dihasilkan; kelompok/pelaku yang terlibat; kapasitas yang meningkat; jejaring yang terbentuk
Outcome	Perubahan yang dihasilkan	Akses pasar; peningkatan nilai tambah; peningkatan aktivitas usaha; penguatan kelembagaan masyarakat
Impact	Dampak jangka panjang	Pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; kesejahteraan; keberlanjutan usaha; pelestarian budaya

Sumber: Hasil sintesis Tim Penyusun, 2025.

bappelitbangda

Dalam penerapannya, indikator **outcome dan impact** hanya digunakan apabila terdapat data yang memadai. Apabila tidak tersedia data sebelum dan sesudah program, nilai pendapatan, jumlah penerima manfaat, maupun data perubahan kesejahteraan, maka evaluasi tidak memberikan klaim kuantitatif mengenai dampak program.

4.2.3 Identifikasi Program/Kegiatan yang Relevan

Berdasarkan karakteristik pembangunan ekonomi masyarakat dan arah pengembangan yang telah diidentifikasi dalam laporan, terdapat beberapa kelompok intervensi yang relevan untuk dievaluasi, yaitu:

1. pengembangan UMKM dan produk lokal;
2. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
3. penguatan kelembagaan ekonomi desa;
4. pengembangan ekonomi kreatif dan produk budaya;
5. pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal;
6. promosi dan pemasaran produk lokal;
7. pengembangan kapasitas masyarakat.

Kelompok tersebut memiliki keterkaitan dengan pelaku yang telah diidentifikasi dalam laporan, antara lain pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, sanggar/komunitas budaya, UMKM, pemuda/kreator lokal, serta pelaku wisata.

Tabel 4. 8 Kelompok Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang Relevan

No.	Kelompok Program	Fokus Intervensi	Keterkaitan dengan Ekonomi Masyarakat
1	Pengembangan UMKM	Penguatan usaha, produk, kemasan, pemasaran	Meningkatkan kapasitas dan nilai tambah usaha masyarakat
2	Pengembangan produk lokal	Kuliner, kerajinan, produk kreatif	Mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah
3	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	Pokdarwis, paket wisata, atraksi lokal	Membuka peluang pendapatan masyarakat dari aktivitas wisata
4	Penguatan kelembagaan desa	BUMDes, kelompok masyarakat	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan ekonomi

bappelitbangda

No.	Kelompok Program	Fokus Intervensi	Keterkaitan dengan Ekonomi Masyarakat
5	Pengembangan ekonomi kreatif	Produk kreatif, desain, konten, pemasaran	Mendorong diversifikasi produk dan jasa
6	Pelestarian dan pemanfaatan budaya	Seni, tradisi, kuliner, pengetahuan lokal	Menjadikan budaya sebagai sumber nilai sosial dan ekonomi secara berkelanjutan
7	Promosi dan pemasaran	Promosi digital, event, jejaring pasar	Memperluas akses pasar produk dan jasa lokal

Sumber: Hasil sintesis Tim Penyusun berdasarkan Laporan Akhir Pengembangan Budaya Lokal Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.

Tabel ini merupakan pengelompokan analitis terhadap jenis intervensi yang relevan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Tidak seluruh kelompok tersebut dapat diperlakukan sebagai satu program pemerintah tertentu tanpa data program dan dokumen pelaksanaan yang spesifik.

4.2.4 Evaluasi Program Pengembangan UMKM dan Produk Lokal

UMKM merupakan salah satu saluran utama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan karena memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam proses produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi manfaat ekonomi.

Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, pengembangan UMKM memiliki peluang besar untuk dihubungkan dengan potensi sumber daya lokal dan budaya. Kajian PUD menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman serta tekstil dan pakaian jadi merupakan subsektor penting dalam industri pengolahan KBB. PUD juga mengidentifikasi berbagai produk makanan khas lokal, termasuk Wajit Cililin, Gurilem, serta produk olahan susu dari kawasan Lembang.

Dari perspektif ekonomi kerakyatan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan jumlah usaha, tetapi perlu dilanjutkan menuju **peningkatan nilai tambah, kualitas produk, branding, akses pasar, dan keterhubungan dengan sektor lain**.

bappelitbangda

Tabel 4. 9 Evaluasi Pengembangan UMKM dan Produk Lokal

Dimensi	Temuan	Evaluasi
Context	KBB memiliki beragam UMKM dan produk lokal	Relevan dengan karakteristik ekonomi masyarakat
Input	Pelaku UMKM, produk lokal, sumber daya daerah tersedia	Basis pengembangan tersedia, tetapi kapasitas antar pelaku tidak seragam
Process	Pengembangan produk, pelatihan, pemasaran dan penguatan kapasitas menjadi kebutuhan yang teridentifikasi	Perlu penguatan kesinambungan pendampingan
Output	Beragam produk pangan, tekstil, pakaian jadi, furnitur, dan produk kreatif	Produk masyarakat telah terbentuk dan memiliki keragaman
Outcome	Peluang peningkatan nilai tambah dan akses pasar	Belum dapat dikuantifikasi secara menyeluruh berdasarkan data yang tersedia
Impact	Potensi terhadap pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat	Belum dapat dinilai secara kuantitatif tanpa data longitudinal penerima manfaat

Hasil sintesis dan pengolahan Tim Penyusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia dalam kajian, 2025.

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan **CIPP (Context, Input, Process, Output, Outcome, dan Impact)** yang disesuaikan dengan ketersediaan data. Penilaian pada dimensi Context, Input, Process, dan Output dilakukan berdasarkan informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat, potensi produk lokal, pelaku usaha, kebutuhan pengembangan, serta arah program yang tersedia dalam dokumen kajian. Sementara itu, penilaian Outcome dan Impact dibatasi pada identifikasi peluang dan kondisi yang dapat didukung oleh data yang tersedia. Pengukuran kuantitatif terhadap perubahan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan belum dilakukan karena belum tersedia data longitudinal penerima manfaat dan data target–realisasi program secara konsisten.

4.2.5 Evaluasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata memiliki posisi strategis karena dapat menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, kerajinan, perdagangan hingga jasa. Dalam kajian PUD menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki aktivitas akomodasi dan makan-minum yang cukup berkembang. Data yang dikutip dalam PUD menunjukkan keberadaan hotel yang terkonsentrasi terutama di Lembang serta aktivitas rumah makan, restoran, dan kafe di sejumlah wilayah, terutama Lembang dan Ngamprah.

bappelitbangda

Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, pengembangan pariwisata menjadi relevan apabila belanja wisatawan dapat masuk ke rantai ekonomi masyarakat lokal.

Tabel 4. 10 Evaluasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Aspek	Kondisi/Temuan	Kebutuhan Penguatan
Atraksi	Potensi alam, budaya dan aktivitas masyarakat tersedia	Kurasi atraksi dan pengemasan pengalaman wisata
Pelaku	Pokdarwis, kelompok seni, UMKM dan masyarakat lokal	Penguatan kapasitas pengelolaan
Produk wisata	Potensi wisata budaya, edukasi dan paket berbasis komunitas	Penyusunan paket yang terstruktur
Kuliner	Produk pangan lokal dan makanan khas tersedia	Integrasi dengan itinerary wisata
Kerajinan	Produk lokal dapat dikembangkan sebagai suvenir	Penguatan desain, kualitas dan branding
Pasar	Wisatawan menjadi pasar potensial	Penguatan jejaring dengan hotel, restoran, travel agent dan platform digital
Manfaat ekonomi	Berpotensi tersebar ke berbagai pelaku	Perlu mekanisme agar belanja wisatawan lebih banyak terserap masyarakat lokal

Sumber: Hasil sintesis dan pengolahan Tim Tahun 2025.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat **tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan objek atau atraksi wisata**, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dalam mengubah potensi tersebut menjadi pengalaman wisata, produk, dan jasa yang memiliki nilai ekonomi.

Dari sisi **atraksi**, Kabupaten Bandung Barat memiliki kombinasi potensi alam, budaya, dan aktivitas masyarakat yang dapat menjadi dasar pengembangan produk wisata. Namun, keberadaan potensi belum secara otomatis menghasilkan produk wisata yang siap dipasarkan. Oleh karena itu, diperlukan proses **kurasi, interpretasi, dan pengemasan atraksi** agar memiliki alur pengalaman yang jelas bagi wisatawan.

Dari sisi **pelaku**, keberadaan Pokdarwis, kelompok seni, UMKM, dan masyarakat lokal menjadi modal penting dalam pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Laporan juga menempatkan Pokdarwis, BUMDes, kelompok seni, komunitas lokal, dan UMKM sebagai bagian dari kelembagaan yang dapat mengelola pengembangan ekonomi budaya. Laporan Akhir Final Pengembangan

bappelitbangda

Selanjutnya, **kuliner dan kerajinan** dapat berfungsi sebagai penghubung antara kegiatan wisata dengan ekonomi masyarakat. Pengembangan produk budaya dalam laporan mencakup kuliner, kerajinan, cenderamata, produk edukasi, konten digital, dan produk kreatif lainnya.

Aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah **keterhubungan pasar dengan pelaku ekonomi lokal**. Pengembangan wisata perlu diarahkan agar wisatawan tidak hanya mengunjungi destinasi, tetapi juga menggunakan jasa lokal, membeli produk lokal, menikmati kuliner lokal, mengikuti aktivitas masyarakat, dan memperoleh pengalaman budaya. Dengan demikian, rantai manfaat ekonomi dapat diperluas dari **atraksi → wisatawan → produk/jasa lokal → transaksi → pendapatan masyarakat**.

4.2.6 Evaluasi Integrasi Budaya dalam Program Ekonomi Masyarakat

Bagian ini menjadi **pembeda utama** antara evaluasi program ekonomi masyarakat biasa dengan kajian yang sedang dilakukan. Berdasarkan kajian, budaya KBB memiliki bentuk yang beragam, antara lain warisan budaya tak benda, ritus dan upacara adat, seni pertunjukan, kuliner tradisional, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, situs budaya, dan lanskap budaya. Namun, keterkaitan antara program ekonomi masyarakat dengan budaya lokal belum dapat dianggap sebagai satu sistem yang terintegrasi. Hal ini terlihat dari arah program prioritas yang masih perlu membangun integrasi antara **desa, UMKM, Pokdarwis, BUMDes, komunitas budaya, pariwisata, dan pasar**.

Tabel 4. 11 Evaluasi Integrasi Budaya dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Komponen	Kondisi yang Teridentifikasi	Kesenjangan
Budaya lokal	Banyak aset budaya yang masih hidup	Belum seluruhnya dikembangkan menjadi produk/jasa ekonomi
UMKM	Produk lokal telah berkembang	Belum seluruh produk memiliki identitas/narasi budaya
Pariwisata	Aktivitas wisata berkembang	Integrasi atraksi budaya dengan rantai belanja wisata masih perlu diperkuat
Pokdarwis	Menjadi aktor pengelola wisata masyarakat	Perlu penguatan kemampuan pengemasan produk budaya
BUMDes	Potensial sebagai pengelola ekonomi desa	Belum terdapat model tunggal pengelolaan ekonomi budaya
Digitalisasi	Promosi digital menjadi kebutuhan	Belum seluruh produk budaya terdokumentasi dan dipasarkan secara digital

bappelitbangda

Komponen	Kondisi yang Teridentifikasi	Kesenjangan
Event budaya	Memiliki potensi menarik pengunjung	Perlu dikaitkan dengan UMKM dan transaksi ekonomi lokal
Produk budaya	Kuliner, kerajinan, seni dan narasi lokal tersedia	Perlu standardisasi, branding dan mekanisme pasar

Sumber: Hasil sintesis dan pengolahan Tim Penyusun Tahun 2025

Berdasarkan identifikasi tersebut, kesenjangan utama pengembangan ekonomi masyarakat berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat **bukan semata-mata terletak pada ketiadaan potensi**, tetapi pada belum optimalnya proses yang menghubungkan **aset budaya, pelaku masyarakat, produk, pariwisata, pasar, dan manfaat ekonomi**.

Dari sisi budaya lokal, Kabupaten Bandung Barat memiliki beragam aset budaya yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat. Namun, tidak seluruh aset tersebut secara langsung dapat atau perlu dikomersialisasikan. Karena itu, diperlukan **kurasi budaya** untuk membedakan budaya yang dapat dikembangkan sebagai produk atau pengalaman ekonomi, budaya yang dapat dimanfaatkan secara terbatas, dan budaya yang perlu lebih diarahkan pada pelestarian. Pendekatan ini sejalan dengan laporan yang menempatkan dokumentasi dan kurasi sebagai dasar untuk pengembangan narasi wisata, edukasi, promosi, produk kreatif, sekaligus perlindungan nilai budaya. Laporan Akhir Final Pengembanga···

Pada sisi **UMKM dan produk lokal**, basis usaha dan produk telah tersedia. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan kemampuan produk tersebut untuk memiliki **identitas, nilai tambah, kualitas, narasi, dan akses pasar**. Laporan juga mengarahkan pengembangan produk budaya tidak hanya pada pertunjukan atau ritual, tetapi pada produk turunan seperti kuliner, kerajinan, cenderamata, produk edukasi, buku cerita, konten digital, dan produk kreatif lainnya.

Sementara itu, **pariwisata** memiliki posisi penting sebagai salah satu saluran untuk mempertemukan budaya dengan pasar. Namun, manfaat ekonomi tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya kunjungan. Yang lebih penting adalah sejauh mana aktivitas wisata menciptakan transaksi terhadap produk dan jasa masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan keterhubungan antara **atraksi → paket wisata → UMKM → kuliner → kerajinan → jasa masyarakat → transaksi → pendapatan lokal**.

Pada aspek kelembagaan, **Pokdarwis dan BUMDes** dapat menjadi simpul pengelolaan ekonomi masyarakat. Laporan secara eksplisit menempatkan Pokdarwis, BUMDes, koperasi, kelompok UMKM, sanggar seni, forum pelaku budaya, dan lembaga adat sebagai bentuk kelembagaan yang dapat berperan dalam pengelolaan ekonomi budaya. Namun, model kelembagaan tidak perlu dipaksakan menjadi satu bentuk yang sama untuk seluruh desa; desainnya sebaiknya mengikuti potensi, kapasitas, dan karakter ekonomi masing-masing wilayah.

bappelitbangda

4.2.7 Sintesis Evaluasi Program

Berdasarkan seluruh dimensi evaluasi, dapat disusun sintesis sebagai berikut.

Tabel 4. 12 Sintesis Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat

Bidang	Potensi/Capaian yang Teridentifikasi	Permasalahan/Kesenjangan	Arah Penguatan
UMKM	Basis pelaku dan produk lokal tersedia	Kapasitas usaha, pemasaran, modal dan teknologi masih menjadi kendala	Pendampingan berbasis rantai nilai
Produk lokal	Produk pangan, tekstil, kerajinan dan produk kreatif tersedia	Nilai tambah dan branding belum merata	Standardisasi, desain, kemasan dan branding
Pariwisata	Aktivitas wisata dan fasilitas pendukung berkembang	Belum seluruh belanja wisata terserap pelaku lokal	Community-based tourism
Budaya	Aset budaya beragam dan masih hidup	Belum seluruhnya terhubung dengan aktivitas ekonomi	Kurasi dan pengembangan produk budaya
Kelembagaan	BUMDes, Pokdarwis, komunitas dan UMKM tersedia	Kolaborasi lintas pelaku belum menjadi satu ekosistem	Forum dan jejaring ekonomi budaya
Pasar	Terdapat pasar wisatawan dan pasar digital	Akses pasar sebagian pelaku masih terbatas	Digital marketing dan kemitraan pasar
SDM	Terdapat pelaku ekonomi dan budaya lokal	Kapasitas manajemen, kreativitas dan pemasaran perlu diperkuat	Pelatihan berbasis kebutuhan usaha
Digitalisasi	Media digital berpotensi memperluas pasar	Dokumentasi dan pemasaran belum terintegrasi	Platform/marketplace dan database produk
Monitoring	Arah program telah dapat dirumuskan	Data target, realisasi, outcome dan impact belum lengkap	Sistem monitoring berbasis indikator

Sumber: Hasil sintesis dan pengolahan Tim Penyusun Tahun 2025.

bappelitbangda

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan potensi atau kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi **belum optimalnya integrasi antarkomponen dalam satu rantai nilai ekonomi berbasis lokal**.

Kesenjangan tersebut dapat dirumuskan dalam enam kelompok.

1. Kesenjangan antara potensi dan produk

KBB memiliki potensi budaya dan sumber daya lokal yang beragam, tetapi tidak seluruhnya telah diterjemahkan menjadi produk atau jasa yang mempunyai nilai tambah ekonomi.

2. Kesenjangan antara produk dan pasar

Produk masyarakat telah tersedia, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat kemasan, branding, promosi, distribusi, dan hubungan dengan pasar.

3. Kesenjangan antara budaya dan pariwisata

Budaya telah diidentifikasi sebagai aset pembangunan, tetapi integrasinya dengan paket wisata, kuliner, suvenir, event, dan pengalaman wisata masih perlu diperkuat.

4. Kesenjangan kelembagaan

Pelaku seperti UMKM, Pokdarwis, BUMDes, komunitas budaya dan pemerintah desa memiliki fungsi masing-masing, tetapi membutuhkan mekanisme koordinasi agar tidak berjalan secara sektoral.

5. Kesenjangan digitalisasi

Digitalisasi belum cukup diposisikan hanya sebagai media promosi. Ke depan, digitalisasi perlu mencakup **dokumentasi → storytelling → katalog produk → pemasaran → transaksi → jejaring pasar**.

6. Kesenjangan data evaluasi

Data yang tersedia belum memungkinkan seluruh program dinilai berdasarkan perubahan pendapatan, jumlah penerima manfaat, cost-effectiveness, maupun dampak kesejahteraan secara kuantitatif. Oleh sebab itu, evaluasi dalam kajian ini menggunakan pendekatan **evidence-based qualitative assessment** dan tidak memberikan klaim kuantitatif yang tidak didukung data.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat telah memiliki modal berupa **pelaku usaha, produk lokal, aktivitas pariwisata, kelembagaan masyarakat, serta potensi budaya yang beragam**. Kajian PUD juga menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, khususnya tekstil dan pakaian jadi serta makanan dan minuman, merupakan bagian penting dari basis ekonomi daerah.

bappelitbangda

Namun demikian, dari perspektif pengembangan **ekonomi kerakyatan berbasis budaya**, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat keterhubungan antara **potensi lokal, pelaku masyarakat, produk, nilai tambah, pasar, pariwisata, dan budaya**.

Dengan demikian, evaluasi tidak menunjukkan bahwa program yang telah berjalan tidak berhasil, melainkan menunjukkan bahwa **informasi mengenai target, realisasi, outcome, dan impact belum tersedia secara lengkap untuk melakukan penilaian kuantitatif terhadap seluruh program**. Oleh karena itu, kebutuhan utama yang muncul adalah membangun sistem pengembangan yang lebih terintegrasi dan sekaligus memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi.

Arah penguatan yang diperlukan meliputi:

1. penguatan kapasitas UMKM dan pelaku budaya;
2. peningkatan nilai tambah dan kualitas produk lokal;
3. penguatan akses pasar dan pemasaran digital;
4. integrasi budaya dengan pariwisata berbasis masyarakat;
5. penguatan BUMDes, Pokdarwis dan kelembagaan ekonomi lokal;
6. pengembangan jejaring antara UMKM, desa, komunitas budaya dan pelaku wisata;
7. penyusunan indikator outcome dan impact yang dapat diukur secara berkala; dan
8. pengembangan program ekonomi kerakyatan berbasis budaya sebagaimana dirumuskan pada Bab V.

Kerangka tersebut konsisten dengan arah pengembangan dalam laporan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan mengintegrasikan **pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, UMKM, pariwisata berbasis komunitas, dan perlindungan nilai budaya**

4.3 Potensi Pengembangan Budaya sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas dan warisan sosial masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber daya pembangunan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, berbagai aset budaya yang masih hidup memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Pendekatan ekonomi kerakyatan menekankan pada pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh rantai nilai ekonomi. Dalam konteks

bappelitbangda

budaya, pendekatan ini dapat dilakukan melalui pengembangan pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*), ekonomi kreatif, penguatan UMKM budaya, serta pengembangan produk-produk lokal yang memiliki identitas budaya yang kuat.

Berdasarkan karakteristiknya, potensi budaya Kabupaten Bandung Barat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk pengembangan ekonomi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Potensi Pengembangan Ekonomi Berbasis Budaya

Potensi Budaya	Bentuk Pengembangan	Pelaku Utama
Mikul Lodong	Wisata budaya dan konservasi air	Pokdarwis, kelompok seni, UMKM
Ngamandian Goong Sibesér	Atraksi budaya dan seni tradisional	Sanggar seni dan komunitas budaya
Pamitan Menambang Batu	Geowisata dan kerajinan tradisional	Pengrajin dan masyarakat lokal
Kuliner Tradisional	Wisata kuliner dan UMKM pangan	Rumah tangga dan UMKM
Tradisi Lisan	Storytelling tourism dan edukasi budaya	Tokoh adat dan pemandu wisata
Seni Pertunjukan	Festival budaya dan event daerah	Komunitas seni dan pemuda desa
Potensi Budaya	Bentuk Pengembangan	Pelaku Utama

Sumber: PPKD Kabupaten Bandung Barat dan DAPOBUD; diolah dan dianalisis oleh Tim Penyusun, 2025.

Pengembangan budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip pelestarian budaya. Nilai-nilai sakral yang terkandung dalam ritual adat tidak seharusnya dikomersialisasikan secara langsung, melainkan dikembangkan melalui produk turunan yang bersifat edukatif dan kreatif. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa menghilangkan makna budaya yang melekat pada tradisi tersebut.

4.4 Analisis Potensi Pariwisata Budaya Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan inventarisasi budaya yang telah dilakukan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang kuat untuk mengembangkan pariwisata budaya berbasis masyarakat. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan warisan budaya tak benda yang masih hidup, keberadaan komunitas budaya yang aktif, serta keterkaitan budaya dengan lanskap alam yang menjadi daya tarik wisata utama daerah.

Dari berbagai WBTB yang teridentifikasi, terdapat beberapa tradisi yang memiliki tingkat kesiapan relatif lebih tinggi untuk dikembangkan sebagai atraksi budaya.

bappelitbangda

Tabel 4.2. Prioritas Pengembangan Pariwisata Budaya

WBTB	Nilai Budaya	Potensi Pariwisata	Tingkat Kesiapan
Mikul Lodong	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
Ngamandian Goong Sibesér	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pamitan Menambang Batu	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang
Ngamandian Ucing	Tinggi	Sedang	Sedang
Serepan Patalekan	Sedang	Sedang	Sedang
Hajat Arwah	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah
Raracik Goib	Tinggi	Rendah	Rendah
Puput Puseur	Sedang	Rendah	Rendah
Nyengitan Seuweu Siwi	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber: Hasil Olahan dan dianalisis oleh Tim Penyusun, 2025.

Mikul Lodong merupakan tradisi yang paling potensial untuk dikembangkan karena memiliki visualisasi budaya yang kuat, keterkaitan dengan isu konservasi air, serta relatif mudah dipahami oleh wisatawan. Sementara itu, Pamitan Menambang Batu memiliki peluang untuk dikaitkan dengan pengembangan geowisata dan kerajinan batu tradisional yang menjadi ciri khas beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat.

Dengan mempertimbangkan kekayaan budaya yang dimiliki, pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Bandung Barat sebaiknya diarahkan pada model pariwisata berbasis komunitas yang mengedepankan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini akan memperkuat posisi budaya sebagai aset pembangunan sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat lokal.

4.5 Konteks dan Rasionalisasi Analisis

Pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat berlangsung dalam konteks wilayah yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan kapasitas desa yang berbeda antar kecamatan. Di satu sisi, wilayah utara seperti Lembang, Parongpong, dan Cisarua menunjukkan dinamika ekonomi berbasis jasa dan pariwisata yang relatif mapan. Di sisi lain, wilayah selatan dan barat seperti Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, serta sebagian Cipongkor dan Cihampelas masih didominasi oleh struktur ekonomi agraris dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi. Perbedaan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan ekonomi masyarakat tidak dapat diseragamkan, melainkan perlu mempertimbangkan konteks lokal yang spesifik.

Dalam kerangka tersebut, budaya diposisikan bukan semata sebagai warisan yang perlu dilestarikan, melainkan sebagai modal sosial dan sumber daya pembangunan. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa potensi budaya

bappelitbangda

hadir dalam berbagai bentuk mulai dari ritus adat, seni tradisi, pengetahuan lokal, kuliner tradisional, hingga situs budaya yang tersebar di hampir seluruh desa. Namun, tingkat pemanfaatan budaya untuk tujuan ekonomi masih sangat bervariasi, baik antar kecamatan maupun antar desa dalam satu kecamatan yang sama.

Rasionalisasi analisis dalam bab ini berangkat dari kesenjangan tersebut. Di beberapa wilayah dengan status desa dominan Mandiri–Maju, potensi budaya telah terhubung dengan aktivitas ekonomi, terutama melalui pariwisata dan UMKM berbasis kuliner dan seni. Sebaliknya, di wilayah dengan status desa Berkembang, potensi budaya cenderung berfungsi sebagai pengikat sosial dan identitas komunitas, namun belum teraktivasi sebagai sumber nilai tambah ekonomi.

Bab IV ini dibahas relasi budaya dengan struktur ekonomi lokal, kapasitas desa, dan pola pemanfaatan eksisting. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak menilai budaya secara normatif atau hierarkis, melainkan membaca fungsi ekonomi budaya dalam konteks sosial yang berbeda. Budaya yang sama, misalnya ritus adat, dapat memiliki implikasi ekonomi yang berbeda ketika berada di desa wisata yang mapan dibandingkan dengan desa agraris yang relatif terisolasi.

Lebih lanjut, hasil pengelompokan kecamatan berdasarkan kondisi ekonomi, potensi budaya dominan, dan status desa menunjukkan adanya lima klaster wilayah dengan karakter yang berbeda. Klaster “Wisata–Budaya Mapan” memperlihatkan hubungan yang relatif jelas antara budaya dan ekonomi, terutama melalui atraksi wisata, event budaya, dan produk UMKM. Klaster “Budaya Produktif Menengah” menunjukkan adanya potensi ekonomi yang mulai tumbuh namun belum terintegrasi. Sementara itu, klaster “Agraris–Budaya Tradisional” dan “Budaya Konservatif Berbasis Komunitas” menampilkan budaya sebagai praktik hidup yang kuat secara sosial, tetapi belum menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Klaster “Budaya Potensial Belum Tergarap” berada di antara dua kutub tersebut, dengan potensi besar namun memerlukan intervensi yang lebih terarah.

Rasionalisasi analisis dalam bab ini juga mempertimbangkan kapasitas dasar desa sebagaimana tercermin dalam status Indeks Desa tahun 2025. Status desa tidak diperlakukan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan, melainkan sebagai indikator kesiapan sistemik dalam mendukung pemanfaatan budaya. Desa Mandiri dan Maju cenderung memiliki infrastruktur, kelembagaan, dan jejaring pasar yang lebih memadai untuk mengintegrasikan budaya ke dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, desa Berkembang membutuhkan pendekatan bertahap yang menekankan penguatan kapasitas, perlindungan nilai budaya, dan mitigasi risiko komersialisasi yang tidak kontekstual.

Dengan demikian, analisis budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam kajian ini tidak diarahkan pada penciptaan model tunggal, melainkan pada pembacaan pola umum dan perbedaan kontekstual antar wilayah. Pendekatan ini memungkinkan perumusan strategi yang

bappelitbangda

lebih adaptif, baik dalam bentuk penguatan desa budaya, pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas, maupun integrasi budaya dalam pengembangan pariwisata dan UMKM lokal.

4.6 Pola Umum Dampak Ekonomi Budaya

Analisis dampak ekonomi budaya di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa hubungan antara budaya dan ekonomi masyarakat tidak bersifat linier maupun otomatis. Keberadaan potensi budaya baik dalam bentuk ritus adat, seni tradisi, pengetahuan lokal, kuliner, maupun situs budaya tidak serta-merta menghasilkan manfaat ekonomi apabila tidak didukung oleh kapasitas sosial, kelembagaan, dan konteks wilayah yang memadai. Oleh karena itu, pola dampak ekonomi budaya perlu dibaca sebagai hasil interaksi antara jenis budaya, cara pemanfaatan, dan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

4.6.1 Pola Dampak Langsung pada Wilayah Wisata–Budaya Mapan

Pada kecamatan dengan karakter Wisata–Budaya Mapan (seperti Lembang, Parongpong, dan Cisarua), budaya telah terintegrasi secara relatif kuat ke dalam aktivitas ekonomi lokal. Integrasi ini terutama terjadi melalui pemanfaatan seni tradisi, event budaya, kuliner tradisional, dan situs budaya sebagai bagian dari rantai nilai pariwisata. Dampak ekonomi yang muncul bersifat langsung, terlihat dari peningkatan pendapatan UMKM, penyerapan tenaga kerja di sektor jasa, serta tumbuhnya usaha pendukung seperti transportasi, penginapan, dan perdagangan.

Namun demikian, pola ini juga menunjukkan bahwa budaya yang berdampak ekonomi tinggi umumnya adalah budaya yang mudah dikemas dan mudah diakses pasar, seperti seni pertunjukan dan kuliner. Sementara itu, ritus adat dan praktik budaya yang bersifat sakral cenderung mengalami pembatasan pemanfaatan ekonomi, baik karena norma komunitas maupun pertimbangan etika budaya. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua unsur budaya di wilayah mapan berkontribusi secara ekonomi dalam tingkat yang sama.

4.6.2 Pola Dampak Tidak Langsung pada Wilayah Budaya Produktif Menengah

Di wilayah dengan karakter Budaya Produktif Menengah (Padalarang, Batujajar, Ngamprah), dampak ekonomi budaya cenderung bersifat tidak langsung dan parsial. Budaya berperan sebagai penopang kegiatan ekonomi skala kecil, terutama melalui festival lokal, kegiatan komunitas seni, dan produksi kuliner rumah tangga. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan umumnya berupa pendapatan tambahan, bukan sumber penghidupan utama.

Pola ini menunjukkan bahwa budaya mulai berfungsi sebagai komplementer ekonomi, namun belum menjadi sektor yang terintegrasi secara sistemik. Keterbatasan kelembagaan, jejaring pasar, dan kontinuitas kegiatan menjadi faktor utama yang membatasi dampak ekonomi. Meskipun demikian, wilayah dengan pola ini memiliki potensi besar untuk ditingkatkan, karena

bappelitbangda

masyarakat telah memiliki pengalaman awal dalam memanfaatkan budaya untuk kegiatan ekonomi, meskipun masih bersifat sporadis.

4.6.3 Pola Dampak Sosial Dominan pada Wilayah Agraris–Budaya Tradisional

Pada kecamatan dengan karakter Agraris–Budaya Tradisional (Cililin, Cihampelas, Cipongkor), budaya berfungsi terutama sebagai penguat kohesi sosial dan identitas komunitas, dengan dampak ekonomi yang relatif terbatas. Ritus adat, seni tradisi, dan pengetahuan lokal dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pertanian dan relasi sosial desa.

Dampak ekonomi yang muncul dari praktik budaya di wilayah ini bersifat laten, tidak langsung, dan sering kali tidak terukur secara moneter. Budaya berkontribusi pada stabilitas sosial, keberlanjutan praktik agraris, serta ketahanan komunitas dalam menghadapi tekanan ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, meskipun kontribusi ekonomi budaya terlihat rendah, perannya dalam menjaga basis ekonomi masyarakat desa tetap signifikan secara struktural.

4.6.4 Pola Budaya sebagai Modal Sosial pada Wilayah Berbasis Komunitas

Di wilayah dengan karakter Budaya Konservatif Berbasis Komunitas (Gununghalu, Rongga, Sindangkerta), budaya hampir sepenuhnya berfungsi sebagai modal sosial. Ritus adat, tradisi lisan, dan pengetahuan lokal dijaga secara ketat sebagai identitas komunitas dan sarana pengatur kehidupan sosial. Pemanfaatan budaya untuk tujuan ekonomi sangat terbatas dan umumnya tidak diarahkan ke pasar eksternal.

Pola ini menunjukkan bahwa budaya memiliki nilai intrinsik yang tinggi bagi masyarakat, namun belum (dan dalam beberapa kasus tidak ingin) dikonversi menjadi nilai ekonomi. Dampak ekonomi yang muncul lebih bersifat internal, seperti penguatan solidaritas, mekanisme gotong royong, dan dukungan sosial antarwarga. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi peningkatan ekonomi berbasis budaya di wilayah seperti ini harus sangat berhati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan sosial dan nilai budaya yang dijaga oleh komunitas.

4.6.5 Pola Potensi Ekonomi yang Belum Teraktivasi

Wilayah dengan karakter Budaya Potensial Belum Tergarap (Cipatat, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Saguling) menunjukkan adanya kesenjangan paling jelas antara potensi budaya dan dampak ekonomi. Berbagai unsur budaya termasuk ritus, seni tradisi, dan situs budaya telah teridentifikasi dalam PPKD, namun pemanfaatannya masih terbatas dan belum terstruktur.

Dampak ekonomi budaya di wilayah ini umumnya sangat rendah, bukan karena ketiadaan potensi, melainkan karena keterbatasan kapasitas, akses pasar, dan integrasi lintas sektor. Dalam konteks ini, budaya berada pada posisi strategis sebagai sumber potensi, tetapi belum menjadi sumber nilai. Pola ini sekaligus menunjukkan ruang intervensi kebijakan yang paling besar,

bappelitbangda

terutama melalui penguatan kelembagaan desa, pendampingan UMKM budaya, dan pengembangan model pemanfaatan yang sesuai dengan konteks lokal.

4.7 Implikasi Pola Budaya terhadap Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Analisis pola dampak ekonomi budaya pada Subbab 4.2 memperlihatkan bahwa hubungan antara budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat bersifat kontekstual, bertahap, dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas wilayah serta karakter sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, implikasi yang ditarik dari pola tersebut tidak diarahkan pada penyeragaman strategi, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana dan dalam kondisi apa budaya dapat berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Tabel 4.3 Matriks Implikasi Pola Budaya terhadap Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Karakter Wilayah / Pola Budaya	Fungsi Utama Budaya	Kapasitas Desa Dominan (ID 2025)	Implikasi terhadap Strategi Ekonomi	Risiko Utama yang Perlu Diantisipasi
Wisata–Budaya Mapan	Penggerak ekonomi langsung	Mandiri – Maju	Optimalisasi nilai tambah budaya, penguatan kualitas produk dan distribusi manfaat	Komodifikasi berlebihan, ketimpangan manfaat
Budaya Produktif Menengah (Peri-urban kreatif)	Pendukung ekonomi tambahan	Maju	Penguatan integrasi budaya–UMKM dan kesinambungan kegiatan	Fragmentasi kegiatan, ketergantungan event
Agraris-budaya komunitas	Penguat kohesi sosial	Berkembang	Penguatan kapasitas sosial dan ekonomi berbasis komunitas	Hilangnya nilai budaya jika dikomersialisasi
Lanskap budaya dan sumber daya alam	Modal sosial dan identitas	Berkembang	Pendekatan perlindungan budaya dan pemberdayaan bertahap	Resistensi komunitas, konflik nilai
Desa budaya potensial	Sumber potensi laten	Berkembang	Aktivasi potensi budaya melalui penguatan kapasitas dan akses	Program tidak kontekstual, gagal berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.7.1 Diferensiasi Wilayah sebagai Dasar Strategi Ekonomi Berbasis Budaya

Implikasi utama dari pola yang teridentifikasi adalah perlunya pendekatan berbasis diferensiasi wilayah. Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dipahami sebagai satu kesatuan homogen, melainkan sebagai mosaik wilayah dengan tingkat keterhubungan ekonomi, kapasitas desa, dan fungsi budaya yang berbeda-beda. Budaya yang sama, misalnya seni tradisi atau ritus adat, dapat memainkan peran ekonomi yang sangat berbeda tergantung pada konteks kewilayahannya.

Di wilayah dengan karakter Wisata Budaya Mapan, budaya telah terintegrasi ke dalam sistem ekonomi lokal melalui pariwisata dan jasa pendukung. Implikasinya, strategi peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah ini tidak lagi berfokus pada aktivasi budaya, melainkan pada penguatan kualitas pemanfaatan budaya agar manfaat ekonominya lebih merata dan

bappelitbangda

berkelanjutan. Budaya di wilayah ini telah memasuki fase ekonomi fungsional, di mana nilai simbolik dan nilai ekonomi berjalan beriringan.

Sebaliknya, wilayah agraris dan berbasis komunitas menunjukkan bahwa budaya masih berfungsi terutama sebagai penyangga sosial. Dalam konteks ini, strategi ekonomi yang terlalu menekankan aspek pasar justru berpotensi melemahkan fungsi utama budaya sebagai perekat komunitas. Implikasi pentingnya adalah bahwa budaya tidak selalu harus diarahkan menjadi komoditas ekonomi; dalam beberapa konteks, peran budaya sebagai modal sosial justru merupakan prasyarat bagi peningkatan ekonomi jangka panjang.

4.7.2 Kapasitas Desa sebagai Penentu Efektivitas Strategi

Implikasi berikutnya berkaitan erat dengan kapasitas desa, sebagaimana tercermin dalam status Indeks Desa. Analisis menunjukkan bahwa desa dengan status Mandiri dan Maju memiliki prasyarat struktural yang lebih kuat untuk mengintegrasikan budaya ke dalam aktivitas ekonomi. Prasyarat tersebut mencakup keberadaan kelembagaan desa yang relatif aktif, akses terhadap infrastruktur dasar, serta keterhubungan dengan jaringan ekonomi yang lebih luas.

Sebaliknya, desa Berkembang menunjukkan keterbatasan kapasitas yang berdampak langsung pada rendahnya kontribusi ekonomi budaya, meskipun potensi budayanya tidak kalah kaya. Hal ini mengimplikasikan bahwa kegagalan budaya memberikan dampak ekonomi bukan disebabkan oleh lemahnya budaya itu sendiri, melainkan oleh keterbatasan sistem pendukungnya. Oleh karena itu, strategi peningkatan ekonomi berbasis budaya tidak dapat dilepaskan dari agenda penguatan kapasitas desa secara umum.

Implikasi ini menegaskan bahwa budaya sebaiknya tidak diposisikan sebagai solusi instan bagi permasalahan ekonomi desa. Sebaliknya, budaya perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan desa yang lebih luas, di mana penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perbaikan akses ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

4.7.3 Transformasi Fungsi Budaya dalam Siklus Ekonomi Lokal

Analisis juga menunjukkan adanya transformasi fungsi budaya dalam siklus ekonomi lokal. Pada tahap awal, budaya berfungsi sebagai identitas dan sistem nilai yang menjaga kohesi sosial. Pada tahap berikutnya, budaya mulai berperan sebagai sumber aktivitas ekonomi tambahan, misalnya melalui kegiatan insidental seperti festival atau produksi kuliner tradisional. Pada tahap lanjut, budaya dapat berkembang menjadi bagian integral dari struktur ekonomi lokal.

Implikasi dari transformasi ini adalah bahwa strategi peningkatan ekonomi berbasis budaya perlu disusun secara bertahap, mengikuti tingkat kesiapan masyarakat dan wilayah. Upaya memaksakan budaya untuk langsung masuk ke tahap ekonomi lanjut tanpa melalui fase penguatan sosial dan kelembagaan berisiko menimbulkan konflik sosial, penolakan komunitas, atau eksploitasi budaya yang tidak berkelanjutan.

bappelitbangda

Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, banyak wilayah masih berada pada fase awal dan menengah transformasi tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ekonomi berbasis budaya lebih ditentukan oleh kemampuan membaca posisi wilayah dalam siklus transformasi ini, bukan oleh besarnya potensi budaya semata.

Untuk memperjelas implikasi pola budaya terhadap strategi peningkatan ekonomi masyarakat, analisis ini dirangkum dalam bentuk matriks yang mengaitkan karakter wilayah, fungsi budaya, kapasitas desa, serta risiko yang perlu diantisipasi.

Tabel 4.4. Tahapan Peran Budaya dalam Siklus Ekonomi Lokal

Tahap	Peran Budaya	Bentuk Aktivitas	Dampak Ekonomi	Wilayah yang Umumnya Berada pada Tahap Ini
Tahap I	Identitas & kohesi sosial	Ritus adat, tradisi lisan, praktik lokal	Tidak langsung, laten	Gununghalu, Rongga, Sindangkerta
Tahap II	Pendapatan tambahan	Festival lokal, seni tradisi, kuliner rumah tangga	Rendah–Sedang	Cililin, Cipongkor, Cihampelas
Tahap III	Bagian sistem ekonomi	Wisata budaya, UMKM kreatif	Sedang–Tinggi	Lembang, Parongpong, Cisarua

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

4.7.4 Risiko Komodifikasi dan Ketimpangan Manfaat

Implikasi penting lainnya adalah munculnya risiko komodifikasi budaya yang tidak terkendali, terutama di wilayah wisata mapan. Ketika budaya terlalu difokuskan sebagai produk ekonomi, terdapat potensi terjadinya pergeseran makna, penyeragaman ekspresi budaya, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Dalam beberapa kasus, manfaat ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha skala besar, sementara komunitas pemilik budaya berada pada posisi marginal.

Implikasi ini menegaskan bahwa strategi peningkatan ekonomi berbasis budaya perlu memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Budaya tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai hak kolektif komunitas yang perlu dilindungi. Tanpa kerangka ini, peningkatan ekonomi yang dihasilkan berpotensi bersifat semu dan tidak inklusif.

4.7.5 Integrasi Budaya dalam Sistem Ekonomi Lokal

Pola yang teridentifikasi juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi budaya paling signifikan terjadi ketika budaya terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya. Budaya yang berdiri sendiri, tanpa keterhubungan dengan pariwisata, UMKM, atau sistem distribusi lokal, cenderung menghasilkan dampak ekonomi yang terbatas. Sebaliknya, budaya yang terhubung dengan rantai nilai ekonomi lokal mampu menciptakan efek pengganda yang lebih besar.

Implikasinya, strategi peningkatan ekonomi masyarakat berbasis budaya perlu dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi lokal, bukan sebagai sektor terpisah. Budaya dapat memperkuat

bappelitbangda

daya saing ekonomi lokal, namun efektivitasnya sangat bergantung pada keterpaduan dengan sektor lain serta dukungan kebijakan lintas sektor.

4.7.6 Kebutuhan Pengembangan Berdasarkan Karakter Wilayah

Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat perlu memperhatikan karakter wilayah. Wilayah utara seperti Lembang, Parongpong, dan Cisarua memiliki pasar wisata yang relatif kuat sehingga dapat diarahkan sebagai etalase budaya dan pusat integrasi budaya dengan pariwisata. Wilayah ini cocok untuk pengembangan pertunjukan seni, pasar produk budaya, festival kuliner, workshop budaya, dan paket wisata budaya.

Wilayah tengah seperti Padalarang, Ngamprah, dan Batujajar memiliki karakter peri-urban dan aksesibilitas yang baik. Wilayah ini dapat berperan sebagai simpul promosi, distribusi produk budaya, pusat event, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Sementara itu, wilayah selatan dan barat seperti Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, Cipongkor, Cikalongwetan, Saguling, dan sebagian Cipatat memiliki kekuatan pada budaya komunitas, ritus adat, tradisi lisan, pengetahuan lokal, serta lanskap agraris. Wilayah ini perlu diarahkan pada pelestarian, dokumentasi, wisata edukasi terbatas, penguatan kelembagaan desa, dan pengembangan produk lokal berbasis budaya. Tabel berikut menunjukkan fokus pengembangan berdasarkan tipologi wilayahnya.

Tabel 4.5 Fokus Pengembangan Ekonomi berdasarkan Budaya berdasarkan Tipologi Wilayah

Tipologi Wilayah	Contoh Kecamatan	Karakter Utama	Fokus Pengembangan
Wisata–Budaya Mapan	Lembang, Parongpong, Cisarua	Pasar wisata tersedia dan UMKM berkembang	Integrasi budaya dalam paket wisata, event, kuliner, dan produk kreatif
Budaya Produktif Menengah (Peri-urban kreatif)	Padalarang, Ngamprah, Batujajar	Dekat pusat pertumbuhan dan akses pasar	Promosi budaya, festival, distribusi produk, creative hub
Agraris-budaya komunitas	Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, Cipongkor	Budaya kuat dan komunitas solid	Pelestarian, dokumentasi, wisata edukasi terbatas, UMKM lokal
Lanskap budaya dan sumber daya alam	Cipatat, Saguling, Cikalongwetan, sebagian Padalarang	Budaya berkaitan dengan air, batuan, pertanian, dan alam	Geowisata, edukasi lingkungan, kerajinan, interpretasi lanskap
Desa budaya potensial	Desa-desa dengan WBTB dan tradisi aktif	Memiliki budaya hidup tetapi belum terkelola	Pendampingan desa budaya, BUMDes budaya, dan paket komunitas

Sumber: Hasil Analisis, 2025

bappelitbangda

4.8 Isu Strategis Pengembangan

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1) Budaya masih kuat sebagai identitas, tetapi belum menjadi sumber penghidupan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan produk, jasa, dan aktivitas ekonomi berbasis budaya yang dikelola oleh masyarakat.
2) Pariwisata Kabupaten Bandung Barat telah berkembang, tetapi belum sepenuhnya berbasis budaya lokal. Budaya perlu menjadi unsur pembeda dan penguat daya tarik wisata daerah melalui storytelling, festival, seni, kuliner, geowisata, dan wisata edukasi.
3) UMKM telah berkembang, tetapi belum terhubung kuat dengan narasi budaya. Produk lokal perlu diperkuat melalui identitas, cerita, kemasan, dan branding agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
4) Dokumentasi dan regenerasi budaya masih terbatas. Banyak pengetahuan budaya masih bergantung pada sesepuh, tokoh adat, atau pelaku tertentu sehingga perlu didukung melalui dokumentasi, digitalisasi, sekolah budaya, dan pelibatan generasi muda.
5) Kelembagaan pengelola budaya belum terintegrasi. Pengembangan budaya membutuhkan keterhubungan antara Pokdarwis, BUMDes, sanggar, komunitas, UMKM, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pelaku wisata.
6) Tidak semua budaya dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata. Budaya yang sakral harus dilindungi dari komersialisasi berlebihan melalui kode etik, batas pemanfaatan, dan pengawasan komunitas.
7) Branding dan kalender budaya daerah belum kuat. Kabupaten Bandung Barat memerlukan identitas budaya yang jelas serta kalender kegiatan budaya yang dapat menjadi dasar promosi, pengembangan event, dan integrasi dengan sektor pariwisata.

bappelitbangda

BAB 5 ARAH PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS BUDAYA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT



5.1 Kerangka Dasar Pengembangan

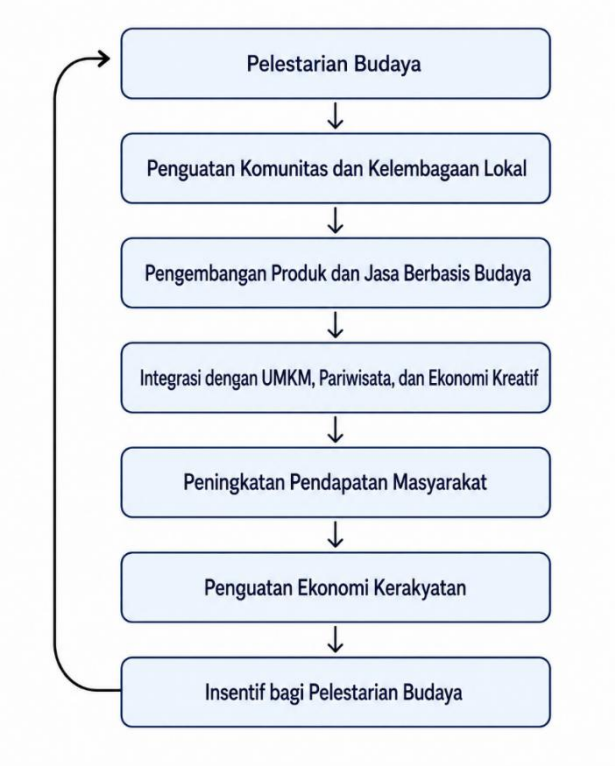
Kabupaten Bandung Barat memiliki modal budaya yang kuat, beragam, dan masih hidup dalam kehidupan masyarakat. Modal budaya tersebut meliputi warisan budaya tak benda, ritus dan upacara adat, seni pertunjukan, kuliner tradisional, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, situs budaya, serta lanskap budaya. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang mampu memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Oleh karena itu, arah pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat perlu dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, serta perlindungan nilai budaya. Budaya tidak diposisikan semata-mata sebagai objek wisata, melainkan sebagai modal pembangunan yang dapat menciptakan nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat oleh masyarakat sebagai pemilik budaya.

Dalam konteks ini, pariwisata berperan sebagai salah satu instrumen untuk memperluas manfaat ekonomi budaya, bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utama pengembangan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan budaya secara berkelanjutan, adil, dan berbasis komunitas. Dengan demikian, pengembangan budaya harus tetap menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi, nilai sosial, nilai spiritual, dan nilai ekologis yang terkandung dalam budaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Kerangka dasar pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya dapat dirumuskan sebagai berikut.

bappelitbangda



Gambar 5. 1 Kerangka Dasar Pengembangan Ekonomi berbasis Budaya

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pelestarian dan pemanfaatan ekonomi tidak boleh dipisahkan. Budaya yang dilestarikan dengan baik dapat menjadi sumber nilai ekonomi, sementara manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat memperkuat motivasi komunitas dalam menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi berikutnya.

5.2 Prinsip Pengembangan

Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat perlu didasarkan pada beberapa prinsip utama.

1. Berbasis Masyarakat

Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dalam seluruh proses pengembangan, mulai dari identifikasi potensi, kurasi budaya, pengelolaan kegiatan, penyediaan produk dan jasa, hingga penerimaan manfaat ekonomi. Pengembangan budaya tidak boleh menjadikan masyarakat hanya sebagai penonton atau tenaga pendukung, tetapi harus menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengelola utama.

2. Menjaga Autentisitas dan Nilai Budaya

Tidak semua budaya dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata terbuka. Budaya yang memiliki nilai sakral tinggi, seperti Hajat Arwah, Raracik Goib, Palakiah Palean Raga, Puput Puseur, dan

Nyengitan Seuweu Siwi, perlu diperlakukan secara hati-hati. Pengembangannya lebih tepat diarahkan pada dokumentasi, pelestarian, regenerasi, dan edukasi terbatas, bukan komersialisasi langsung.

3. Berbasis Rantai Nilai Lokal

Pengembangan budaya harus menciptakan rantai nilai ekonomi yang melibatkan pelaku lokal, seperti tokoh adat, seniman, pengrajin, UMKM, pemandu wisata, kelompok perempuan, pemuda desa, Pokdarwis, BUMDes, dan komunitas budaya. Semakin banyak pelaku lokal yang terlibat, semakin besar potensi manfaat ekonomi yang tersebar di masyarakat.

4. Terintegrasi dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Budaya perlu dihubungkan dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM agar dapat menghasilkan nilai tambah. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui paket wisata budaya, festival, workshop, pasar produk lokal, pertunjukan seni, wisata edukasi, geowisata, kuliner tradisional, dan produk kreatif berbasis narasi budaya.

5. Berbasis Karakter Wilayah

Setiap wilayah di Kabupaten Bandung Barat memiliki karakter budaya dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, strategi pengembangan tidak dapat dilakukan secara seragam. Wilayah wisata mapan, wilayah peri-urban, wilayah agraris-budaya, wilayah lanskap budaya, dan desa budaya potensial memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing.

6. Berkelanjutan dan Inklusif

Pengembangan ekonomi budaya harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk kelompok perempuan, pemuda, rumah tangga pelaku UMKM, pengrajin, seniman lokal, dan komunitas desa. Selain itu, pengembangan juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak merusak ruang budaya masyarakat.

5.3 Arah Kebijakan Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, arah kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat dapat dirumuskan ke dalam lima arah utama.

1. Penguatan Data, Dokumentasi, dan Kurasi Budaya

Arah kebijakan pertama adalah memperkuat data, dokumentasi, dan kurasi budaya. Banyak budaya di Kabupaten Bandung Barat masih diwariskan secara lisan dan belum terdokumentasikan secara sistematis. Kondisi ini berisiko menyebabkan hilangnya pengetahuan budaya apabila tidak segera dilakukan pencatatan, dokumentasi, dan pengarsipan.

bappelitbangda

Dokumentasi budaya tidak hanya penting untuk pelestarian, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan narasi wisata, bahan edukasi, promosi budaya, pengembangan produk kreatif, dan perlindungan nilai budaya. Kurasi budaya diperlukan untuk menentukan budaya mana yang dapat dikembangkan sebagai aktivitas ekonomi, budaya mana yang hanya dapat dikembangkan secara terbatas, dan budaya mana yang harus difokuskan pada perlindungan.

2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Budaya

Arah kebijakan kedua adalah memperkuat kelembagaan lokal sebagai pengelola ekonomi budaya. Kelembagaan ini dapat berbentuk Pokdarwis, BUMDes, koperasi, kelompok UMKM, sanggar seni, forum pelaku budaya, atau lembaga adat. Kelembagaan diperlukan untuk memastikan adanya pembagian peran, pembagian manfaat, perlindungan nilai budaya, dan keberlanjutan pengelolaan.

Tanpa kelembagaan yang kuat, potensi budaya akan sulit berkembang menjadi ekonomi masyarakat karena kegiatan akan berjalan secara sporadis, tidak terkoordinasi, dan rentan dikuasai oleh pihak luar.

3. Pengembangan Produk dan Jasa Berbasis Budaya

Arah kebijakan ketiga adalah mengembangkan produk dan jasa berbasis budaya. Pengembangan ekonomi budaya tidak harus menjual ritual secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui produk turunan seperti kerajinan, kuliner, pertunjukan seni, workshop, pemanduan, festival, geowisata, storytelling, dan wisata edukasi.

Budaya seperti Mikul Lodong, Ngamandian Goong Sibesér, Pamitan Menambang Batu Coet, Cobek, dan Ulekan, seni pertunjukan, serta kuliner tradisional dapat menjadi prioritas awal karena memiliki potensi ekonomi, daya tarik publik, dan peluang produk turunan yang relatif tinggi.

4. Integrasi Budaya dengan Pariwisata Berbasis Komunitas

Arah kebijakan keempat adalah mengintegrasikan budaya ke dalam sistem pariwisata berbasis komunitas. Selama ini pariwisata Kabupaten Bandung Barat lebih banyak dikenal melalui wisata alam, rekreasi, akomodasi, dan kuliner umum. Ke depan, budaya perlu menjadi bagian dari pengalaman wisata agar pariwisata memiliki identitas lokal yang lebih kuat.

Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui paket wisata budaya, kalender event, pertunjukan seni di destinasi wisata, pasar produk budaya, rute wisata budaya, wisata edukasi air, geowisata berbasis budaya, serta kegiatan interpretasi budaya oleh pemandu lokal.

5. Penguatan Branding Budaya Kabupaten Bandung Barat

Arah kebijakan kelima adalah membangun branding budaya Kabupaten Bandung Barat. Branding diperlukan agar budaya lokal memiliki posisi yang jelas dalam pasar wisata dan ekonomi kreatif. Kabupaten Bandung Barat tidak hanya perlu dikenal sebagai wilayah wisata

bappelitbangda

alam, tetapi juga sebagai daerah dengan kekayaan budaya Sunda pegunungan, tradisi air, ritus agraris, seni komunitas, kuliner lokal, dan pengetahuan tradisional.

Branding budaya dapat diperkuat melalui narasi utama, identitas visual, kalender budaya, promosi digital, festival tematik, dan kolaborasi dengan pelaku wisata serta kreator lokal.

5.4 Strategi Pengembangan

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut.

Strategi 1: Dokumentasi dan Digitalisasi Warisan Budaya

Strategi pertama adalah melakukan dokumentasi dan digitalisasi terhadap warisan budaya, terutama WBTB, tradisi lisan, ritus adat, pengetahuan tradisional, situs budaya, dan seni pertunjukan. Dokumentasi perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, pelaku budaya, sesepuh, pemuda desa, akademisi, dan pemerintah daerah.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- pendataan ulang WBTB dan praktik budaya desa;
- perekaman video dan audio tradisi lisan;
- penyusunan narasi budaya per desa;
- pembuatan arsip digital budaya;
- penyusunan buku kecil atau katalog budaya;
- pemetaan pelaku budaya dan komunitas seni;
- dokumentasi proses produksi kerajinan dan kuliner tradisional.

Strategi ini penting sebagai fondasi bagi pengembangan budaya yang lebih terarah. Tanpa dokumentasi dan kurasi, budaya akan sulit dikemas menjadi produk edukatif, wisata, maupun ekonomi kreatif.

Strategi 2: Penguatan Desa Budaya dan Kelembagaan Lokal

Strategi kedua adalah memperkuat desa budaya sebagai unit pengembangan ekonomi kerakyatan. Desa yang memiliki WBTB, ritus adat, seni, kuliner, tradisi lisan, pengetahuan lokal, atau situs budaya perlu didampingi agar mampu mengelola potensi budaya secara kolektif.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- pembentukan atau penguatan forum budaya desa;

bappelitbangda

- penguatan Pokdarwis dan BUMDes berbasis budaya;
- pelatihan manajemen destinasi budaya;
- pelatihan tata kelola event budaya;
- penyusunan aturan desa tentang perlindungan budaya;
- pembentukan koperasi atau unit usaha budaya;
- penyusunan mekanisme pembagian manfaat ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, penguatan desa budaya dan kelembagaan lokal perlu didukung oleh keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat serta penguatan kelembagaan desa. Peran tersebut mencakup pendampingan pemerintah desa dalam mengintegrasikan potensi budaya lokal ke dalam perencanaan pembangunan desa, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta fasilitasi pengembangan BUMDes sebagai wadah pengelolaan usaha berbasis potensi budaya lokal. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah desa diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi budaya dan memastikan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Strategi ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan budaya tetap dikendalikan oleh masyarakat lokal dan tidak hanya dimanfaatkan oleh pihak luar.

Strategi 3: Pengembangan Paket Wisata Budaya Berbasis Komunitas

Strategi ketiga adalah mengembangkan paket wisata budaya berbasis komunitas. Paket wisata budaya perlu disusun berdasarkan karakter budaya dan kesiapan masyarakat. Tidak semua budaya harus dikemas sebagai atraksi terbuka. Budaya yang bersifat edukatif, komunal, visual, dan relatif terbuka dapat dikembangkan sebagai paket wisata.

Contoh paket yang dapat dikembangkan antara lain:

- Paket Wisata Edukasi Air berbasis Mikul Lodong;
- Paket Geowisata dan Kerajinan Batu berbasis Pamitan Menambang Batu;
- Paket Edukasi Seni dan Pusaka berbasis Ngamandian Goong Sibesér;
- Paket Wisata Kuliner Tradisional Desa;
- Paket Storytelling Desa dan Tradisi Lisan;
- Paket Workshop Kerajinan Bambu, Batu, atau Produk Lokal;
- Paket Wisata Siklus Budaya Sunda secara edukatif.

bappelitbangda

Paket wisata harus dikelola oleh masyarakat melalui Pokdarwis, BUMDes, kelompok seni, atau komunitas lokal. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar tentang budaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Strategi 4: Penguatan UMKM dan Produk Turunan Budaya

Strategi keempat adalah memperkuat UMKM dan produk turunan budaya. Produk budaya tidak hanya berbentuk pertunjukan atau ritual, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kuliner, kerajinan, cenderamata, produk edukasi, buku cerita, konten digital, dan produk kreatif lainnya.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- pelatihan desain produk berbasis budaya;
- penguatan kemasan dan label produk;
- sertifikasi dan peningkatan standar higienitas kuliner;
- pengembangan oleh-oleh khas berbasis narasi budaya;
- pemasaran produk melalui destinasi wisata dan platform digital;
- fasilitasi kerja sama UMKM dengan hotel, restoran, dan pengelola wisata;
- pengembangan marketplace produk budaya KBB.

Strategi ini penting karena UMKM merupakan kanal paling langsung untuk menciptakan manfaat ekonomi bagi rumah tangga masyarakat.

Strategi 5: Penyusunan Kalender Event Budaya Kabupaten Bandung Barat

Strategi kelima adalah menyusun kalender event budaya tahunan. Kalender budaya diperlukan agar kegiatan budaya dapat dipromosikan secara lebih terencana dan terhubung dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta agenda pembangunan daerah.

Kalender event dapat memuat:

- festival budaya tahunan;
- pertunjukan seni tradisional;
- festival kuliner lokal;
- peringatan adat desa;
- pameran produk budaya;
- workshop budaya;
- agenda edukasi lingkungan berbasis budaya;

bappelitbangda

- event budaya di kawasan wisata utama.

Kalender budaya tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi antarperangkat daerah, desa, pelaku wisata, UMKM, komunitas seni, dan masyarakat.

Strategi 6: Pengembangan Branding Budaya KBB

Strategi keenam adalah membangun branding budaya Kabupaten Bandung Barat. Branding budaya perlu dikembangkan untuk memperkuat identitas daerah dan membedakan KBB dari destinasi lain di Bandung Raya.

Branding dapat diarahkan pada narasi besar seperti:

"Kabupaten Bandung Barat sebagai ruang budaya Sunda pegunungan yang menghubungkan manusia, alam, dan komunitas."

Narasi tersebut dapat diturunkan ke dalam beberapa tema:

- budaya air dan konservasi;
- budaya agraris dan gotong royong;
- seni komunitas dan pusaka;
- kuliner tradisional berbasis hasil lokal;
- geowisata dan etika pemanfaatan alam;
- tradisi lisan dan cerita desa.

Penguatan branding dapat dilakukan melalui logo tematik, materi promosi, video budaya, media sosial, kampanye digital, festival budaya, dan integrasi dengan promosi pariwisata daerah.

Strategi 7: Perlindungan Budaya Sakral dan Regenerasi Pelaku Budaya

Strategi ketujuh adalah melindungi budaya yang bersifat sakral dan memperkuat regenerasi pelaku budaya. Pengembangan ekonomi budaya tidak boleh mendorong seluruh tradisi menjadi tontonan. Beberapa budaya perlu dijaga sebagai bagian dari kehidupan spiritual, keluarga, dan komunitas.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- penyusunan kode etik pemanfaatan budaya;
- penentuan batas budaya yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan;
- dokumentasi terbatas untuk arsip budaya;
- pelatihan generasi muda;

bappelitbangda

- sekolah budaya desa;
- dukungan kepada tokoh adat dan pelaku budaya;
- penyediaan ruang tampil bagi seni tradisi;
- penguatan muatan lokal berbasis budaya KBB.

Strategi ini penting agar pengembangan ekonomi tidak merusak autentisitas dan keberlanjutan budaya.

5.5 Program Prioritas

Berdasarkan strategi tersebut, program prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Budaya

No	Program Prioritas	Tujuan	Kegiatan Utama	Pelaku Utama
1	Program Dokumentasi dan Digitalisasi Budaya KBB	Menyelamatkan dan mengarsipkan budaya lokal	Inventarisasi WBTB, dokumentasi video, katalog budaya, arsip digital	Disbudpar, desa, akademisi, komunitas budaya
2	Program Desa Budaya Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Menguatkan desa sebagai unit pengelola budaya	Forum budaya desa, BUMDes budaya, Pokdarwis, koperasi budaya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, dan Forum Budaya Desa.
3	Program Paket Wisata Budaya Komunitas	Mengintegrasikan budaya dengan pariwisata	Paket Mikul Lodong, geowisata batu, workshop seni, storytelling desa	Pokdarwis, sanggar, UMKM
4	Program UMKM Produk Budaya	Meningkatkan nilai tambah produk lokal	Kemasan, branding, sertifikasi, pemasaran digital, toko oleh-oleh	Dinas Koperasi UMKM, UMKM, BUMDes
5	Program Kalender Event Budaya KBB	Meningkatkan promosi dan kunjungan budaya	Festival budaya, pertunjukan seni, festival kuliner, pameran budaya	Disbudpar, kecamatan, desa, komunitas
6	Program Branding Budaya KBB	Membangun identitas budaya daerah	Narasi branding, konten digital, promosi wisata budaya	Pemerintah daerah, kreator, pelaku wisata
7	Program Perlindungan dan Regenerasi Budaya Sakral	Menjaga keberlanjutan budaya bernilai tinggi	Kode etik budaya, sekolah budaya, pelatihan pemuda, dokumentasi terbatas	Tokoh adat, desa, komunitas, sekolah

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

bappelitbangda

Program prioritas tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi antarperangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam mendukung pelestarian, pengembangan, dan promosi potensi budaya serta pariwisata berbasis komunitas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas pemerintah desa, serta pengembangan BUMDes sebagai salah satu wadah pengelolaan potensi ekonomi berbasis budaya lokal. Bappelitbangda berperan dalam mengintegrasikan arah pengembangan tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan memfasilitasi koordinasi lintas sektor. Sementara itu, pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, UMKM, dan komunitas budaya menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing wilayah. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

5.6 Tahapan Implementasi

Agar pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya dapat berjalan secara realistis, diperlukan tahapan implementasi yang jelas. Tahapan tersebut dapat dibagi ke dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

5.6.1 Tahap Jangka Pendek

Tahap jangka pendek diarahkan untuk membangun fondasi data, kelembagaan, dan kurasi budaya. Pada tahap ini, kegiatan difokuskan pada pemetaan budaya, dokumentasi, identifikasi pelaku, penyusunan narasi, serta pemilihan desa atau budaya prioritas.

Kegiatan utama pada tahap jangka pendek meliputi:

- pemutakhiran data budaya dan WBTB;
- pemetaan pelaku budaya, UMKM, sanggar, dan komunitas;
- identifikasi budaya prioritas;
- penyusunan narasi budaya unggulan;
- pembentukan forum koordinasi ekonomi budaya;
- penyusunan kode etik pemanfaatan budaya;
- pemilihan pilot project desa budaya.

bappelitbangda

- koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemerintah desa untuk mengidentifikasi kesiapan kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan desa budaya;
- identifikasi awal potensi pengembangan BUMDes dan kelembagaan ekonomi lokal yang dapat mendukung pengelolaan potensi budaya berbasis masyarakat.

5.6.2 Tahap Jangka Menengah

Tahap jangka menengah diarahkan pada pengembangan produk, penguatan kelembagaan, dan integrasi dengan pariwisata serta UMKM. Pada tahap ini, budaya mulai dikembangkan menjadi produk atau jasa ekonomi secara terbatas dan terarah.

Kegiatan utama pada tahap jangka menengah meliputi:

- pengembangan paket wisata budaya;
- pelatihan pemandu budaya;
- penguatan Pokdarwis dan BUMDes budaya;
- fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dan pengembangan unit usaha BUMDes berbasis potensi budaya lokal;
- pendampingan pemerintah desa dalam mengintegrasikan program pengembangan ekonomi berbasis budaya ke dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
- pengembangan produk UMKM berbasis budaya;
- penyelenggaraan kalender event budaya;
- promosi digital produk budaya;
- kerja sama dengan pengelola destinasi, hotel, restoran, dan travel agent.

5.6.3 Tahap Jangka Panjang

Tahap jangka panjang diarahkan pada penguatan ekosistem ekonomi budaya secara berkelanjutan. Pada tahap ini, Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki sistem pengembangan budaya yang terintegrasi dengan perencanaan daerah, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan utama pada tahap jangka panjang meliputi:

- pengembangan jejaring desa budaya;
- penguatan branding budaya KBB;

bappelitbangda

- pembentukan pusat informasi dan promosi budaya;
- pengembangan marketplace produk budaya;
- integrasi budaya ke dalam rencana pariwisata daerah;
- penguatan kerja sama regional Bandung Raya;
- monitoring dampak ekonomi budaya terhadap masyarakat.
- penguatan keberlanjutan kelembagaan desa dan usaha ekonomi berbasis budaya melalui koordinasi antara perangkat daerah, pemerintah desa, BUMDes, dan komunitas budaya

Tabel 5. 2 Tahapan Implementasi Pengembangan Ekonomi Budaya

Tahapan	Fokus Utama	Keluaran yang Diharapkan
Jangka Pendek	Data, dokumentasi, kurasi, kelembagaan awal	Database budaya, narasi budaya, kelembagaan awal, serta desa percontohan yang telah diidentifikasi potensi dan kesiapan kelembagaannya.
Jangka Menengah	Produk, paket wisata, UMKM, event	Paket wisata budaya, produk UMKM budaya, kalender event, serta penguatan Pokdarwis, BUMDes, dan kelembagaan masyarakat desa.
Jangka Panjang	Ekosistem, branding, pasar, keberlanjutan	Jejaring desa budaya, branding KBB, peningkatan pendapatan masyarakat, serta keberlanjutan kelembagaan dan usaha ekonomi berbasis budaya.

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

5.7 Peran Pemangku Kepentingan

Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya membutuhkan kolaborasi lintas aktor. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang saling melengkapi.

Tabel 5. 3 Peran Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Peran Utama
Pemerintah Kabupaten	Menyusun kebijakan, koordinasi lintas sektor, fasilitasi program, promosi daerah
Bappelitbangda	Integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan koordinasi lintas sektor.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pelestarian, pengembangan, dokumentasi, dan promosi budaya serta pariwisata berbasis budaya.
Dinas Koperasi dan UMKM	Penguatan kapasitas usaha, peningkatan nilai tambah produk, dan akses pasar UMKM.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, dan dukungan terhadap pengembangan BUMDes.

bappelitbangda

Pemangku Kepentingan	Peran Utama
Pemerintah Desa	Pelaksanaan program sesuai potensi dan kebutuhan desa serta fasilitasi partisipasi masyarakat.
Pokdarwis	Pengelolaan wisata berbasis komunitas dan pemanduan lokal
Sanggar dan Komunitas Budaya	Pelestarian seni, regenerasi pelaku, pertunjukan budaya
Tokoh Adat/Sesepuh	Penjaga nilai budaya dan batas pemanfaatan budaya
UMKM Lokal	Produksi kuliner, kerajinan, suvenir, jasa wisata
Akademisi	Riset, dokumentasi, pelatihan, pendampingan model pengembangan
Swasta/Pelaku Wisata	Kemitraan pasar, promosi, distribusi wisatawan, dukungan event
Pemuda/Kreator Lokal	Digitalisasi budaya, konten kreatif, promosi media sosial

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Kolaborasi antaraktor perlu difasilitasi melalui forum koordinasi ekonomi budaya, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Forum ini dapat menjadi ruang untuk menyepakati prioritas, membagi peran, menyelesaikan konflik, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi benar-benar diterima oleh masyarakat lokal.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas pemangku kepentingan perlu melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan ekonomi berbasis budaya. Keterlibatan tersebut diarahkan untuk mendorong pemerintah desa, BUMDes, dan kelembagaan masyarakat agar mampu mengidentifikasi, merencanakan, serta mengelola potensi budaya lokal secara partisipatif. Dengan pembagian peran yang jelas antara perangkat daerah dan pelaku lokal, pengembangan budaya diharapkan tidak hanya menghasilkan kegiatan pelestarian dan promosi, tetapi juga memperkuat kemandirian kelembagaan desa serta menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

5.8 Rekomendasi Pengembangan Berdasarkan Prioritas Budaya

Pengembangan budaya dapat dilakukan secara berbeda menurut karakter masing-masing aset budaya.

Tabel 5. 4 Rekomendasi Pengembangan Berdasarkan Aset Budaya

Aset Budaya	Rekomendasi Pengembangan
Mikul Lodong	Dikembangkan sebagai wisata edukasi air, festival budaya, workshop bambu, dan paket konservasi sumber air
Ngamandian Goong Sibesér	Dikembangkan sebagai pertunjukan budaya, workshop musik tradisional, edukasi pusaka, dan festival seni
Pamitan Menambang Batu	Dikembangkan sebagai geowisata, wisata produksi cobek dan ulekan, edukasi etika lingkungan, dan produk kerajinan batu

bappelitbangda

Aset Budaya	Rekomendasi Pengembangan
Seni Pertunjukan	Dikembangkan melalui kalender pertunjukan, festival budaya, atraksi wisata, pelatihan seni, dan kerja sama destinasi
Kuliner Tradisional	Dikembangkan melalui UMKM kuliner, festival pangan lokal, oleh-oleh khas, dan branding kuliner budaya
Ngamandian Ucing	Dikembangkan secara terbatas sebagai storytelling budaya, edukasi iklim, dan festival tematik dengan memperhatikan etika budaya
Serepan Patalekan	Dikembangkan sebagai edukasi tata kelola lokal, musyawarah adat, dan pembelajaran nilai sosial komunitas
Tradisi Lisan	Dikembangkan melalui dokumentasi cerita rakyat, pemanduan budaya, konten digital, dan buku cerita lokal
Pengetahuan Tradisional	Dikembangkan melalui edukasi, pelatihan, dokumentasi, dan produk kreatif berbasis kearifan lokal
Hajat Arwah, Raracik Goib, Puput Puseur, Nyengitan Seuweu Siwi, Palakiah Palean Raga	Difokuskan pada pelestarian, dokumentasi, regenerasi, dan edukasi terbatas; tidak diarahkan sebagai atraksi wisata terbuka

Sumber: Hasil Olahan Konsultan Tahun 2025

bappelitbangda

BAB 6 PENUTUP



Kajian ini menegaskan bahwa budaya di Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dipahami semata sebagai warisan yang bersifat simbolik, melainkan sebagai sumber daya pembangunan yang memiliki relasi erat dengan dinamika ekonomi masyarakat. Namun demikian, hubungan antara budaya dan peningkatan ekonomi tidak bersifat otomatis. Dampak ekonomi budaya sangat ditentukan oleh konteks kewilayahan, kapasitas desa, struktur ekonomi lokal, serta cara budaya tersebut dimaknai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan adanya variasi yang jelas antar wilayah. Pada kecamatan dengan karakter wisata yang relatif mapan, budaya telah terintegrasi ke dalam sistem ekonomi lokal, terutama melalui sektor pariwisata, UMKM, dan jasa pendukung. Di wilayah ini, budaya berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang nyata, meskipun tetap menyisakan tantangan terkait keberlanjutan dan pemerataan manfaat. Sebaliknya, pada wilayah agraris dan berbasis komunitas, budaya berperan dominan sebagai penguat kohesi sosial, identitas, dan ketahanan komunitas. Kontribusi ekonominya cenderung tidak langsung dan laten, namun memiliki arti strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat desa.

Kajian ini juga menegaskan pentingnya kapasitas desa sebagai faktor penentu efektivitas pemanfaatan budaya. Desa dengan status Mandiri dan Maju menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi dalam mengelola budaya sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, sementara desa Berkembang memerlukan pendekatan bertahap yang menekankan penguatan kapasitas sosial, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, budaya tidak dapat diposisikan sebagai solusi instan bagi persoalan ekonomi, melainkan sebagai bagian dari proses pembangunan yang berjangka menengah hingga panjang.

Secara keseluruhan, temuan kajian ini mengarah pada satu kesimpulan utama, yaitu bahwa peningkatan ekonomi masyarakat berbasis budaya di Kabupaten Bandung Barat hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang kontekstual, diferensiatif, dan sensitif terhadap nilai budaya lokal. Pendekatan yang seragam berisiko menghasilkan program yang tidak efektif, bahkan berpotensi menimbulkan konflik nilai dan ketimpangan manfaat.

bappelitbangda

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2025). *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2025*. Kabupaten Bandung Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat.

Galluccio, C. (2024). Cultural heritage and economic development: Measuring the role of museums and heritage. *Journal of Cultural Heritage*.

Kostakis, I., & Lolos, S. (2024). Uncovering the impact of cultural heritage on economic growth: Evidence from regional data. *The Annals of Regional Science*.

Mubyarto. (1997). *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.

Mubyarto. (2002). *Ekonomi Pancasila: Landasan Pemikiran dan Misi Penerapan*. Yogyakarta: BPFE.

OECD. (2018). *Culture and Local Development: Maximising the Impact*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2019). *Better Criteria for Better Evaluation: Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use*. Paris: OECD Publishing.

Pramawati, I. (2025). Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Cendekia*.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024*. Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2025). *Laporan Akhir Pengembangan Budaya Lokal yang Mendukung Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025*. Kabupaten Bandung Barat: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. *Journal of Hospitality and Tourism Management, 36*, 12–21.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif*.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

bappelitbangda

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.

Tismara, H. (2022). *10 Ritus Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia: Kabupaten Bandung Barat sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Budaya Masyarakat*.

UNESCO. (2013). *Culture: Key to Sustainable Development*. Paris: UNESCO.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2004). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. Madrid: World Tourism Organization.

Yuniarti, L. (2024). Collaborative culture and inclusive economic growth at the local level. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.

bappelitbangda

LAMPIRAN – RINGKASAN SEPULUH (10) RITUS WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB) KBB

1. Upacara Ngamandian Ucing

Dalam buku 10 Ritus Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, Upacara Ngamandian Ucing dijelaskan sebagai salah satu praktik budaya masyarakat Sunda di Jawa Barat yang dilaksanakan sebagai respon terhadap kondisi kekeringan atau kemarau panjang. Tradisi ini merupakan bentuk kearifan lokal dalam menyikapi ketidakpastian alam melalui pendekatan simbolik dan kolektif.

Secara pelaksanaan, upacara ini diawali dengan tahap persiapan yang melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk tokoh adat dan warga setempat. Unsur utama dalam ritual ini adalah seekor kucing yang kemudian dimandikan atau disiram air sebagai simbol permohonan hujan. Selanjutnya, kucing tersebut diarak mengelilingi kampung, diiringi oleh masyarakat yang melantunkan doa-doa, nyanyian tradisional, serta ungkapan harapan akan turunnya hujan. Kegiatan ini bersifat terbuka dan partisipatif, sehingga melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Dari aspek fungsi, Upacara Ngamandian Ucing tidak hanya berperan sebagai ritual permohonan hujan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang signifikan. Kegiatan ini memperkuat solidaritas sosial melalui praktik gotong royong serta menjadi media interaksi antarwarga. Selain itu, ritual ini berfungsi sebagai sarana transmisi nilai budaya kepada generasi muda, sehingga keberlanjutan tradisi dapat terjaga.

Secara makna, upacara ini mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat yang melihat adanya hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Tindakan simbolik dalam ritual menjadi representasi dari harapan kolektif masyarakat terhadap keseimbangan alam. Dalam konteks ini, Ngamandian Ucing dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kultural terhadap kondisi lingkungan.

Dalam perspektif Warisan Budaya Tak Benda, tradisi ini memiliki nilai penting sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme non-teknis dalam merespons permasalahan lingkungan, yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada nilai kebersamaan, spiritualitas, dan keberlanjutan budaya.

2. Upacara Mikul Lodong

Upacara Mikul Lodong dijelaskan sebagai tradisi masyarakat Sunda yang berkaitan erat dengan aktivitas agraris, khususnya dalam pengelolaan air sebagai sumber kehidupan. “Lodong” sendiri

bappelitbangda

merujuk pada wadah air dari bambu yang secara tradisional digunakan untuk membawa air dari sumbernya ke permukiman atau lahan pertanian.

Pelaksanaan upacara ini diawali dengan persiapan yang melibatkan masyarakat secara kolektif, terutama para perempuan yang berperan sebagai pembawa lodong. Dalam prosesi inti, para peserta memikul lodong yang berisi air sambil berjalan beriringan menuju lokasi tertentu, seperti sumber air atau area pertanian. Kegiatan ini biasanya diiringi dengan nyanyian tradisional, doa, serta ekspresi budaya lainnya yang mencerminkan suasana sakral sekaligus kebersamaan.

Secara fungsional, Upacara Mikul Lodong tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air secara simbolik, tetapi juga berperan sebagai media penguatan solidaritas sosial. Partisipasi aktif masyarakat menunjukkan adanya nilai gotong royong yang menjadi fondasi kehidupan komunal. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan ini menjadi sarana efektif dalam proses pewarisan nilai budaya.

Dari aspek makna, ritual ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air sebagai sumber kehidupan dan keseimbangan alam. Aktivitas memikul lodong tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan fisik, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, upacara ini merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.

Dalam perspektif Warisan Budaya Tak Benda, Upacara Mikul Lodong memiliki nilai strategis sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang terus dilestarikan. Tradisi ini menunjukkan bahwa praktik budaya tidak hanya berfungsi sebagai warisan simbolik, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Keberlanjutannya menjadi penting dalam menghadapi tantangan modernisasi yang berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional.

3. Upacara Hajat Arwah

Upacara Hajat Arwah dijelaskan sebagai salah satu tradisi masyarakat yang berkaitan dengan penghormatan terhadap arwah leluhur. Ritual ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan hubungan antara dunia manusia dengan dunia roh, yang tetap terjaga meskipun individu telah meninggal dunia.

Pelaksanaan upacara ini umumnya diawali dengan persiapan oleh keluarga dan masyarakat, termasuk penyiapan sesaji serta perlengkapan ritual lainnya. Prosesi inti dilakukan dengan pembacaan doa-doa, zikir, atau bentuk ungkapan spiritual lainnya yang ditujukan kepada arwah leluhur. Dalam beberapa tahapan, kegiatan ini dapat melibatkan simbol-simbol tertentu yang merepresentasikan penghormatan dan pengingat terhadap orang yang telah meninggal.

Secara fungsional, Upacara Hajat Arwah berperan sebagai media untuk mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat, khususnya dalam konteks kekeluargaan. Ritual ini menjadi

bappelitbangda

momentum berkumpulnya keluarga besar dan masyarakat untuk bersama-sama mengenang serta mendoakan leluhur. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Dari aspek makna, upacara ini mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat yang menempatkan leluhur sebagai bagian penting dalam kehidupan spiritual. Penghormatan terhadap arwah dipahami sebagai bentuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan dimensi spiritual. Dengan demikian, ritual ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang mendalam terkait penghargaan terhadap asal-usul dan identitas keluarga.

Dalam perspektif Warisan Budaya Tak Benda, Upacara Hajat Arwah memiliki nilai penting sebagai bagian dari identitas budaya yang terus dipertahankan. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat memaknai kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari siklus kehidupan yang tetap terhubung dengan yang hidup. Keberlanjutan praktik ini menjadi penting dalam menjaga kesinambungan nilai budaya di tengah perubahan sosial.

4. Upacara Palakiah Palean Raga

Upacara Palakiah Palean Raga dijelaskan sebagai salah satu ritus tradisional yang berkaitan dengan dimensi spiritual dan perlindungan diri manusia. Tradisi ini mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kondisi jasmani dan rohani melalui praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Pelaksanaan upacara ini diawali dengan persiapan yang melibatkan tokoh adat atau pemuka spiritual, serta partisipasi masyarakat. Dalam prosesi inti, dilakukan rangkaian ritual yang meliputi pembacaan doa, penggunaan media atau simbol tertentu, serta tindakan simbolik yang dimaknai sebagai proses "pembersihan" atau perlindungan terhadap diri (raga). Aktivitas ini berlangsung dalam suasana sakral, dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan tradisi setempat.

Secara fungsional, Upacara Palakiah Palean Raga berperan sebagai sarana untuk memberikan rasa aman dan ketenangan bagi individu maupun komunitas. Ritual ini juga menjadi media untuk memperkuat ikatan sosial, karena pelaksanaannya melibatkan interaksi antaranggota masyarakat. Selain itu, kegiatan ini berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan sistem pengetahuan lokal.

Dari aspek makna, upacara ini mencerminkan pandangan masyarakat bahwa kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik, tetapi juga oleh kondisi spiritual. Oleh karena itu, ritual ini dipahami sebagai bentuk usaha untuk menjaga harmoni antara tubuh, jiwa, dan lingkungan sekitar. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan.

bappelitbangda

Dalam perspektif Warisan Budaya Tak Benda, Upacara Palakiah Palean Raga memiliki nilai strategis sebagai bagian dari identitas budaya yang terus dijaga keberlanjutannya. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme kultural dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian hidup, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pelestariannya menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah dinamika perubahan zaman.

5. Upacara Ngamandian Goong Sibesér

Upacara Ngamandian Goong Sibeser merupakan salah satu ritus tradisional yang berfokus pada pemeliharaan dan penyucian benda pusaka, khususnya alat musik gong (goong) yang memiliki nilai sakral dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks budaya, gong tidak hanya dipandang sebagai instrumen musik, tetapi juga sebagai simbol kekuatan spiritual, identitas komunitas, serta warisan leluhur yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, kegiatan "ngamandian" atau memandikan gong dimaknai sebagai proses penyucian sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam benda tersebut.

Pelaksanaan upacara ini umumnya dilakukan secara berkala pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral. Prosesi diawali dengan persiapan berbagai perlengkapan ritual, seperti air suci, bunga, sesaji, serta bahan-bahan lain yang memiliki makna simbolik. Tokoh adat atau sesepuh biasanya memimpin jalannya upacara dengan membacakan doa dan mantra sebagai bentuk permohonan kepada kekuatan spiritual agar benda pusaka tetap terjaga kesuciannya dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tahapan inti ritual melibatkan proses pembersihan fisik gong yang dilakukan dengan tata cara khusus, disertai dengan penghormatan simbolik terhadap benda tersebut.

Secara fungsional, Ngamandian Goong Sibeser memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, sebagai sarana pelestarian warisan budaya, di mana gong sebagai artefak tradisional dirawat secara berkala agar tetap dapat digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan kesenian. Kedua, sebagai media penguatan nilai spiritual, karena ritual ini mencerminkan keyakinan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan atau makna sakral yang perlu dijaga. Ketiga, sebagai sarana mempererat hubungan sosial, karena pelaksanaan upacara ini biasanya melibatkan partisipasi masyarakat secara kolektif.

Selain itu, upacara ini juga mencerminkan sistem kepercayaan yang menempatkan benda pusaka sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki keterkaitan dengan dunia spiritual. Proses penyucian yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik, dengan tujuan untuk menghilangkan unsur-unsur negatif serta memperbarui energi positif yang terkandung dalam benda tersebut. Dengan demikian, Ngamandian Goong Sibeser berfungsi sebagai mekanisme kultural untuk menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan masyarakat.

bappelitbangda

Dalam perkembangan modern, praktik upacara ini tetap dipertahankan meskipun mengalami beberapa penyesuaian. Pengaruh modernisasi tidak sepenuhnya menghilangkan ritual ini, melainkan mendorong masyarakat untuk mengadaptasinya agar tetap relevan. Dalam beberapa kasus, upacara ini juga menjadi bagian dari atraksi budaya yang memiliki nilai edukatif dan pariwisata, tanpa menghilangkan esensi sakralnya.

Secara keseluruhan, Upacara Ngamandian Goong Sibeser merupakan manifestasi budaya yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan pelestarian budaya dalam satu kesatuan praktik. Ritus ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlanjutan warisan budaya, memperkuat identitas komunitas, serta mempertahankan nilai-nilai tradisional yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat.

6. Upacara Puput Puseur

Upacara Puput Puseur merupakan salah satu ritus penting dalam siklus kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya yang berakar pada tradisi lokal yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai adat. Secara konseptual, upacara ini dilaksanakan ketika tali pusat bayi telah lepas (puput), yang menandai fase awal kemandirian biologis seorang anak setelah kelahiran. Dalam perspektif budaya, peristiwa ini tidak sekadar bersifat fisiologis, melainkan dipandang sebagai momentum simbolik yang memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, masyarakat menyelenggarakan serangkaian kegiatan ritual sebagai bentuk syukur sekaligus doa untuk keselamatan dan masa depan bayi.

Pelaksanaan upacara Puput Puseur umumnya melibatkan keluarga inti serta masyarakat sekitar, mencerminkan kuatnya nilai kolektivitas dalam budaya setempat. Kegiatan ini biasanya diawali dengan persiapan berbagai perlengkapan ritual, seperti sesaji, makanan tradisional, serta benda-benda simbolik yang memiliki makna filosofis tertentu. Setiap unsur yang digunakan dalam upacara memiliki fungsi simbolik, misalnya sebagai representasi harapan akan kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi bayi. Dalam praktiknya, tokoh adat atau sesepuh seringkali memimpin jalannya prosesi, yang meliputi doa-doa, pemberian berkah, serta tindakan simbolik tertentu terhadap bayi.

Selain aspek spiritual, upacara ini juga berfungsi sebagai sarana pengenalan bayi kepada lingkungan sosialnya. Kehadiran kerabat dan tetangga dalam acara tersebut menjadi bentuk pengakuan sosial atas keberadaan anggota baru dalam komunitas. Dengan demikian, Puput Puseur tidak hanya menandai perubahan status individu bayi, tetapi juga memperkuat relasi sosial antaranggota masyarakat. Tradisi berbagi makanan atau kenduri yang sering menyertai upacara ini semakin menegaskan nilai solidaritas dan gotong royong sebagai fondasi kehidupan sosial.

bappelitbangda

Lebih lanjut, upacara Puput Puseur mencerminkan sistem kepercayaan masyarakat yang memandang kehidupan manusia sebagai bagian dari keterhubungan antara dunia fisik dan spiritual. Tindakan-tindakan ritual yang dilakukan diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi bayi dari gangguan non-fisik serta membawa keberkahan dalam kehidupannya. Simbolisme yang terkandung dalam setiap tahapan ritual menunjukkan adanya pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

Dalam konteks modern, praktik Puput Puseur mengalami berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan esensi utamanya. Beberapa masyarakat mungkin menyederhanakan prosesi atau menggabungkannya dengan praktik keagamaan formal. Namun demikian, nilai-nilai utama seperti rasa syukur, harapan akan keselamatan, serta pentingnya keterlibatan sosial tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa ritus tersebut memiliki daya adaptasi yang tinggi, sehingga tetap relevan dalam dinamika kehidupan masyarakat kontemporer.

Secara keseluruhan, Upacara Puput Puseur merupakan manifestasi budaya yang mengintegrasikan dimensi biologis, sosial, dan spiritual dalam satu kesatuan praktik ritual. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas budaya, penguatan kohesi sosial, serta pelestarian nilai-nilai lokal yang memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat.

7. Upacara Pamitan Menambang Batu Coet, Cobek, dan Ulekan

Upacara pamitan menambang batu coet, cobek, dan ulekan merupakan salah satu bentuk ritus budaya yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam dalam tradisi masyarakat lokal. Ritus ini dilaksanakan sebelum aktivitas penambangan batu dilakukan, sebagai bentuk permohonan izin kepada alam sekaligus penghormatan terhadap kekuatan-kekuatan tak kasatmata yang diyakini menjaga wilayah tersebut. Dalam kerangka budaya, kegiatan ini tidak hanya memiliki dimensi ekonomi—yakni sebagai awal dari proses produksi alat rumah tangga tradisional—tetapi juga sarat dengan nilai spiritual dan etika ekologis.

Secara prosesi, upacara ini diawali dengan persiapan berbagai perlengkapan ritual, seperti sesaji yang terdiri atas makanan tradisional, hasil bumi, serta unsur simbolik lainnya yang merepresentasikan rasa syukur dan permohonan keselamatan. Pelaksanaan ritual biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau sesepuh yang memiliki otoritas spiritual dalam komunitas. Doa-doa dan mantra yang diucapkan dalam upacara tersebut berfungsi sebagai media komunikasi antara manusia dengan alam, dengan harapan agar kegiatan penambangan dapat berlangsung lancar, aman, dan tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik maupun nonfisik.

Kegiatan pamitan ini juga mencerminkan adanya sistem pengetahuan lokal yang mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Masyarakat tidak memandang alam semata sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai entitas yang harus dihormati dan dijaga

bappelitbangda

keseimbangannya. Oleh karena itu, upacara ini berfungsi sebagai mekanisme kultural untuk mengendalikan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga tercipta praktik penambangan yang lebih bertanggung jawab.

Selain aspek spiritual dan ekologis, upacara pamitan menambang batu juga memiliki fungsi sosial yang penting. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ritual memperkuat solidaritas dan kohesi sosial antaranggota komunitas. Kegiatan bersama, seperti persiapan sesaji dan pelaksanaan doa, menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial sekaligus memperkuat identitas kolektif sebagai masyarakat yang memiliki tradisi dan nilai yang sama. Tradisi ini juga menjadi media pendidikan budaya bagi generasi muda agar memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam perkembangan zaman, praktik upacara ini mengalami berbagai penyesuaian, terutama akibat pengaruh modernisasi dan perubahan pola ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, esensi utama dari ritus ini—yakni penghormatan terhadap alam dan permohonan keselamatan—tetap dipertahankan. Bahkan, dalam konteks kontemporer, nilai-nilai yang terkandung dalam upacara ini semakin relevan, terutama dalam menghadapi isu-isu kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali.

Secara keseluruhan, upacara pamitan menambang batu coet, cobek, dan ulekan merupakan manifestasi budaya yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu kesatuan praktik. Ritus ini tidak hanya berfungsi sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai instrumen kultural yang mengatur hubungan manusia dengan alam serta memperkuat nilai-nilai keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat.

8. Upacara Raracik Goib

Upacara Raracik Goib merupakan salah satu ritus tradisional yang mencerminkan dimensi spiritual yang kuat dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Secara konseptual, istilah “raracik” merujuk pada proses meramu atau menyusun unsur-unsur tertentu, sedangkan “goib” mengacu pada hal-hal yang bersifat tak kasatmata atau supranatural. Dengan demikian, upacara ini dapat dipahami sebagai praktik ritual yang bertujuan untuk meracik atau mengelola kekuatan gaib guna mencapai tujuan tertentu, baik yang bersifat protektif, penyembuhan, maupun menjaga keseimbangan kosmis antara manusia dan dunia spiritual.

Pelaksanaan upacara Raracik Goib umumnya melibatkan individu yang memiliki otoritas spiritual, seperti dukun, sesepuh, atau tokoh adat yang diyakini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Dalam prosesinya, berbagai unsur simbolik digunakan, seperti sesaji, ramuan tradisional, serta benda-benda tertentu yang memiliki makna magis. Setiap komponen yang diracik dalam ritual ini tidak bersifat acak, melainkan didasarkan pada pengetahuan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Proses peracikan tersebut dilakukan dengan tata cara

bappelitbangda

khusus yang disertai dengan pembacaan mantra atau doa sebagai bentuk penguatan makna spiritual.

Secara fungsional, upacara ini memiliki beragam tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai sarana perlindungan dari gangguan nonfisik, seperti roh jahat atau energi negatif yang diyakini dapat memengaruhi kehidupan manusia. Selain itu, Raracik Goib juga kerap digunakan dalam konteks penyembuhan tradisional, di mana penyakit tidak hanya dipahami secara medis, tetapi juga sebagai akibat dari ketidakseimbangan spiritual. Oleh karena itu, ritual ini menjadi bagian dari sistem pengobatan alternatif yang mengintegrasikan aspek fisik dan metafisik.

Lebih lanjut, upacara ini mencerminkan sistem kepercayaan masyarakat yang memandang dunia sebagai ruang yang dihuni oleh berbagai entitas, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Hubungan antara manusia dan entitas tersebut diatur melalui praktik-praktik ritual seperti Raracik Goib, yang berfungsi sebagai media komunikasi sekaligus negosiasi. Dalam konteks ini, ritual tidak hanya dipandang sebagai aktivitas simbolik, tetapi juga sebagai tindakan nyata yang diyakini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan individu maupun komunitas.

Dari segi sosial, keberadaan upacara ini juga memperlihatkan peran penting tokoh adat sebagai penjaga pengetahuan tradisional. Proses pewarisan praktik Raracik Goib berlangsung secara informal melalui pengalaman dan pembelajaran langsung, sehingga memperkuat kontinuitas budaya dalam masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam ritual, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut memperkuat kohesi sosial dan rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Dalam konteks modern, praktik Raracik Goib menghadapi tantangan akibat perubahan pola pikir masyarakat yang semakin rasional dan berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Meskipun demikian, ritus ini tetap bertahan sebagai bagian dari identitas budaya, terutama di komunitas yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik ini mengalami adaptasi dengan menggabungkan unsur-unsur kepercayaan lokal dan agama formal, sehingga tetap relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Secara keseluruhan, Upacara Raracik Goib merupakan manifestasi budaya yang menunjukkan kompleksitas hubungan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Ritus ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dan kultural yang menjaga keseimbangan kehidupan serta melestarikan pengetahuan tradisional dalam masyarakat.

9. Upacara Nyengitan Seuweu Siwi

Upacara Nyengitan Seuweu Siwi merupakan salah satu ritus dalam siklus kehidupan manusia yang berkaitan dengan fase pertumbuhan anak, khususnya masa peralihan menuju tahap

bappelitbangda

perkembangan tertentu yang dianggap penting dalam tradisi masyarakat. Istilah "nyengitan" secara kultural merujuk pada proses simbolik yang berkaitan dengan perubahan atau penandaan fisik maupun sosial pada anak, sedangkan "seuweu siwi" menggambarkan posisi anak sebagai bagian dari keturunan atau generasi penerus dalam keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, upacara ini memiliki makna sebagai bentuk pengakuan terhadap pertumbuhan anak sekaligus harapan akan masa depan yang baik.

Pelaksanaan upacara ini umumnya dilakukan oleh keluarga dengan melibatkan tokoh adat atau sesepuh yang memimpin jalannya ritual. Prosesi diawali dengan persiapan berbagai perlengkapan, seperti sesaji, makanan tradisional, serta benda-benda simbolik yang memiliki makna filosofis tertentu. Dalam tahapan inti, dilakukan tindakan simbolik terhadap anak yang menjadi pusat ritual, yang dapat berupa sentuhan, pemberian tanda, atau perlakuan khusus yang melambangkan proses pematangan dan perlindungan. Setiap tahapan dilakukan dengan tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun, disertai dengan doa-doa atau mantra yang mengandung harapan akan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan bagi anak.

Secara fungsional, Nyengitan Seuweu Siwi tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Upacara ini menjadi sarana bagi keluarga untuk memperkenalkan anak kepada lingkungan sosial yang lebih luas, sekaligus memperkuat hubungan kekerabatan dan solidaritas dalam komunitas. Kehadiran kerabat dan tetangga dalam kegiatan tersebut mencerminkan adanya pengakuan kolektif terhadap status anak sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu, kegiatan berbagi makanan yang biasanya menyertai upacara ini menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong yang masih dijunjung tinggi.

Dalam perspektif budaya, upacara ini juga mencerminkan sistem kepercayaan masyarakat yang memandang pertumbuhan anak tidak hanya sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai perjalanan spiritual yang memerlukan perlindungan dan bimbingan. Tindakan-tindakan ritual yang dilakukan diyakini mampu menjaga anak dari pengaruh negatif, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, Nyengitan Seuweu Siwi berfungsi sebagai mekanisme kultural untuk memastikan keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani dalam proses tumbuh kembang anak.

Di tengah arus modernisasi, praktik upacara ini mengalami berbagai adaptasi, baik dalam hal penyederhanaan prosesi maupun integrasi dengan nilai-nilai keagamaan formal. Meskipun demikian, esensi utama dari ritual ini tetap dipertahankan, terutama dalam hal penekanan pada nilai kasih sayang keluarga, perlindungan terhadap anak, serta pentingnya keterlibatan sosial dalam proses pertumbuhan individu. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk tetap relevan dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

Secara keseluruhan, Upacara Nyengitan Seuweu Siwi merupakan manifestasi budaya yang mengintegrasikan aspek sosial, spiritual, dan simbolik dalam satu kesatuan ritus. Keberadaannya

bappelitbangda

tidak hanya berfungsi sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas, penguatan hubungan sosial, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia dalam masyarakat.

10. Upacara Serepan Patalekan

Upacara Serepan Patalekan merupakan salah satu ritus tradisional yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat. Secara konseptual, istilah "serepan" merujuk pada aktivitas berkumpul atau berhimpun, sedangkan "patalekan" berkaitan dengan proses musyawarah atau pembahasan bersama dalam komunitas. Dengan demikian, upacara ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai forum sosial yang memiliki dimensi ritual, di mana masyarakat berkumpul untuk membahas, memohon, sekaligus memperkuat kesepakatan kolektif yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Dalam pelaksanaannya, Serepan Patalekan diawali dengan persiapan berbagai unsur pendukung, seperti sesaji, hidangan tradisional, serta perlengkapan simbolik yang mencerminkan nilai-nilai budaya setempat. Prosesi ritual biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau sesepuh yang memiliki otoritas dalam mengarahkan jalannya kegiatan. Tahapan inti upacara melibatkan doa bersama, penyampaian maksud atau tujuan pertemuan, serta diskusi yang dilakukan dalam suasana yang sarat dengan norma dan etika adat. Kehadiran unsur ritual dalam kegiatan musyawarah ini menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga memiliki legitimasi spiritual.

Secara fungsional, upacara ini memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Melalui Serepan Patalekan, masyarakat memiliki ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, maupun adat. Proses musyawarah yang dilakukan secara kolektif mencerminkan prinsip demokrasi tradisional yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, saling menghormati, dan konsensus. Dengan demikian, ritus ini berfungsi sebagai mekanisme kultural dalam pengambilan keputusan yang adil dan diterima oleh seluruh anggota komunitas.

Selain itu, upacara ini juga mengandung dimensi spiritual yang kuat, di mana doa dan sesaji menjadi sarana untuk memohon bimbingan serta restu dari kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat, setiap keputusan penting perlu didasarkan tidak hanya pada pertimbangan logis, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual yang diyakini dapat membawa keberkahan dan keselamatan. Dengan demikian, Serepan Patalekan mencerminkan integrasi antara aspek rasional dan spiritual dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks modern, praktik upacara ini mengalami dinamika akibat perubahan sosial dan perkembangan sistem pemerintahan formal. Meskipun demikian, nilai-nilai yang terkandung

bappelitbangda

dalam Serepan Patalekan, seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat, tetap relevan dan bahkan menjadi landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa komunitas masih mempertahankan praktik ini sebagai bagian dari identitas budaya, sementara yang lain mengadaptasinya ke dalam bentuk yang lebih sederhana tanpa menghilangkan esensi utamanya.

Secara keseluruhan, Upacara Serepan Patalekan merupakan manifestasi budaya yang mengintegrasikan fungsi sosial, spiritual, dan kultural dalam satu kesatuan praktik. Ritus ini tidak hanya berperan sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas komunitas, serta melestarikan nilai-nilai budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

bappelitbangda